



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja KKP Tahun 2026 yang terdiri atas:
- arah kebijakan, sasaran strategis, program, dan kegiatan, serta dukungan terhadap prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - alokasi anggaran per unit organisasi eselon I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - matriks Renja KKP Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - rincian program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Renja KKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi unit organisasi eselon I untuk dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
- KETIGA : Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit organisasi eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA digunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan rencana kerja.
- KELIMA : Pimpinan unit organisasi eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Renja KKP tahun 2026 melalui laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran setiap triwulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN,
SERTA DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

A. Arah Kebijakan

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan kelautan dan perikanan pada RKP Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui swasembada pangan berbasis sumber daya akuatik (*blue food*) dan swasembada garam serta mendorong transformasi ekonomi biru sebagai salah satu sumbu utama kemandirian bangsa. Kebijakan ini sejalan dengan tema RKP Tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, yang merupakan penjabaran dari tema RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk mewujudkan (1) pertumbuhan tinggi berkelanjutan meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20-5,50 persen, peningkatan *Gross National Income* (GNI) per kapita hingga 5.550 USD, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 37,14 persen dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ke angka 72,67; (2) penurunan kemiskinan meliputi penurunan tingkat kemiskinan ke 6,0-7,0 persen, kemiskinan ekstrem sebesar 0,5 persen, rasio gini sebesar 0,377-0,380, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44-4,86 persen; (3) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai dengan kenaikan Indeks Modal Manusia ke angka 0,57, proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,5 persen. Selain itu, RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk mencapai Indikator Pembangunan Tahun 2026, Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106-108.

Asta Cita merupakan visi dan misi utama yang menjadi pondasi arah pembangunan nasional dan diintegrasikan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2026 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2026–2045 dan RPJMN 2026–2029 terdiri atas: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim

industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sektor kelautan dan perikanan menjadi kontributor utama pada PN (2) terkait swasembada pangan dan ekonomi biru, PN (4) terkait pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dan pemuda, PN (5) khususnya hilirisasi dan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan PN (8) terkait penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, serta mendukung PN lainnya terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, vokasi dan produktivitas tenaga kerja, kemandirian desa, reformasi sistem jaminan sosial, serta reformasi hukum.

Sejalan dengan itu, arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagai pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, yang diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

- 1) memperluas kawasan konservasi laut;
- 2) penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;
- 3) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
- 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan yang merupakan:

1. Penugasan Yang Menjadi Program Prioritas Presiden:
 - a. Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional merupakan agenda strategis Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada garam nasional. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor garam yang selama ini menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menegaskan komitmen bahwa Indonesia tidak akan lagi melakukan impor garam konsumsi maupun industri pada akhir tahun 2027, sejalan dengan visi ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi nasional. Upaya tersebut dijalankan melalui tiga strategi utama, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan teknologi pada lahan terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Sebagai pelaksana utama kebijakan ini, KKP berkomitmen memperkuat basis produksi garam rakyat melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan mutu yang sesuai dengan standar industri. Program revitalisasi dan pembangunan infrastruktur utama tambak dilaksanakan di berbagai wilayah untuk memastikan suplai air laut tetap terjaga sepanjang musim produksi. Selain itu, KKP juga berupaya menjalankan strategi ekstensifikasi dengan membuka lahan garam baru di lokasi prioritas, yaitu di Kabupaten Rote Ndao. KKP bersama Pemerintah Daerah Rote Ndao tengah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) dengan total luas area tambak garam mencapai 10.764 hektare (ha), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

Namun demikian, untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan garam nasional yang mencapai 5 juta ton per tahun, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi saja belum cukup karena keduanya masih sangat tergantung pada cuaca. Oleh karena itu, diperlukan strategi berikutnya yaitu penerapan teknologi produksi yang unggul dan berkelanjutan. Teknologi ini harus mampu mengatasi kelemahan utama produksi tradisional, yakni ketergantungan pada musim kemarau dan rendahnya kualitas.

Dalam konteks pengadaan garam industri dengan kemurnian tinggi dan produksi sepanjang tahun, KKP mendorong adopsi teknologi pabrikan modern seperti *Seawater Reverse Osmosis* (SWRO) dan *Mechanical Vapour Recompression* (MVR) Evaporator. Penerapan teknologi ini sulit dilakukan oleh petambak garam rakyat karena memerlukan biaya tinggi. Oleh karena itu, KKP terus mendorong percepatan investasi sektor pergaraman melalui kemudahan perizinan, insentif, dan pembukaan kemitraan strategis antara pelaku usaha besar dan koperasi garam rakyat. Arah kebijakan ini bertujuan membangun rantai pasok garam nasional yang efisien dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Memasuki tahun 2026, KKP menargetkan K-SIGN tahap pertama dapat beroperasi dan menghasilkan garam berkualitas industri yang mampu mensubstitusi impor garam industri. Pada saat yang sama, produktivitas tambak garam rakyat ditingkatkan melalui penerapan teknologi percepatan penuaan air dan perbaikan manajemen lahan, yang memungkinkan waktu panen lebih cepat.

Upaya ini sekaligus mendukung prinsip pemberdayaan petambak sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong percepatan investasi sektor pergaraman melalui kemudahan perizinan, insentif, dan pembukaan kemitraan strategis antara pelaku usaha besar dan koperasi garam rakyat. Arah kebijakan ini bertujuan membangun rantai pasok garam nasional yang efisien dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

b. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Sejalan dengan upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir, KKP terus mendorong peningkatan kualitas hidup nelayan. Permukiman nelayan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, sarana produksi

yang belum memadai, serta lemahnya kapasitas usaha masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya produktivitas dan pendapatan nelayan, sehingga kemiskinan masih menjadi permasalahan yang menonjol di banyak kawasan pesisir.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, KKP melaksanakan program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai model pengembangan permukiman nelayan yang terpadu. Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas penangkapan dan pascapanen, perbaikan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, serta penguatan kelembagaan dan akses usaha bagi nelayan.

Pada tahun 2026, KKP berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan KNMP di lokasi-lokasi prioritas yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan secara nyata dan terukur melalui:

- 1) peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap dengan memperkuat fasilitas produksi dan pemasaran hasil tangkapan untuk meningkatkan pendapatan nelayan;
- 2) penguatan ekonomi dan kelembagaan nelayan dengan meningkatkan kapasitas usaha, akses permodalan, dan daya saing melalui pemberdayaan koperasi/kelembagaan nelayan; dan
- 3) dampak langsung pengurangan kemiskinan dengan memperbaiki kualitas hidup yang berkontribusi pada penurunan persentase kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem nelayan.

c. Pengembangan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS), *Modelling* Budi Daya Rumput Laut, dan Komoditas Unggulan Tematik Lainnya.

Pengembangan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS), *Modeling* budi daya rumput laut, dan komoditas unggulan tematik lainnya merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) dalam menindaklanjuti arahan kebijakan nasional, khususnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Program prioritas tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional, mendorong pemerataan ekonomi di kawasan pesisir, serta mempercepat terwujudnya ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian implementasi dari program tersebut, ditetapkan 2 (dua) tahapan pencapaian strategis yaitu pencapaian operasional kegiatan pada tahun 2026 dan transformasi sistem tata kelola mulai 2027 sampai dengan 2029. Pada tahun 2025-2026, fokus utama adalah membangun

pondasi teknis, administratif, dan sosial yang kokoh di bidang budi daya rumput laut, Direktorat Rumput Laut menargetkan pembentukan satu klaster potensial berbasis kawasan, yang dilengkapi sarana budidaya modern dan pusat perbanyakan bibit unggul melalui teknologi kultur jaringan, sebuah respons langsung terhadap kendala krusial berupa keterbatasan ketersediaan benih bermutu yang selama ini menghambat peningkatan produktivitas. Klaster ini tidak hanya menjadi model teknis, tetapi juga wahana pendampingan, edukasi pengelolaan usaha, dan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi kelompok pembudi daya setempat. Di sisi lain, BINS di Karawang akan beroperasi sebagai unit produksi sekaligus pusat transfer teknologi.

d. Revitalisasi Peralatan Laboratorium Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan jaminan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan, penting bagi KKP untuk memperbarui dan meningkatkan fasilitas laboratorium. Saat ini, terdapat 47 (empat puluh tujuh) laboratorium yang telah menggunakan peralatan yang tidak memadai dan mengalami kerusakan selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pengujian yang akurat dan efisien, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas produk serta kepercayaan konsumen.

Pada tahun 2026, KKP dalam hal ini Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berkomitmen untuk melakukan revitalisasi peralatan laboratorium guna menjamin kualitas dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan. Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas laboratorium dalam melakukan pengujian dan analisis, sehingga mampu memenuhi standar nasional dan internasional. Dengan peralatan yang terkini, laboratorium dapat menyediakan hasil pengujian yang lebih cepat, akurat, dan terpercaya. Capaian yang diharapkan meliputi:

- 1) peningkatan kapasitas pengujian
setiap laboratorium akan mampu meningkatkan jumlah pengujian yang dilakukan dalam satu bulan.
- 2) pengurangan waktu pengujian
revitalisasi diharapkan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan laporan pengujian produk.
- 3) standarisasi sistem pengujian
laboratorium akan menerapkan standar pengujian yang konsisten, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) peningkatan kepercayaan pengguna jasa
hasil pengujian yang akurat dan tepat waktu, seperti yang diharapkan pengguna jasa.

2. Proyek Strategis Nasional (PSN):

- a. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan;

- b. Modernisasi Kapal Perikanan;
 - c. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura;
 - d. Pengembangan Budi Daya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) di Kabupaten Sumba Timur; dan
 - e. Pembangunan K-SIGN.
3. Proyek yang Dibiayai Dengan Menggunakan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri:
- a. Pinjaman Luar Negeri
 - 1) *Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port)-Agence Française de Développement (AFD)*;
 - 2) *Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase I-Islamic Development Bank (IsDB)*;
 - 3) *Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I-Japan International Cooperation Agency (JICA)*;
 - 4) *Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase II (Project Readiness Financing)-Asian Development Bank (ADB)*;
 - 5) *Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)-Asian Development Bank (ADB)*;
 - 6) *Ocean for Prosperity-Infrastructure for Coral Reef Areas-World Bank*; dan
 - 7) *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System-Spanyol*.
 - b. Hibah Luar Negeri
 - 1) *The Evidence Based and Sustainable Ocean Management in Indonesia Project In Support to Outer Ring Fishing Ports Development-AFD*; dan
 - 2) *Toward Sustainable and Conversion Free Aquaculture in South East Asia (TOSCA)-ADB*.
4. Proyek yang Dibiayai Dengan Menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):
- a. pembangunan laboratorium acuan (*reference*) di Cilangkap, Jakarta Timur dan pembangunan laboratorium rujukan wilayah timur di Makassar;
 - b. penyediaan *fishing and navigation simulator* (tahap II) untuk menyediakan pendidikan kelautan dan perikanan yang berkualitas di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang;
 - c. penyediaan *fishing and navigation simulator* untuk meningkatkan efisiensi pelatihan awak kapal perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dan BPPP Bitung;
 - d. penyediaan *fishing and navigation simulator* dan *engine simulator* untuk meningkatkan kualitas awak kapal perikanan Indonesia di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Selain itu, untuk memetakan, mengukur, dan memantau kegiatan prioritas lintas sektor terdapat penandaan anggaran (*tagging*) tematik diantaranya (1) pendidikan; (2) infrastruktur; (3) responsif gender; (4) upaya konvergensi penanganan stunting; (5) mitigasi perubahan iklim; (6) adaptasi perubahan iklim; (7) upaya konvergensi penanganan stunting; dan (8) kerjasama selatan-selatan dan triangular.

B. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Strategis Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target 2026
1	SS 1. Terlindunginya laut dan sumber dayanya serta menjaga kelestarian wilayah laut	1	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (juta ha)	30,7
		2	Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut (%)	7
2	SS 2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil	3	PDB perikanan (triliun Rupiah)	626,04
		4	Volume produksi perikanan (juta ton)	25,84
		5	Volume produksi garam (juta ton)	2,5
		6	Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0 - 1) (indeks)	0,5
		7	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir (%)	22,45
		8	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)	83
		9	Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudi daya Ikan dan petambak garam yang terfasilitasi (lembaga)	16
3	SS 3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional	10	Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	6,7
		11	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,85
		12	Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	72
4	SS 4. Meningkatnya kualitas SDM kelautan dan perikanan	13	Indeks kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan (indeks)	72
5	SS 5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas	14	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	90,1

C. Program Tahun 2026

Program Tahun 2026 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun-tahun sebelumnya sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program priority*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan *output* kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

Nomenklatur program KKP tahun 2026 beserta sasaran program, indikator sasaran program, target, dan satuan sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Program Tahun 2026

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten dan/atau Tersertifikasi yang Tersempai di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	76	%
		02-Persentase Peningkatan Omzet pada Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya	52	%
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	01-Meningkatnya nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang Berdaya Saing	01-Nilai ekspor rumput laut	647	USD Juta
		02-Nilai ekspor produk perikanan lainnya	6,05	USD Miliar
		03-Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri	320,8	Rp Triliun
		04-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas	5,5	%
	02-Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	01-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	72	%
		02-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	72	%
		03-Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	42	Negara

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah RI	71	%
		05-Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	72	%
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	01-Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	01-Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif dikelola	19,1	Juta Ha
	02-Meningkatnya pengelolaan biota perairan terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i>	01-Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i> yang dikelola (kumulatif)	445	Spesies
	03-Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang Bersih	01-Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)	7	Lokasi
	04-Meningkatnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	01-Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (kumulatif)	3	Lokasi
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	01-Kesejahteraan nelayan meningkat	01-Nilai tukar nelayan	106-108	Indeks
	02-Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	01-Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	81	Indeks
	03-Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	01-Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	81	Indeks
		02-Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	91	Nilai

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		03-Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	>1	%
	04-Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	76	Indeks
	05-Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	93	Indeks
		02-Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	81	Indeks
	06-Tata kelola sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	01-Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman	≤80	%
	07-Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan	01-Volume produksi Ikan	7,15	Juta Ton
		02-Volume produksi rumput laut	12,22	Juta Ton
		03-Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)	103,50	Nilai
	08-Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	01-Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan Pemerintah Pusat (%)	16,98	%
		02-Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan Pemerintah Daerah (%)	36,59	%
		03-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	500.050.000	Rp.000

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Indeks kepatuhan pengendalian pemanfaatan ruang laut	7,5	Indeks
		05-Nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang Laut	60	Nilai
	09- Meningkatnya produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan	01-Volume produksi perikanan tangkap	6,47	Juta Ton
	10-Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil	01-Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang dikelola (kumulatif)	2	Kawasan
	11-Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	01-Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	102,25	Indeks
	12-Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	01-Produktivitas lahan garam rakyat	85	Ton/Ha
	13-Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	01-Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017)	35	%
	14-Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	01-Nilai Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	550	Rp. Miliar
	15-Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi nelayan	01-Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan	10	Lembaga
	16-Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam	01-Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya	3	Unit
	06-Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudidaya	01-Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya	3	Unit
	01-Tata kelola pemerintahan	01-Nilai RB General KKP	84,85	Nilai

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
WA-Program Dukungan Manajemen	yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	02-Indeks profesionalitas ASN lingkup KKP	82,5	Indeks
		03-Nilai keterbukaan informasi publik KKP	97,25	Nilai
		04-Nilai kinerja perencanaan anggaran KKP	82,75	Nilai
		05-Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	78	Nilai
		06-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal	≤0,5	%
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal	86	%
		08- Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal	77	Nilai
	02-PNBP BLU sektor KP meningkat	01-Persentase pencapaian target PNBP layanan BLU LPMUKP	97,2	%
		02-Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP	91	%
	03-Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja KKP	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan KKP	≤0,5	%
		02-Persentase implementasi reformasi birokrasi lingkup KKP	86,5	%
		03-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	86	%

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja pengawasan inspektorat jenderal	4,1	Indeks
	04-Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal	01-Nilai kapabilitas pengawasan inspektorat jenderal	3,61	Nilai
		02-Persentase implementasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup inspektorat jenderal	82	%
		03-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	86,5	Nilai
	05-Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen Pengelolaan Kelautan	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK)	86,5	Nilai
	06-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB)	86,5	Nilai
	07-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)	86,5	Nilai
	08-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)	86,5	Nilai
	09-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel pengelolaan perikanan tangkap	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT)	86,5	Nilai

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	10-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	02-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)	86,5	Nilai
	11-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)	86,5	Nilai
	12-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (DJPRL)	86,5	Nilai

D. Kegiatan Tahun 2026

Kegiatan pada tahun 2026 sebanyak 52 (lima puluh dua) kegiatan. Nomenklatur kegiatan KKP pada tahun 2026 beserta sasaran, indikator, target, dan satuannya adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Tabel 3 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2375- Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya pelatihan kelautan dan perikanan yang kompeten	01-Persentase lulusan pelatihan kelautan dan perikanan kompeten yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	76	%
2376- Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	01-Persentase lulusan pendidikan kelautan dan perikanan kompeten yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	86	%
7020- Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Persentase kelompok pelaku usaha/pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang	13	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		ditingkatkan kelasnya		
7948- Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya penguatan standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Persentase sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang tersertifikasi kompetensi	80	%

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Tabel 4 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2357- Pemasaran, Akses, dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	01- Meningkatnya pangsa pasar produk olahan rumput laut	01-Proporsi ekspor produk olahan rumput laut	49,9	%
	02- Meningkatnya akses dan promosi kelautan dan perikanan di luar negeri	01-Pertumbuhan ekspor produk perikanan	6,64	%
	03- Meningkatnya kontribusi protein ikan dalam pemenuhan protein hewani	01-Kontribusi protein ikan terhadap sumber protein hewani	53,15	%
	04- Terkendalinya neraca perdagangan hasil perikanan	01-Proporsi nilai impor terhadap ekspor hasil perikanan	<20	%
	05-Tersedianya rekomendasi kebijakan pengembangan sektor kelautan dan perikanan berdasar preferensi konsumen	01-Persentase provinsi yang terpetakan preferensi konsumennya	100	%
2358- Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	01- Meningkatnya utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan	01-Persentase utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan	68,9	%
	02- Meningkatnya	01-Volume produksi olahan perikanan	3,83	Juta Ton

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	produksi olahan kelautan dan perikanan			
3989- Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	01-Persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit pengolahan ikan skala UMKM dan menengah besar	70	%
		02-Jumlah sertifikat <i>hazard analysis critical control point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.100	Sertifikat
		04-Harmonisasi sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	42	Negara
		05-Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	71	%
		06-Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	70	%
		07-Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	75	%
		08-Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	75	%
		09-Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	72	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
5279- Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	01- Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang memenuhi standar pengujian	01-Persentase produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian	75	%
7010- Manajemen Mutu	01- Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	01-Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70	%
		02-Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	%
		03-Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75	Nilai
		04-Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	75	Nilai
		05-Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	4	Nilai
		06-Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	8	Dokumen
7025- Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	01- Meningkatnya ketertelusuran dan logistik ikan	01-Persentase peningkatan pelaku usaha yang menerapkan sistem ketertelusuran produk perikanan	29,4	%
	02- Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana logistik	02-Persentase pemanfaatan prasarana sarana logistik	82	%
7026- Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil	01- Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	01-Nilai investasi kelautan dan perikanan	14,47	Rp Triliun

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
Kelautan dan Perikanan	02-Meningkatnya UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas	01-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya	5,5	%

3. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 5 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2362- Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya penambahan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01-Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru	700.000	Ha
	02-Terwujudnya tata kelola kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01-Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	52	Nilai
		02-Lokasi karbon biru yang dikelola berbasis kinerja	1	Lokasi
		03-Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan	600.000	Ha
	03-Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	01-Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	90	Nilai
	04-Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	01-Nilai efektifitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES	68,95	Nilai
		02-Biota perairan yang dilakukan upaya perlindungan	25	Jenis
		03-Biota perairan yang dilakukan upaya pelestarian (kumulatif)	4	Jenis
		04-Biota perairan yang difasilitasi pemanfaatan secara berkelanjutan (kumulatif)	445	Spesies
	05-Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	01-Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan	80	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		berkelanjutan biota perairan		
4346- Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	01-Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (Kumulatif)	296	Ton
	02-Meningkatnya ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	01-Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	57	Nilai
		02-Kawasan pesisir dan pulau - pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim	2	Kawasan
	03-Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	01-Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	57	Nilai
		02-Kawasan ekosistem mangrove yang direhabilitasi	1	Kawasan

4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Tabel 6 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2337- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	01-Pengelolaan awak kapal Perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan	01-Persentase pemenuhan dokumen awak kapal perikanan	15	%
		02-Petugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi	130	Orang
		03-Rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diterbitkan	3	Dokumen
		04-Persentase permohonan persetujuan pengadaan kapal perikanan	100	%
		05-Persentase mesin kapal bantuan yang	93	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		dimanfaatkan oleh masyarakat		
		06-Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi	30	Orang
		07-Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	20.000	Unit
		08-Standar permesinan kapal perikanan yang diterbitkan	1	Dokumen
		09-Persentase awak kapal perikanan yang terlindungi	11	%
		10-Kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan	1.400	Kapal
		11-Kapal perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	1.700	Unit
2338- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	01-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang optimal dan bertanggung jawab	01-Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme <i>Port State Measures Agreement</i> (PSMA)	79	%
		02-Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	80	%
		03-Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan	50	%
		04-Persentase pelaksanaan	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan <i>Fish Market</i> bertaraf internasional		
		05-Persentase pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Pelabuhan Perikanan yang menerapkan konsep <i>Eco Fishing Port</i>	100	%
		06-Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan berwawasan lingkungan	4	Dokumen
		07-Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum	30	%
		08-Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	80	%
		09-Persentase lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Perikanan	39	%
		10-Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	43	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		11-Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya	7,1	%
		12-Persentase operasional pembangunan SKPT	96	%
		13-Tingkat Penerapan PIT dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan	91	Nilai
		14-Persentase Pelabuhan Perikanan dengan tingkat kinerja baik	17	%
		15-Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi	110	Pelabuhan
2339- Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan	01-Pengelolaan perizinan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan	01-Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	13.000	Alokasi Kapal
		02-Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	10.000	Dokumen
		03-Persentase rekomendasi hasil analisis	92	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti		
		04-Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3,3	Skala/Nilai
		05-Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	92	%
		06-Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	97	%
		07-Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	%
2341- Pengelolaan Sumber Daya Ikan	01-Pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan	01-Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		02-Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan	75	%
		03-Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	86,5	Nilai
		04-Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	100	%
		05-Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan	100	%
		06-Persentase posisi/rekomendasi/ prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional	100	%
		07-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	81	%
		08-Persentase <i>harvest strategy</i> di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun	77	%
		09-Persentase pelaksanaan	82	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan		
		10-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas	84	%
		11-Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat	100	%
		12-Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun	100	%
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	01-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang operasi armada dan peningkatan prasarana dan sarana PSDKP	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada serta pengembangan prasarana dan sarana PSDKP	100	%
	02-Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif	01-Indeks operasi pesawat patroli	95,25	Indeks
		02-Indeks operasi kapal pengawas	92,25	Indeks
		03-Indeks operasi speedboat pengawas	92,25	Indeks
		04-Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan	100	Indeks

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		05-Indeks kesiapan Awak Kapal Pengawas	80	Indeks
		06-Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan	77,5	%
		07-Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	100	Indeks
		08-Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi perawatannya	83	%
	03-Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan	01-Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80	Indeks
		02-Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	60	%
		03-Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	60	%
		04-Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	40	Nilai
		05-Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	40	Nilai
		06-Nilai kualitas rancangan	100	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP		
		07-Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	100	Nilai
2351- Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	01-Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82	Indeks
		02-Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82	Indeks
		03-Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82	Indeks
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	82	Indeks
	02- Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	01-Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	81	%
	03- Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	01-Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	82	Indeks
		02-Indeks kualitas supervisi	76	Indeks

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan		
		03-Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	72	Indeks
		04-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan	100	%
		05-Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dipantau	100	%
		06-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan penegakkan hukum kelautan dan perikanan	76	Nilai
		07-Persentase permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	70	%
	04-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	100	%
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	01-Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83	Nilai
		02-Nilai kualitas supervisi	86	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		pengawasan sumber daya kelautan		
		03-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan	81	Nilai
	02-Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	01-Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPPNRI	100	%
		02-Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan	83	Indeks
	03-Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	01-Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	Nilai
		02-Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	76	Nilai
		03-Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	Nilai
		04-Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	76	Nilai
	04-Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	01-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	81	Nilai
		02-Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	Nilai
		03-Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	86	Nilai
	06-Terselenggaranya	01-Persentase penyelesaian	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	penyusunan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		
2353- Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan secara efektif	01-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan	81	Nilai
		02-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat perikanan	81	Nilai
	02- Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	01-Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83	Indeks
		02-Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	83	Indeks
		03-Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	100	%
	03- Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif	01-Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	%
		02-Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	86	%
2363- Pengelolaan	01-Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan	01-Korporasi petambak garam yang	3	Lembaga

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
Sumber Daya Kelautan	ekonomi petambak garam	dikembangkan (kumulatif)		
	02-Meningkatnya kompetensi petambak garam	01-Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya	100	Orang
	03-Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi	01-Luas lahan garam yang direvitalisasi	1.500	Ha
	04-Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam	01-Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kumulatif)	1	Kawasan
	05-Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan	01-Volume pengelolaan hasil sedimentasi	500	Juta m ³
		02-Kawasan BMKT yang dikelola	1	Kawasan
		03-Unit bisnias biofarmakologi yang dikembangkan	1	Unit Bisnis
	06-Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan	01-Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan	100	%
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	01-Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi	1	Lokasi
		02-Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya	1	Lokasi
	02-Meningkatnya ekonomi masyarakat di wilayah pesisir, adat dan lokal	01-Kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya	2	Komunitas

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	03-Meningkatnya penertiban perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	01-Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan	5	Dokumen
7021- Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	01-Terkelolanya sistem budi daya rumput laut	01-Jumlah sarana/kawasan budi daya rumput laut yang dikembangkan dan disalurkan ke masyarakat	200	Unit
		02-Jumlah kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi	1	Unit
		03-Jumlah bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	62.231	Unit
		04-Jumlah unit budi daya rumput laut yang dibina penerapan sertifikasinya	20	Unit
		05-Jumlah kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut yang disusun	3	Rekomend asi Kebijakan
		06-Jumlah Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut " <i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> "	1	Unit
7022- Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	01-Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air payau	01-Jumlah bantuan calon induk unggul dan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat	110.611.709	Ekor
		02-Jumlah calon induk unggul/benih	88.818.870	Unit

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		ikan/udang dan atau ikan konsumsi air payau yang diproduksi UPT		
		03-Jumlah pakan ikan air payau yang diproduksi untuk operasional UPT	106.102	Unit
		04-Jumlah sampel ikan air payau/pakan ikan/obat ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	9.421	Sampel
		05-Jumlah kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air payau yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan
		06-Jumlah sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan, <i>surveillance</i> AMU/AMR ikan air payau yang diuji	1.270	Sampel
		07-Jumlah infrastruktur budi daya udang yang dibangun	7	Unit
		08-Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	380	Unit
		09- Jumlah Budi Daya Udang Terintegrasi-ISF yang dibangun	1	Unit

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		10-Jumlah Klaster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun	1	Unit
		11-Jumlah Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun	4	Unit
7023- Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	01-Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	01-Jumlah produksi calon induk unggul/ benih ikan/benih kepiting/ikan konsumsi air laut di UPT	1.151.752	Unit
		02-Jumlah benih ikan laut dan kepiting yang disalurkan ke masyarakat	5.009.127	Ekor
		03-Jumlah sampel ikan air laut dan nutrisi pakan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1.842	Sampel
		04-Jumlah kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan
		05-Jumlah sampel monitoring penyakit ikan air laut dan <i>surveillance</i> AMU/AMR yang diuji	556	Sampel
		06-Jumlah kawasan budi daya ikan air laut/kepiting yang dibangun atau direvitalisasi	1	Unit

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		07-Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	200	Unit
7024- Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	01-Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar	01-Jumlah produksi calon induk unggul/ benih ikan/ikan konsumsi air tawar di UPT	3.254.925	Unit
		02-Jumlah calon induk unggul/benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat	69.730.072	Ekor
		03-Jumlah sampel ikan air tawar, pakan dan obat ikan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	2.342	Sampel
		04-Jumlah perikanan budi daya yang berkelanjutan dan bebas konversi	1	Unit
		05-Jumlah kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air tawar yang disusun	3	Rekomend asi Kebijakan
		06-Jumlah peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	15	Unit
		07-Jumlah sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan dan <i>surveillance</i>	1.379	Sampel

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		AMU/AMR yang diuji		
		08-Jumlah prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar yang dibangun atau direhabilitasi	1	Unit
		09-Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	380	Unit
		10-Jumlah pakan ikan air tawar yang diproduksi untuk operasional UPT	107.122	Unit
7940- Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	01-Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing	01-Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya	50	%
		02-Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan	5.000	Orang
		03-Persentase nelayan yang terlindungi	100	%
		04-Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya	250	Lokasi
		05-05-Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	100	%
	02-Pemberdayaan kelembagaan ekonomi nelayan melalui fasilitas	01-Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan	10	Lembaga

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	penguatan usaha			
7941- Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	01-Terkelolanya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya	01-Jumlah peralatan/sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat	502	Unit
		02-Jumlah pengelolaan saluran irigasi perikanan yang disalurkan ke masyarakat	30	Unit
		03-Jumlah prasarana produksi perikanan budi daya di UPT yang dibangun atau direhabilitasi	1	Unit
		04-Jumlah unit produsen pakan dan obat yang dibina	20	Lembaga
		06-Jumlah kebijakan tata kelola bidang prasarana dan sarana budi daya yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan
	02-Peningkatan Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)	01-Jumlah rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi	1.000	Orang
		02-Jumlah pembudi daya skala kecil yang terlindungi usahanya	375	Orang
	03-Pemberdayaan kelembagaan ekonomi pembudi daya melalui fasilitasi penguatan usaha	01-Jumlah Korporasi Pembudi daya ikan yang dikembangkan	3	Kelompok Masyarakat
7942- Pengelolaan Jasa Bahari	01-Meningkatnya pemanfaatan jasa bahari berkelanjutan	01-Lokasi pemanfaatan bangunan dan instalasi laut	1	Lokasi

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		yang sudah tidak beroperasi		
		02-Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (kumulatif)	1	Lokasi
		03-Kawasan wisata bahari yang dikelola	1	Kawasan
	02-Meningkatnya potensi karbon biru yang diperdagangkan	01-Persentase karbon biru yang Teregister dalam sistem registri nasional	100	%
	03-Meningkatnya perizinan berusaha jasa bahari	01-Persentase penyelesaian perizinan berusaha jasa bahari	100	%
7943-Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	01-Tersusunnya perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir	01-Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun	1	Dokumen
		02-Perairan laut antar wilayah yang Memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	2	Kawasan
		03-Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	4	kawasan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	2	kawasan
	02-Terselenggaranya pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	01-Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	7	Provinsi
		02-Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci	4	Kawasan
7944- Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	01-Terselenggaranya pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut	01-Persentase penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut	100	%
		02-Persentase pemutakhiran data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut	100	%
		03-Persentase tata kelola layanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut	100	%
7945- Pembinaan Penataan Ruang Laut	01-Terwujudnya sinkronisasi dan pembinaan perencanaan ruang laut	01-Persentase sinkronisasi perencanaan ruang laut (kumulatif)	21,43	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		02-Persentase digitalisasi penataan ruang laut	40	%
		03-Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya	100	Orang
7946- Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01- Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01-Persentase penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut	100	%
		02-Persentase KKPRL yang dipantau dan dievaluasi	60	%
		03-Persentase penilaian laporan tahunan KKPRL	100	%
		04-Rencana tata ruang laut/rencana zonasi yang dinilai perwujudannya	12	Lokasi
		05-Lokasi pemanfaatan ruang laut yang belum memiliki izin dan berpotensi menjadi sumber PNBP	17	Lokasi
		06-Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif	60	%

5. Program Dukungan Manajemen

Tabel 7 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2322-Legislati, Litigasi, dan Kerja Sama	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan	01-Indeks reformasi hukum KKP	87	Indeks

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	akuntabel di bidang penyiapan produk hukum KKP	02-Indeks kualitas kebijakan KKP	85	Indeks
		03-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	%
		04- Persentase Permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangani	100	%
		05- Persentase Permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/ nonlitigasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangani	100	%
		06-Persentase perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap untuk ditandatangani	100	%
		07-Persentase instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum	100	%
		08-Nilai kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian	92,5	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Kelautan dan Perikanan		
	02-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerjasama antarlembaga	01-Persentase kontribusi kerja sama bidang KP terhadap program prioritas	87.25	%
	03-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	01-Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95	%
		02-Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	89	%
		03-Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	94	%
		04-Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100	%
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan SDM aparatur dan organisasi	01-Nilai implementasi RB Setjen	86,5	Nilai
		02-Indeks sistem merit KKP	395	Indeks
		03-Indeks profesionalitas ASN Setjen	82,5	Indeks
		04-Indeks implementasi norma, standar, prosedur dan	86	Indeks

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		kriteria (NSPK) manajemen ASN		
		05-Indeks pembinaan JF KKP	73	Indeks
		06-Nilai kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi KKP	81	Nilai
		07-Persentase penyederhanaan struktur organisasi KKP	100	%
		08-Penetapan penghargaan ASN bidang kelautan dan perikanan tingkat nasional	5	Nilai
		09-Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi KKP	5	Nilai
		10-Indeks BerAKHLAK KKP	75	Indeks
		11-Persentase rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) daerah	83	%
		12-Indeks Kepuasan Pelayanan SDMA dan Organisasi	3	Indeks
		13-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Serta Standar Operasional Prosedur Lingkup Setjen	85	%
2325- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dibidang pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi	01-Nilai SAKIP KKP	85,05	Nilai
		02-Persentase proyek PHLN KKP yang berstatus <i>at risk</i>	<58	%
		03-Persentase dokumen pendanaan luar	95,5	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		negeri KKP yang teregister		
		04-Capaian IKU KKP	76	Nilai
		05-Capaian prioritas nasional KKP	92	Nilai
		06-Nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas SPIP KKP	1,8	Nilai
		07-Persentase pelaksanaan kegiatan lintas sektor	84	%
		08-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP	92,3	Indeks
		09-Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal	87,2	Nilai
		10-Persentase peningkatan anggaran melalui pendanaan kolaboratif dan inovatif dalam rangka mendukung ekonomi biru	12	%
	02-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan, dan BMN	01-Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	Opini
		02-Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Level
		03-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	92	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,36	Indeks
		05-Indeks pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,05	Indeks
		06-Persentase Pengelolaan PNBP sektor kelautan dan perikanan	100	%
		07-Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Setjen	≤0,5	%
		08-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	86	%
		09-Nilai kinerja perencanaan anggaran Sekretariat Jenderal	81,75	Nilai
		10-Persentase implementasi standar biaya keluaran KKP	100	%
2328- Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, Umum, serta Pengadaan Barang dan Jasa	01-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik	01-Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	97,5	Indeks
		02-Nilai penilaian mandiri keterbukaan informasi publik KKP	97,25	Nilai
		03-Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada	95	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan		
		04-Nilai kepuasan terhadap layanan perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	91	Nilai
	02-Tata kelola pemerintah yang baik di bidang pengelolaan administrasi, dan ketatausahaan pimpinan	01-Tingkat digitalisasi arsip KKP	87	Nilai
		02-Nilai survei kepuasan masyarakat atas layanan protokoler dan ketatausahaan pimpinan	85,5	Nilai
		03-Nilai survei kepuasan masyarakat atas layanan kerumahtanggaan kantor pusat	85,5	Nilai
		04-Nilai pengawasan kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	81	Nilai
		05-Persentase pelaksanaan manajemen hemat energi KKP	76	%
	03-Tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan administrasi dan pengadaan barang/jasa	01-Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa KKP	85,5	Indeks
		02-Persentase rencana umum pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP	82	%
		03-Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	04-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup level II Setjen	04-Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP	5	Nilai
		01-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Biro Umum	71,75	Nilai
		02-Nilai PM SAKIP Level II Setjen	87,2	Nilai
		03-Indeks Profesionalitas ASN Level II Setjen	82,5	Indeks
		04-Persentase penyelesaian temuan BPK Level II Setjen	100	%
		05-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II Setjen	86	%
		06-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri level II Setjen	100	%
		07-Persentase penyerapan anggaran level II Setjen	95	%
		08-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum	92,10	Nilai
		09-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP	92,10	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		10-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPISDKP	71,75	Nilai
		11-Persentase pelaksanaan rencana kerja zona integritas lingkup Biro Perencanaan	85	%
		12-Persentase pelaksanaan rencana kerja zona integritas lingkup Biro Hukum	80	%
		13-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	71,75	Nilai
		14-Persentase penyerapan anggaran BLU LPMUKP	90	%
		15-Nilai kepuasan pelanggan pelayanan publik BPISDKP	90,5	Nilai
2329- Pengelolaan Data dan Informasi	01-Tata kelola pemerintahan Yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan data dan informasi kelautan dan perikanan	01-Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan	92	%
		02-Indeks layanan aplikasi sistem informasi	3,6	Indeks
		03-Persentase layanan sistem informasi pusat kontrol maritim	78	%
		04-Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,3	Indeks
		05-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	78	Nilai
		06-Persentase pemenuhan data	92	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		citra satelit untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan		
		07-Persentase pemenuhan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan	100	%
		08-Tingkat kematangan keamanan siber KKP	2,1	Indeks
		09-Tingkat maturitas satu data kelautan dan perikanan	70	%
		10-Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP	3	Nilai
		11-Tingkat Kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP	2,75	Nilai
		12-Indeks pelayanan publik KKP	4,65	Indeks
		13-Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP	88,9	Nilai
		14-Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	89,7	Nilai
2335- Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	01-Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja mitra	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan mitra Inspektorat	≤0,5	%
		02-Persentase implementasi reformasi birokrasi lingkup mitra Inspektorat	86,5	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		03-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat	86	%
		04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengawasan kepada mitra Itjen KKP	18	Rekomendasi
		05-Nilai penilaian mandiri pembangunan integritas lingkup KKP	77	Nilai
		06-Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat lingkup KKP	100	%
	02-Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal	01-Nilai hasil telaah sejawat Inspektorat lingkup Inspektorat Jenderal	85,5	Nilai
		02-Persentase implementasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	82	%
		03-Tingkat kepatuhan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal	100	%
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	01-Manajemen kinerja Inspektorat Jenderal yang akuntabel	01- Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Inspektorat Jenderal	≤0,5	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		02-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal	86	%
		03-Indeks kepuasan mitra terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal	4,06	Indeks
		04- Penilaian mandiri SAKIP Inspektorat Jenderal	88,2	Nilai
		05- Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	88,5	Indeks
		06-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal	3,6	Nilai
		07- Persentase pemenuhan dukungan layanan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	100	%
		08- Persentase fasilitasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	82	%
		09-Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP Inspektorat Jenderal	77	%
		10-Nilai Penilaian mandiri pembangunan integritas	77	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		lingkup Inspektorat Jenderal		
		11-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal	92,10	Nilai
		12- Nilai kinerja perencanaan anggaran Inspektorat Jenderal	81,75	Nilai
		13- Persentase penyelesaian rancangan regulasi lingkup Inspektorat Jenderal	100	%
		14- Nilai pengawasan kearsipan internal Inspektorat Jenderal	81	Nilai
2342-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	01-Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	81,75	Nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	84,5	Indeks
		03-Penilaian mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	88,2	Nilai
		04-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap	82	%
		05-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	3,6	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		06-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Ditjen Perikanan Tangkap	77	%
		07-Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	82	%
		08-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Perikanan Tangkap	90	%
		09-Persentase Pelaksanaan Kerja sama bidang Perikanan Tangkap	83	%
		10-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	86	%
		11-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	≤ 0,5	%
		12-Nilai survei Kepuasan masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap	88,8	Nilai
		13-Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	100	%
		14-Persentase penyelesaian program penyusunan	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang perikanan tangkap		
		15-Persentase penyelesaian masalah hukum	100	Nilai
		16-Nilai proposal inovasi pelayanan publik Ditjen Perikanan Tangkap	78	Nilai
		17-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	81	Nilai
		18-Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92,10	Nilai
		19-Nilai keterbukaan informasi publik Ditjen Perikanan Tangkap	92	Nilai
		20-Nilai pembangunan integritas Ditjen Perikanan Tangkap	81	Nilai
		21-Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap	66	%
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	86	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan	≤0,5	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya		
		03-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	82	%
		04-Nilai pembangunan integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	77	Nilai
		05-Penilaian mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya	84,2	Nilai
		06-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	92,1	Nilai
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	81,75	Nilai
		08-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	3,6	Nilai
		09-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	81,5	Indeks
		10-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Perikanan Budi Daya	92	%
		11-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Menteri dan Keputusan Menteri di bidang perikanan budi daya		
		12-Nilai pengawasan kearsipan Ditjen Perikanan Budi Daya	81	Nilai
		13-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	77	%
		14-Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	66	%
		15-Nilai proposal inovasi pelayanan publik Ditjen Perikanan Budi Daya	78	Nilai
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1.	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	86	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	≤0,5	%
		03-Penilaian mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88,2	Nilai
		04-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	92,1	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		05-Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP	81,75	Nilai
		06-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,6	Nilai
		07-Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81,5	Indeks
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	%
		09-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen PSDKP	81	Nilai
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Ditjen PSDKP	77	%
		11-Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	%
		12-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya	86	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		telah dilengkapi dan disampaikan		
		13-Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,8	Nilai
		14-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	Indeks
		15-Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	78	Nilai
		16-Nilai implementasi program budaya kerja	71	Nilai
		17-Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	61	Nilai
		18-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77	Nilai
		19-Indeks pelayanan publik Ditjen PSDKP	3,7	Indeks
		20-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen PSDKP	66	%
		21-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		22-Persentase implelementasi kerja sama	80	%
		23-Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	Indeks
		23-Nilai pembangunan integritas	77	Nilai
		24-persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan SDKP	85	%
		25-Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	%
2361-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	86	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	≤0,5	%
		03-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategi s lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	82	%
		04-Nilai pembangunan integritas	77	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP		
		05-Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	86,2	Nilai
		06-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	92,1	Nilai
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	81,75	Nilai
		08-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	3,6	Nilai
		09-Indeks profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	81,5	Indeks
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	100	%
		11-Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup	81	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Direktorat Jenderal PDSPKP		
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	77	%
		13-Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 serta SOP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	85	%
		14-Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	78	Nilai
		15-Tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	97	%
		16-pemenuhan layanan perkantoran lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	12	Layanan
		17-Persentase penyelesaian permasalahan hukum lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	100	%
		18-Persentase dokumen kerja sama yang disusun/ditinda klanjuti oleh Direktorat Jenderal PDSPKP	80	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		19-Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	≤5	%
		20-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	80	%
2367-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	01-Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan	81	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Ditjen Pengelolaan Kelautan	≤0,5	%
		03-Nilai pembangunan integritas DJPK	77	Nilai
		04-Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	82	%
		05-Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK	72	Nilai
		06-Indikator Kinerja Pelaksanaan	89,5	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Anggaran (IKPA) Ditjen Pengelolaan Kelautan		
		07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK	81,75	Nilai
		08-Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK	3,6	Nilai
		09-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK	66	%
		10-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	81	Indeks
		11-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Pengelolaan Kelautan	91	%
		12-Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK	78	Nilai
		13-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di bidang pengelolaan kelautan	100	%
		14-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Pengelolaan Kelautan	81	Nilai
		15-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP	77	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Ditjen Pengelolaan Kelautan		
		16-Nilai keterbukaan informasi publik DJPk	92	Nilai
		17-Persentase pelaksanaan kerja sama bidang pengelolaan kelautan	100	%
2378-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	≤0,5	%
		02-Indeks profesionalitas ASN BPPSDMKP	81,5	Indeks
		03-Penilaian mandiri SAKIP BPPSDMKP	88,2	Nilai
		04-Nilai maturitas struktur dan proses SPIP BPPSDMKP	3,6	Nilai
		05-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	86	%
		06-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDMKP	92,1	Nilai
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPSDMKP	81,75	Nilai
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Menteri di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		
		09-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPSDMKP	81	Nilai
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP BPPSDMKP	77	%
		11-Nilai pembangunan integritas BPPSDMKP	77	Nilai
		12-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPSDMKP	85	%
		13-Nilai proposal inovasi pelayanan publik BPPSDMKP	78	Nilai
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP	86	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	≤0,5	%
		03-Persentase unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	5	Unit

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Nilai PM SAKIP BPPMHKP	86,20	Nilai
		05-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP	92,1	Nilai
		06-Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPMHKP	81,75	Nilai
		07-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	3,6	Nilai
		08-Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP	82,5	Indeks
		09-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	100	%
		10-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP	81	Nilai
		11-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP BPPMHKP	77	%
		12-Survei kepuasan masyarakat lingkup BPPMHKP	3,5	Indeks
		13-Nilai proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP	78	Nilai
4345- Pendidikan dan		01- Jumlah aparatur KKP	224	Orang

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	01-Aparatur KKP yang dididik dan dilatih	yang diberikan tugas belajar		
		02-Jumlah aparatur KKP yang diberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur	4.620	Orang
6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Terkelolanya modal usaha kelautan dan perikanan	01-Realisasi PNBP Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	31	Rp. Miliar
		02-Realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	80	Rp. Miliar
		03-Persentase hasil perhitungan capaian rasio dana bergulir diragukan tertagih	100	%
		04-Penyelesaian Modernisasi Badan layanan Umum (BLU)	82	Nilai
		05-Nilai kepuasan pemanfaatan atas layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	87	Nilai
		07-Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan atau pendampingan usaha	82	%
7939-Analisis Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang analisis kebijakan strategis kelautan	01-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan lingkungan berkelanjutan	80	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	dan perikanan	yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan		
		02-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang produksi perikanan dan produk kelautan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	80	%
		03-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang swasembada garam yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	80	%
		04-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang peningkatan konsumsi dan penguatan pasar yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	80	%
		05-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang analisis dan evaluasi kebijakan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	80	%
7947-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	01-Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang	81	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	Ditjen Penataan Ruang Laut	dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL		
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL	≤0,5	%
		03-Nilai pembangunan Integritas DJPRL	76	Nilai
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPRL	70	Nilai
		05-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran DJPRL	89,5	Nilai
		06-Nilai kinerja perencanaan anggaran DJPRL	81,75	Nilai
		07-Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL	3,6	Nilai
		08-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPRL	65	%
		09-Indeks profesionalitas ASN DJPRL	81	Indeks
		10-Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL	91	%
		11-Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPRL	77	Nilai
		12-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di bidang penataan ruang laut	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		13-Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL	75	Nilai
		14-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP DJPRL	77	Persen

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI ESELON I TAHUN 2026

A. ALOKASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA PER UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	JENIS BELANJA (Rp.000)				
		BELANJA OPERASIONAL			BELANJA NON OPERASIONAL	JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPS. PERKANTORAN	SUBJUMLAH		
1	SETJEN	110.390.941	222.388.686	332.779.627	307.781.336	640.560.963
2	ITJEN	41.126.165	2.931.698	44.057.863	54.820.830	98.878.693
3	DITJEN PT	269.909.943	123.599.620	393.509.563	5.863.120.040	6.256.629.603
4	DITJEN PB	234.572.709	100.263.655	334.836.364	821.033.034	1.155.869.398
5	DITJEN PSDKP	247.546.905	49.427.428	296.974.333	750.009.039	1.046.983.372
6	DITJEN PDSPKP	86.378.910	22.145.333	108.524.243	167.500.000	276.024.243
7	DITJEN PK	111.812.806	21.115.650	132.928.456	1.262.500.000	1.395.428.456
8	DITJEN PRL	50.000.000	10.000.000	60.000.000	139.960.342	199.960.342
9	BPPSDMKP	972.938.000	135.588.098	1.108.526.098	290.781.667	1.399.307.765
10	BPPMHKP	206.471.015	68.932.965	275.403.980	254.953.185	530.357.165
JUMLAH		2.331.147.394	756.393.133	3.087.540.527	9.912.459.473	13.000.000.000

B. ALOKASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM PER UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PROGRAM (Rp.000)					
		PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	DUKUNGAN MANAJEMEN	JUMLAH
1	SETJEN	-	-	-	-	640.560.963	640.560.963
2	ITJEN	-	-	-	-	98.878.693	98.878.693
3	DITJEN PT	5.834.085.040	-	-	-	422.544.563	6.256.629.603
4	DITJEN PB	797.966.934	-	-	-	357.902.464	1.155.869.398
5	DITJEN PSDKP	731.009.039	-	-	-	315.974.333	1.046.983.372
6	DITJEN PDSPKP	-	157.300.000	-	-	118.724.243	276.024.243
7	DITJEN PK	1.206.460.000	-	44.540.000	-	144.428.456	1.395.428.456
8	DITJEN PRL	103.610.342	-	-	-	96.350.000	199.960.342
9	BPPSDMKP	-	-	-	266.668.436	1.132.639.329	1.399.307.765
10	BPPMHKP	-	227.300.000	-	-	303.057.165	530.357.165
JUMLAH		8.673.131.355	384.600.000	44.540.000	266.668.436	3.631.060.209	13.000.000.000

C. ALOKASI ANGGARAN MENURUT SUMBER DANA PER UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	SUMBER DANA (Rp.000)						
		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN	JUMLAH
1	SETJEN	603.305.464	-	37.255.499	-	-	-	640.560.963
2	ITJEN	98.878.693	-	-	-	-	-	98.878.693
3	DITJEN PT	6.067.482.211	48.147.392	-	125.000.000	16.000.000	-	6.256.629.603
4	DITJEN PB	925.102.778	11.525.845	142.240.775	65.000.000	12.000.000	-	1.155.869.398
5	DITJEN PSDKP	1.036.983.372	-	-	10.000.000	-	-	1.046.983.372
6	DITJEN PDSPKP	276.024.243	-	-	-	-	-	276.024.243
7	DITJEN PK	1.365.428.456	-	-	30.000.000	-	-	1.395.428.456
8	DITJEN PRL	179.960.342	-	-	20.000.000	-	-	199.960.342
9	BPPSDMKP	1.310.507.329	-	38.046.404	-	-	50.754.032	1.399.307.765
10	BPPMHKP	477.903.980	15.253.185	-	-	-	37.200.000	530.357.165
JUMLAH		12.341.576.868	74.926.422	217.542.678	250.000.000	28.000.000	87.954.032	13.000.000.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Kementerian Kelautan dan Perikanan			13.000.000.000
Sekretariat Jenderal (SETJEN)			640.560.963
032.01.WA.Program Dukungan Manajemen			640.560.963
2322.AEC.002.Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga	1	Kesepakatan	126.470
2322.EBA.Z01.Layanan Hukum	12	Layanan	6.700.220
2322.EBA.Z04.Layanan Bantuan Hukum Pegawai	25	Perkara	600.000
2322.EBA.Z05.Layanan Bantuan Hukum Institusi	20	Perkara	1.199.780
2322.PEC.001.Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	2	Kesepakatan	15.000.000
2323.EBA.Z08.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	781.200
2323.EBC.Z13.Layanan Manajemen SDM	15.490	Orang	12.422.582
2325.AEA.001.Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar Mitra dan Stakeholder KP	55	Kegiatan	33.342.369
2325.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	480.000
2325.EBD.Z23.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan	809.710
2325.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7	Rekomendasi	664.280
2325.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2325.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan Satker Tugas Pembantuan	38	Layanan	696.420

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2328.BMB.001.Layanan Komunikasi Publik	3	Layanan	15.121.287
2328.CAN.001.Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen	93	Unit	3.200.000
2328.EBA.959.Layanan Protokoler	2	Layanan	33.094.156
2328.EBA.962.Layanan Umum	61	Layanan	64.373.226
2328.EBA.994.Layanan Perkantoran	4	Layanan	312.094.876
2328.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	458.000
2328.EBB.951.Layanan Sarana Internal	60	Unit	19.103.649
2328.EBB.971.Layanan Prasarana Internal	1	Unit	23.361.669
2329.BMA.001.Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	42	Dokumen	16.777.299
2329.FAB.001.Sistem Informasi Pemerintahan	4	Sistem Informasi	23.883.540
2329.QMA.001.Layanan Data Kelautan dan Perikanan	160	Data	4.600.000
2329.RAN.001.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	5.000.000
2329.RAN.002.Sarana Data Citra Satelit Radar	5	Unit	606.731
2329.RCL.001.OM Sarana Data Citra Satelit Radar	3	Unit	4.600.000
6453.BDG.001.UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	1.600	Umkm	8.678.986
6453.BIF.001.Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1	Layanan	1.181.134
6453.BMA.001.Layanan Teknologi Informasi LPMUKP	1	Dokumen	317.600
6453.CAN.001.Layanan Pengadaan Perangkat TIK	8	Unit	160.000
6453.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	4.586.652
6453.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	20.684.751
6453.EBB.951.Layanan Sarana Internal	2	Unit	134.000
6453.FAE.001.Laporan Pengelolaan Keuangan	2	Laporan	746.502
6453.FAE.002.Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	1	Laporan	594.144
6453.FAE.003.Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	1	Laporan	171.730

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7939.ABW.G12.Analisa dan Rumusan Rekomendasi Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan	20	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
7939.AEA.151.Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Kegiatan	1.000.000
7939.AEA.152.Integrasi dan Sinergi Kebijakan Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Kegiatan	1.500.000
Inspektorat Jenderal (ITJEN)			98.878.693
032.02.WA.Program Dukungan Manajemen			98.878.693
2335.AAH.001.Peraturan Bidang Pengawasan Intern	10	Peraturan	365.000
2335.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Rekomendasi	204.000
2335.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2335.EBD.Z30.Layanan Audit Internal	439	Rekomendasi	43.380.111
2335.EBD.Z31.Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	197.400
2335.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	120.200
2335.EBD.Z35.Layanan Manajemen Kinerja	1	Layanan	122.036
2336.CAN.001.Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50	Unit	1.325.000
2336.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	213.867
2336.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	44.057.863
2336.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	138.920
2336.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	120.192
2336.EBB.951.Layanan Sarana Internal	188	Unit	2.407.123
2336.EBC.996.Layanan Pendidikan dan Pelatihan	224	Orang	4.088.495
2336.EBC.Z13.Layanan Manajemen SDM	672	Orang	458.326
2336.FAB.001.Sistem Informasi Pengawasan	1	Sistem Informasi	1.172.160

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT)			6.256.629.603
032.03.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			5.834.085.040
2337.ABR.002.Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2337.ABR.003.Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
2337.ABR.004.Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
2337.ACA.001.Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	1.000	Produk	3.900.000
2337.ADC.001.Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	1	Produk	451.426
2337.BDC.001.Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	2	Orang	400.000
2337.BKB.001.Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	5	Laporan	500.000
2337.PCA.001.Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	500	Produk	500.000
2337.PCA.002.Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	10	Produk	500.000
2337.PDI.001.Awak kapal perikanan yang disertifikasi	500	Orang	500.000
2337.PDI.002.Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	12	Orang	500.000
2337.QDC.001.Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	1.000	Orang	500.000
2337.QEO.002.Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	45.000	Unit	60.085.750
2337.QEO.003.Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	7.500	Unit	461.414.250
2338.ABR.001.Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	2	Rekomendasi Kebijakan	739.648
2338.BGA.001.Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	74	Lembaga	540.000
2338.BGA.002.Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	31	Lembaga	28.460.966
2338.BGA.004.Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	74	Lembaga	500.000
2338.PDI.001.Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	50	Orang	500.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2338.PDI.002.Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	30	Orang	460.000
2338.QGA.001.Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	1	Lembaga	100.000
2338.QGA.002.Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	50	Lembaga	20.000.000
2338.RAL.001.Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	9	Unit	200.000
2338.RBQ.001.Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	Unit	500.000
2338.RBQ.003.Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	2	Unit	60.000.000
2338.RBQ.004.Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	4	Unit	76.000.000
2338.RBQ.005.Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	Unit	200.000
2338.SCC.001.Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	50	Orang	33.000
2339.PBR.001.Rekomendasi Kebijakan usaha penangkapan ikan	6	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000
2339.PBR.002.Rekomendasi kebijakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan yang dilaksanakan	6	Rekomendasi Kebijakan	500.000
2339.PCA.001.Perizinan Berusaha (PB) perikanan tangkap yang dikelola	6.000	Produk	700.000
2339.PCA.002.Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) perikanan tangkap yang dikelola	1.600	Produk	500.000
2339.QDC.001.Nelayan kecil dan pelaku usaha pemilik kapal berukuran di bawah 30 GT yang difasilitasi perizinan berusahnya	5.000	Orang	3.000.000
2339.QKB.001.Usaha Penangkapan Ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	6	Laporan	1.000.000
2339.QMA.001.Sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi	6	Data	700.000
2339.UBA.001.Pemerintah Daerah yang difasilitasi perizinan berusaha dan pungutan perikanan tangkap	37	Provinsi	1.200.000
2341.ABR.001.Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Perairan Darat	2	Rekomendasi Kebijakan	250.000
2341.ABR.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2341.ABR.003.Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	11	Rekomendasi Kebijakan	350.000
2341.PBR.001.Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	11	Rekomendasi Kebijakan	400.000
2341.PBR.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	2	Rekomendasi Kebijakan	150.000
2341.PBR.003.Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	11	Rekomendasi Kebijakan	250.000
2341.QGA.001.Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	Lembaga	350.000
2341.QGA.004.Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaanya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	3	Lembaga	1.500.000
2341.RBQ.002.Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	1	Unit	100.000
7940.BDC.001.Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	2.500	Orang	1.000.000
7940.BDC.002.Awak kapal perikanan pelintas batas yang difasilitasi perlindungannya	50	Orang	200.000
7940.QDC.001.Nelayan yang difasilitasi sertifikasi bidang tanahnya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDC.002.Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDC.003.Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDD.001.Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	250	Kelompok Masyarakat	16.500.000
7940.QDD.004.Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	1	Kelompok Masyarakat	200.000
7940.QDD.005.Koperasi nelayan yang difasilitasi tergabung dalam koperasi merah putih Kelautan dan Perikanan	250	Kelompok Masyarakat	6.250.000
7940.QEA.001.Bantuan Premi Asuransi Nelayan	275.000	Orang	61.600.000
7940.QEH.001.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya	250	Kelompok Masyarakat	5.002.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7940.QEH.002.Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	1	Kelompok Masyarakat	200.000
7940.QEH.005.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	3	Kelompok Masyarakat	3.500.000
7940.QKA.001.Nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya	200	Laporan	1.000.000
7940.QKA.002.Kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya	800	Laporan	1.000.000
7940.QKA.003.Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	10.000	Laporan	200.000
7940.QKA.004.Kelompok Nelayan yang diidentifikasi kampung nelayannya untuk difasilitasi penataannya	20	Laporan	200.000
7940.QMA.001.Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan	100.000	Data	3.750.000
032.03.WA.Program Dukungan Manajemen			422.544.563
2342.AEA.001.Koordinasi Pengelolaan Manajerial	1	Kegiatan	4.028.726
2342.CAN.955.Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	Unit	997.720
2342.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	94.056
2342.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.674.180
2342.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	393.509.563
2342.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	416.123
2342.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	218.525
2342.EBB.951.Layanan Sarana Internal	1	Unit	6.514.871
2342.EBB.971.Layanan Prasarana Internal	1	Unit	12.470.078
2342.EBC.Z13.Layanan Manajemen SDM	2.068	Orang	426.486
2342.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30	Rekomendasi	1.658.435
2342.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2342.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	27.800
Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB)			1.155.869.398
032.04.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			797.966.934

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7021.PBR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7021.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	20	Lembaga	40.000
7021.QED.001.Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	62.231	Unit	4.500.000
7021.QEG.001.Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	200	Unit	10.000.000
7021.QEG.002.Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	1	Unit	5.000.000
7021.RBQ.002.Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun	1	Unit	10.000.000
7022.BJC.001.Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau	9.234	Sampel	3.693.590
7022.BJC.002.Sampel Uji Pakan dan Obat Ikan Air Payau	187	Sampel	131.170
7022.PBR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7022.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	380	Lembaga	760.000
7022.QEL.U01.Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	204	Ekor	22.236
7022.QEL.U02.Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	19.162	Ekor	1.124.837
7022.QEL.U03.Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	7.619.248	Ekor	1.904.812
7022.QEL.U04.Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	102.973.095	Ekor	5.456.471
7022.QJC.001.Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	480	Sampel	1.200.000
7022.QJC.002.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	255	Sampel	510.000
7022.QJC.U03.Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	535	Sampel	502.856
7022.RAL.001.Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	4.042	Unit	412.328
7022.RAL.002.Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi	141.198	Unit	8.189.502
7022.RAL.003.Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	106.102	Unit	1.538.482
7022.RAL.004.Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	32.339.991	Unit	7.276.498
7022.RAL.005.Benih Udang yang Diproduksi	52.450.560	Unit	2.622.528
7022.RAL.006.Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi	3.883.078	Unit	112.609.254

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7022.RBQ.003. <i>Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project</i> (IISAP)	7	Unit	60.000.000
7022.RBQ.005.Budidaya Udang Terintegrasi - ISF	1	Unit	10.000.000
7022.RBQ.006.Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan	1	Unit	300.000.000
7022.RBQ.007.Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun	4	Unit	10.000.000
7023.ABR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7023.BJC.001.Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut	1.842	Sampel	736.800
7023.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	200	Lembaga	400.000
7023.QEL.U03.Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	448.658	Ekor	460.772
7023.QEL.U04.Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	4.560.469	Ekor	27.932.871
7023.QJC.001.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	340	Sampel	680.000
7023.QJC.U02.Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	216	Sampel	203.343
7023.RAL.001.Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	5.747	Unit	811.348
7023.RAL.002.Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	5.612	Unit	1.840.635
7023.RAL.004.Benih Kepiting yang diproduksi	341.622	Unit	341.622
7023.RAL.005.Benih Ikan Laut yang diproduksi	773.771	Unit	4.642.622
7023.RAL.006.Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	25.000	Unit	3.750.000
7023.RBQ.001.Kluster Komoditas Unggulan Air Laut berbasis kawasan	1	Unit	250.000
7024.ABR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7024.BJC.001.Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Tawar	2.300	Sampel	920.000
7024.BJC.002.Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Tawar	42	Sampel	29.400
7024.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	380	Lembaga	760.000
7024.QEL.U01.Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	57.561	Ekor	2.252.927
7024.QEL.U06.Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	69.669.753	Ekor	24.245.074

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7024.QJC.001.Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	168	Sampel	417.500
7024.QJC.002.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	255	Sampel	510.000
7024.QJC.U03.Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	956	Sampel	899.154
7024.RAL.001.Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	69.495	Unit	2.636.646
7024.RAL.002.Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	107.122	Unit	1.724.656
7024.RAL.003.Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	3.185.430	Unit	962.000
7024.RAL.004.Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	15	Unit	1.500.000
7024.RAL.005.Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	1	Unit	12.000.000
7024.RBQ.001.Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	1	Unit	500.000
7941.ABR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7941.QAB.001.Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	20	Lembaga	40.000
7941.QDC.001.Rekomendasi bidang lahan budi daya yang akan disertifikasi	1.000	Orang	300.000
7941.QDD.001.Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	3	Kelompok Masyarakat	750.000
7941.QEA.001.Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya	42	Orang	125.000
7941.QEA.002.Perindungan usaha budi daya skala kecil	333	Orang	1.000.000
7941.QEO.001.Sarana Budi Daya Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	12	Unit	18.000.000
7941.QEO.002.Sarana Budi Daya Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	50	Unit	12.500.000
7941.QEO.003.Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	440	Unit	105.100.000
7941.RBQ.002.Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	30	Unit	7.500.000
7941.RBQ.003.Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	1	Unit	750.000
032.04.WA.Program Dukungan Manajemen			357.902.464
2348.AEC.001.Kerja Sama Bidang Perikanan Budi Daya	3	Dokumen	2.117.200
2348.EBA.962.Layanan Umum	16	Layanan	3.700.200

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2348.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	6	Layanan	1.850.000
2348.EBA.994.Layanan Perkantoran	16	Layanan	334.836.364
2348.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	458.000
2348.EBA.Z03.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II Ke Bawah)	15	Layanan	279.000
2348.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	350.000
2348.EBB.951.Layanan Sarana Internal	1	Unit	2.000.000
2348.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM Lingkup Kementerian/Lembaga yang Memiliki Satker Vertikal/memiliki UPT di Daerah kategori Kecil	1.527	Layanan	2.593.000
2348.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17	Layanan	3.060.100
2348.EBD.Z25.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	141	Layanan	810.100
2348.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2348.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	17	Layanan	5.340.500
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)			1.046.983.372
032.05.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			731.009.039
2350.AEB.001.Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	2	Forum	321.669
2350.AFA.001.NSPK bidang operasi Armada pengawasan SDKP	1	NSPK	130.000
2350.AFA.002.NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	2	NSPK	260.000
2350.BHD.001.Operasional Pengawasan dan Logistik Kapal Pengawas	75	Operasi	13.644.059
2350.BHD.003.Operasional Tim Pesawat Patroli	120	Operasi	2.774.138
2350.FAE.001. Laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Laporan	1.016.080
2350.FAE.002.Laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Laporan	1.960.000
2350.QHD.001.Operasi Kapal Pengawas	75	Operasi	421.798.900
2350.QHD.002.Operasi Pesawat Patroli	120	Operasi	117.195.862
2350.QHD.003.Operasi Speedboat Pengawas	20	Operasi	11.200.000
2350.RAL.003.Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	10	Unit	10.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2350.RBQ.001.Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	3	Unit	6.800.000
2350.RCG.001.Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	121	Unit	100.000.000
2351.AEA.002.Sinergitas Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Kegiatan	509.500
2351.AEB.001.Forum Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan	3	Forum	945.900
2351.AFA.001.NSPK bidang penanganan pelanggaran	1	NSPK	150.000
2351.BCB.001.Perkara hukum Ditjen PSDKP yang diselesaikan	2	Perkara	200.000
2351.BCE.001.Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	1	Perkara	450.000
2351.BCE.002.Perkara Kelautan yang dikenakan Sanksi Administratif	40	Perkara	2.165.560
2351.BCE.003.Perkara Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif	60	Perkara	2.043.540
2351.BCE.U04.Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	45	Perkara	5.580.000
2351.FAE.001.Laporan supervisi penanganan perkara TPKP	12	Laporan	505.500
2352.ACA.001.Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2.259	Produk	700.000
2352.AFA.001.NSPK Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1	NSPK	130.000
2352.AFA.002.NSPK Pengawasan Sumber Daya Perikanan	3	NSPK	300.000
2352.BHD.001.Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	15	Operasi	1.524.747
2352.BHD.002.Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	10	Operasi	929.000
2352.BII.001.Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	2	Layanan	484.500
2352.BII.002.Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	14	Layanan	210.000
2352.FAE.001.Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	12	Laporan	1.100.000
2352.FAE.002.Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	12	Laporan	1.033.450
2352.FBA.001.Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	125.000
2352.FBA.002.Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	375.000
2352.QIC.001.Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	1.409	Lembaga	7.750.068

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2352.QIC.002.Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	1.622	Lembaga	9.107.550
2352.RDS.001.Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1	Unit	3.928.331
2353.BMB.001.Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Kegiatan	480.685
2353.FAE.001.Laporan supervisi pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	12	Laporan	180.000
2353.QDD.001.Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	60	Kelompok Masyarakat	3.000.000
032.05.WA.Program Dukungan Manajemen			315.974.333
2355.AAH.001.Penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal	9	Peraturan	297.500
2355.AEC.001.Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Dokumen	550.000
2355.CAN.001.Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	34	Unit	510.000
2355.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	6.417.800
2355.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	6	Layanan	2.755.455
2355.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	296.974.333
2355.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	456.640
2355.EBA.Z03.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal	14	Layanan	218.905
2355.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	340.000
2355.EBA.Z07.Layanan BMN Satker Vertikal	14	Layanan	140.000
2355.EBB.951.Layanan Sarana Internal	60	Unit	800.000
2355.EBB.971.Layanan Prasarana Internal	1	Unit	200.000
2355.EBC.996.Layanan Pendidikan dan Pelatihan	196	Orang	1.445.687
2355.EBC.Z13.Layanan Manajemen SDM	1.823	Orang	886.923
2355.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11	Dokumen	2.090.490
2355.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2355.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal	14	Layanan	266.000
2355.EBD.Z31.Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	197.400

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2355.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	120.200
2355.EBD.Z34.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Satker Vertikal	14	Layanan	112.000
2355.EBD.Z35.Layanan Manajemen Kinerja	1	Layanan	211.000
2355.EBD.Z36.Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal	14	Layanan	476.000
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)			276.024.243
032.06.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			157.300.000
2357.BDB.001.Pelaku Pemasaran yang dibina	3.500	Lembaga	7.000.000
2357.PBR.001.Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	5	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000
2357.PBR.003.Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	5	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
2357.PEE.001.Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	20	Kesepakatan	500.000
2357.PEE.002.Kerjasama Pemasaran Rumput Laut	10	Kesepakatan	250.000
2357.PEH.001.Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	200	Promosi	37.000.000
2357.PEH.003.Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	1	Promosi	900.000
2357.PEH.004.Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	2	Promosi	1.300.000
2357.PEH.005.Promosi Produk Rumput Laut Skala Internasional	1	Promosi	650.000
2357.PEH.006.Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan	1	Promosi	700.000
2357.QDI.001.Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	8	Industri	800.000
2357.QDI.002.Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	2	Industri	200.000
2357.QMA.001.Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	11	Data	1.650.000
2357.QMA.002.Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	11	Data	1.650.000
2358.ADA.001.Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Produk	1.000.000
2358.BMA.002.Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan	6	Data	900.000
2358.QDG.001.Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah	3.020	Umkm	7.550.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2358.QDG.002.Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	375	Umkm	750.000
2358.QDI.001.Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	650	Industri	1.300.000
5279.ADA.002.Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	100	Produk	1.000.000
5279.ADA.003.Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	350	Produk	735.000
5279.ADA.004.Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk KP yang disediakan dalam ruang lingkup layanan	15	Produk	315.000
5279.AEF.001.Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	1.500	Orang	450.000
5279.DDA.001.Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan	12	Produk	600.000
5279.QDG.001.UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	100	Umkm	5.000.000
7025.ABR.001. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	4	Rekomendasi Kebijakan	800.000
7025.BDG.001.Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka Penguatan Sistem Logistik	400	Umkm	800.000
7025.BMA.001.Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Data	1.000.000
7025.QDH.001.Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	60	Badan Usaha	900.000
7025.RAL.001.Sarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	5.020	Unit	37.490.000
7025.RAL.002.Sarana Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Pemasaran	550	Unit	11.000.000
7025.RAL.004.Sarana Distribusi Logistik Produk KP	16	Unit	16.999.400
7026.ABR.001.Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi	3	Rekomendasi Kebijakan	900.000
7026.AEE.001.Kemitraan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	10	Kesepakatan	250.000
7026.BAC.001.Pelaku Usaha yang difasilitasi Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran	30	Badan Usaha	300.000
7026.BAC.002.Pelaku Usaha yang didampingi dalam rangka Realisasi Investasi	15	Badan Usaha	300.000
7026.QDB.001. Lembaga Usaha Kelautan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan Usaha	120	Lembaga	2.310.600
7026.QDG.002.Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina	3.650	Umkm	7.300.000
7026.QDG.003.UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan	750	Umkm	1.500.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.06.WA.Program Dukungan Manajemen			118.724.243
2361.AEA.001.Koordinasi Pengelolaan Manajerial	2	Kegiatan	1.516.000
2361.AEC.001.Layanan Kerja Sama Ditjen PDSPKP	3	Kesepakatan	1.382.600
2361.EBA.962.Layanan Umum	2	Layanan	3.712.000
2361.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	750.000
2361.EBA.994.Layanan Perkantoran	2	Layanan	108.524.243
2361.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	458.000
2361.EBA.Z04.Layanan Bantuan Hukum	4	Perkara	200.000
2361.EBB.951.Layanan Sarana Internal Ditjen PDSPKP	1	Paket	50.000
2361.EBC.Z10.Layanan Manajemen SDM	478	Orang	717.000
2361.EBD.Z06.Layanan Barang Milik Negara	1	Layanan	480.000
2361.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	204.000
2361.EBD.Z25.Layanan Pemantauan dan Evaluasi Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	1	Layanan	6.000
2361.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2361.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	1	Layanan	19.000
2361.EBD.Z31.Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	197.400
Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK)			1.395.428.456
032.07.FD.Program Kualitas Lingkungan Hidup			44.540.000
2362.PBW.001.Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	3	Rekomendasi Kebijakan	550.000
2362.PBW.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan Biota Perairan dan Genetik	4	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000
2362.PBW.003.Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	2	Rekomendasi Kebijakan	200.000
2362.PBW.004.Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	2	Rekomendasi Kebijakan	100.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2362.PBW.005.Rekomendasi Pengelolaan Karbon Biru Berbasis Kinerja	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
s2362.PCA.001.Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	2	Produk	450.000
2362.PCA.002.Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	5	Produk	2.625.000
2362.PEE.001.Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	2	Kesepakatan	225.000
2362.PFA.001.Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem	1	NSPK	100.000
2362.PFA.002.Dokumen NSPK Konservasi Biota Perairan	1	NSPK	400.000
2362.RAL.001.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	1	Unit	100.000
2362.RAL.002.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	2	Unit	400.000
2362.REA.002.Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	19.100.000	Hektar	2.875.000
2362.REA.004.Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	10.000.000	Hektar	30.000.000
2362.REA.005.Terumbu Karang yang direhabilitasi	1	Hektar	100.000
2362.REB.001.Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	25	Spesies	725.000
2362.REB.002.Penanganan Biota Perairan Dilindungi dan atau Terancam punah	12	Spesies	800.000
2362.REB.003.Penanganan Biota Perairan Jenis Asing Invasif	2	Spesies	200.000
2362.REB.004.Penanganan Konflik Biota Perairan	4	Spesies	900.000
2362.SCC.002.Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	25	Orang	200.000
2362.SCC.003.Aparatur Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang ditingkatkan kompetensinya	20	Orang	200.000
2362.SCC.004.Masyarakat Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Orang	300.000
4346.PBW.001.Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
4346.PBW.002.Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
4346.PBW.003.Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
4346.PEE.002.Jejaring, Kemitraan dan Kerjasama Restorasi Kawasan Pesisir	1	Kesepakatan	240.000
4346.QDD.002.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	1	Kelompok Masyarakat	125.000
4346.QDD.003.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	1	Kelompok Masyarakat	125.000
4346.SCC.001.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	100	Orang	400.000
032.07.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.206.460.000
2363.PBW.002.Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000
2363.PBW.003.Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	10	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
2363.PBW.004.Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.007.Rekomendasi pengelolaan BMKT	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.008.Rekomendasi Kebijakan Berusaha Sumber Daya Kelautan	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.009.Rekomendasi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan	1	Rekomendasi Kebijakan	50.000
2363.PEE.002.Jejaring, Kemitraan, Kerjasama Pergaraman	1	Kesepakatan	1.000.000
2363.PFA.002.Dokumen NSPK Sumberdaya Kelautan	3	NSPK	750.000
2363.QDD.001.Korporasi Petambak Garam	3	Kelompok Masyarakat	3.000.000
2363.RBO.002.Revitalisasi Lahan Garam	1.500	Hektar	883.000.000
2363.RBQ.001.Prasarana Usaha Garam	20	Unit	300.000.000
2363.SCC.002.Masyarakat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	20	Orang	50.000
2363.SCC.003.Masyarakat dan Pengelola BMKT yang Ditingkatkan Kompetensinya	20	Orang	50.000
2363.SCC.004.Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya	100	Orang	2.500.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2365.PBW.001.Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	5	Rekomendasi Kebijakan	400.000
2365.PBW.002.Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1	Rekomendasi Kebijakan	880.000
2365.PFA.002.Dokumen NSPK Pemanfaatan dan Pengendalian Pulau-Pulau Kecil	1	NSPK	380.000
2365.QDD.001.Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	1	Kelompok Masyarakat	150.000
2365.QDD.003.Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1	Kelompok Masyarakat	150.000
7942.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.002.Rekomendasi pengelolaan wisata bahari	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.003.Rekomendasi Pengelolaan bangunan dan instalasi di laut	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.004.Rekomendasi perdagangan karbon sektor kelautan	5	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.005.Rekomendasi Berusaha Jasa Bahari	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PFA.001.Dokumen NSPK Jasa Bahari	1	NSPK	500.000
032.07.WA.Program Dukungan Manajemen			144.428.456
2367.AAH.001.Peraturan Lainnya Ditjen PK	17	Peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	591.064
2367.AEA.001.Koordinasi Pengeloaan Manajerial	5	Kegiatan	1.261.000
2367.AEC.051.Layanan Kerjasama Sub Bidang Pengelolaan Kelautan	5	Kesepakatan	594.874
2367.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	4.247.897
2367.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	571.327

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2367.EBA.994.Layanan Perkantoran	2	Layanan	132.928.456
2367.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	458.000
2367.EBA.Z03.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	6	Layanan	46.690
2367.EBA.Z06.Layanan BMN untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	421.054
2367.EBA.Z07.Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	8	Layanan	40.000
2367.EBC.Z10.Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga tanpa Satker Vertikal di Daerah dan Tanpa UPT	131	Orang	244.810
2367.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil	504	Orang	466.643
2367.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	7	Rekomendasi	1.344.258
2367.EBD.Z25.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	20	Rekomendasi	104.000
2367.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	508.000
2367.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	4	Layanan	76.000
2367.EBD.Z31.Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	197.400
2367.EBD.Z32.Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	4	Layanan	89.380
2367.EBD.Z35.Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	5	Layanan	237.603
Ditjen Penataan Ruang Laut (DJPRL)			199.960.342
032.08.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			103.610.342
7943.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	2	Rekomendasi Kebijakan	2.462.500
7943.PBW.002.Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	4	Rekomendasi Kebijakan	4.925.000
7943.PBW.004.Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	2	Rekomendasi Kebijakan	2.462.500
7943.PBW.007.Rekomendasi Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	1	Rekomendasi Kebijakan	1.900.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7943.PBW.010.Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
7943.PEE.002.Insiasi Kerja Sama Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1	Kesepakatan	500.000
7943.PFA.001.Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Perairan	3	Dokumen	1.000.000
7943.PFA.002.Dokumen NSPK Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil	1	Dokumen	500.000
7943.QMA.001.Data dan Informasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional	1	Dokumen	800.000
7943.QMA.002.Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1	Dokumen	300.000
7943.RAL.001.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Nasional	2	Unit	355.224
7943.RAL.002.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Unit	400.000
7943.SCC.002.Peningkatan Kapasitas SDM Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50	Orang	300.000
7943.UBA.001.Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	7	Daerah	2.086.876
7944.PBT.002.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Berusaha	550	Rekomendasi Kebijakan	3.750.000
7944.PBT.003.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Non Berusaha	55	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
7944.PBT.004.Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Daerah	37	Rekomendasi Kebijakan	15.200.000
7944.PBT.005.Rekomendasi Kebijakan Layanan Prapendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	150	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000
7944.PBT.006.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Data Lapangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	50	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
7944.PBT.010.Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	250	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000
7944.PBT.011.Rekomendasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	50	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000
7944.PFA.001.Dokumen NSPK Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	3	NSPK	1.500.000
7944.RAN.001.Sistem Tata Kelola Pelayanan Perizinan	1	Unit	5.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7944.SCC.001.Aparatur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	Orang	1.500.000
7945.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KAW	2	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.002.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KSN	4	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.003.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Perairan Pesisir	5	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.004.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut Nasional	1	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.005.Rekomendasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Perencanaan Ruang Laut	1	Rekomendasi Kebijakan	750.000
7945.PFA.001.Dokumen NSPK Standarisasi Penataan Ruang Laut	2	Dokumen	659.645
7945.QMA.001.Data dan Informasi Publik terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	4	Dokumen	1.200.000
7945.RAL.002.Ocean Monitoring System - LAUTRA	1	Unit	20.000.000
7945.RAN.001.Sistem Monitoring Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	2	Unit	1.000.000
7945.SCC.001.ASN Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	150	Orang	1.800.000
7945.SCC.002.Stakeholder Kelautan Perikanan (Non ASN) Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	Orang	500.000
7945.SCC.003.Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi dalam Pengelolaan Ruang Laut	60	Orang	1.000.000
7946.PBT.001.Rekomendasi Pengendalian KKPRL	1.100	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
7946.PBT.002.Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut	20	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
7946.PBT.005.Rekomendasi Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi	12	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
7946.PBT.006.Rekomendasi Tata Kelola Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Tidak Berizin	17	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7946.PBT.007.Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	8	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7946.PFA.001.Dokumen NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	2	NSPK	508.597
7946.RAL.001.Sarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	20	Unit	500.000
7946.RAN.001.Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	3	Unit	600.000
7946.SCC.001.Aparatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	150	Orang	600.000
7946.UBA.001.Pemerintah Daerah yang Difasilitasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000
032.08.WA.Program Dukungan Manajemen			96.350.000
7947.AEA.001.Koordinasi Pengelolaan Manajerial	3	Kegiatan	9.801.750
7947.AEC.051.Layanan Kerjasama Sub Bidang Penataan Ruang Laut	5	Kesepakatan	2.000.000
7947.CAN.001.Perangkat Pengolah Data dan Informasi	7	Unit	350.000
7947.EBA.962.Layanan Umum	5	Layanan	13.187.910
7947.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	683.000
7947.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	60.000.000
7947.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	418.250
7947.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	480.000
7947.EBB.951.Layanan Sarana Internal	46	Unit	6.967.000
7947.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM	368	Orang	1.454.090
7947.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen	500.000
7947.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	508.000
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)			1.399.307.765
032.12.DL.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			266.668.436
2375.AAH.111.Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Disusun	2	Rancangan Peraturan	200.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2375.ABW.121.Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Kajian	100.000
2375.ADF.141.Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan Kelautan dan Perikanan	7	Lembaga	300.000
2375.AEA.151.Koordinasi Pengelolaan Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	4	Kegiatan	400.000
2375.AEE.152.Kemitraan, Jejaring dan Kerjasama Pelatihan Kelautan dan Perikanan	4	Kesepakatan	200.000
2375.AFA.161.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	3	NSPK	300.000
2375.RAL.711.Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	3	Paket	19.679.145
2375.RBQ.721.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	4.551.121
2375.SCC.831.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	23.465	Orang	33.373.103
2376.ABW.121.Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	5	Kajian	400.000
2376.AFA.161.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan	2	NSPK	100.000
2376.PDE.541.Akreditasi Lembaga dan/atau Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	19	Lembaga	235.000
2376.PDI.545.Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	52	Orang	235.000
2376.QGC.671.Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	16	Lembaga	3.000.000
2376.RAA.711.Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3	Paket	28.446.275
2376.RAN.715.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	50.000
2376.RBI.721.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	50.000
2376.RBJ.725.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Unit	5.140.032
2376.SAC.811.Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	5.837	Orang	134.765.500
2376.SDC.843.IlmU Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang Diterapkan kepada Masyarakat	20	Model	400.000
7020.ABW.128.Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
7020.ABW.129.Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan	50.000
7020.AFA.166.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4	NSPK	200.000
7020.DCC.436.Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	50	Orang	50.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7020.QDB.646.Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan	1	Lembaga	150.000
7020.QDD.646.Kelompok Pelaku Usaha/Utama yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	40.100	Kelompok Masyarakat	21.043.260
7020.QKA.696.Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	1	Laporan	100.000
7020.RAL.716.Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Paket	50.000
7020.RBQ.726.Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	50.000
7020.SDC.846.Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang Diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan	4	Model	750.000
7948.ADF.142.Sertifikasi Kelembagaan Sertifikasi Kompetensi sesuai Standard Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	1	Lembaga	250.000
7948.AFA.162.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	NSPK	350.000
7948.PAH.512.Standard Kompetensi Profesi yang Disusun Bidang Kelautan dan Perikanan	2	Peraturan	200.000
7948.PDI.542.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	7.500	Orang	10.800.000
7948.RAL.712.Peralatan dan Mesin Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Paket	400.000
7948.RBQ.722.Gedung, Bangunan dan Prasarana Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	200.000
032.12.WA.Program Dukungan Manajemen			1.132.639.329
2378.AEA.952.Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran	4	Kegiatan	610.238
2378.AEA.953.Koordinasi Hukum	6	Kegiatan	500.000
2378.AEA.954.Koordinasi Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	Kegiatan	250.000
2378.AEC.964.Layanan Kerja Sama	1	Layanan	500.000
2378.EBA.962.Layanan Umum	44	Layanan	3.874.493
2378.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	275.000
2378.EBA.994.Layanan Perkantoran	47	Layanan	1.108.526.098
2378.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	458.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
s2378.EBA.Z03.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	17	Layanan	243.793
2378.EBA.Z06.Layanan BMN untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	300.000
2378.EBA.Z07.Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	13	Layanan	124.022
2378.EBB.951.Layanan Sarana Internal	1	Paket	100.000
2378.EBB.971.Layanan Prasarana Internal	1	Unit	100.000
2378.EBC.Z10.Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga yang memiliki Satker Vertikal/memiliki UPT di Daerah Kategori Sedang	216	Orang	81.580
2378.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga tanpa Satker Vertikal di Daerah di daerah Kategori Kecil	23	Orang	90.000
2378.EBC.Z12.Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang	58	Orang	180.000
2378.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	4	Rekomendasi	750.000
2378.EBD.Z25.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	64	Rekomendasi	536.000
2378.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	508.000
2378.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	41	Layanan	350.905
2378.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	120.200
2378.EBD.Z34.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	8	Layanan	61.000
2378.FAB.461.Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Sistem Informasi	100.000
4345.EBC.Z16.Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	80	Orang	762.900
4345.EBC.Z17.Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Blended Learning)	80	Orang	766.900
4345.FAC.996.Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	4684	Orang	12.470.200
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)			530.357.165
032.13.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			227.300.000
3989.AFA.001.Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer	1	NSPK	200.000
3989.AFA.002.Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen	1	NSPK	200.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
3989.PDC.001.Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	5.000	Produk	1.750.000
3989.PDC.002.Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	5.000	Produk	7.550.000
3989.PDC.003.Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	95	Produk	200.000
3989.PDF.001.Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	1.500	Lembaga	1.750.000
3989.PDF.002.Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	1.500	Lembaga	4.500.000
3989.QIA.001.Hasil Perikanan di wilayah RI sektor produksi pasca panen yang diawasi mutunya	21	Produk	340.000
3989.QIA.002.Hasil Perikanan di wilayah RI sektor produksi primer yang diawasi mutunya	10	Produk	500.000
3989.QIA.003.hasil perikanan impor yang diawasi mutunya	5	Produk	160.000
3989.QIC.002.Unit usaha produksi pasca panen yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	1.080	Lembaga	550.000
3989.QIC.003.unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	200	Lembaga	200.000
3989.RAL.001.Sarana Pengujian Mutu	46	Unit	147.500.000
3989.RBQ.001.Prasarana Pengujian Mutu	13	Unit	39.700.000
7010.ABR.001.Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7010.AFA.001.NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP	2	NSPK	100.000
7010.BIA.001.Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	35	Produk	350.000
7010.DCC.001.Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	500	Orang	300.000
7010.PBR.001.Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	8	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000
7010.PBR.002.Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	20	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000
7010.PDD.001.Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	17	Lembaga	100.000
7010.PDD.002.Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	35	Lembaga	1.600.000
7010.PDD.003.Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	27	Lembaga	400.000
7010.QDC.001.Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	10.000	Orang	15.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7010.QIA.001.Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	50	Produk	300.000
032.13.WA.Program Dukungan Manajemen			303.057.165
3987.AEA.001.Koordinasi Pelaksanaan Manejerial	1	Dokumen	3.300.000
3987.AEC.001.Layanan Kerja Sama	6	Kesepakatan	150.000
3987.CAN.001.Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP	47	Unit	2.000.000
3987.EBA.962.Layanan Umum	46	Layanan	16.203.185
3987.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	46	Layanan	2.000.000
3987.EBA.994.Layanan Perkantoran	12	Layanan	275.403.980
3987.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	100.000
3987.EBA.Z06.Layanan BMN untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	100.000
3987.EBB.951.Layanan Sarana Internal	3	Unit	2.300.000
3987.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil	1.324	Orang	500.000
3987.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Dokumen	200.000
3987.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Dokumen	500.000
3987.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Dokumen	100.000
3987.EBD.Z35.Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Dokumen	200.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

**RINCIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026**

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.			9.221.625.194
Sekretariat Jenderal (SETJEN)			29.806.731
032.01.WA.Program Dukungan Manajemen			29.806.731
2322.PEC.001.Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	2	Kesepakatan	15.000.000
2329.QMA.001.Layanan Data Kelautan dan Perikanan	160	Data	4.600.000
2329.RAN.001.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	5.000.000
2329.RAN.002.Sarana Data Citra Satelit Radar	5	Unit	606.731
2329.RCL.001.OM Sarana Data Citra Satelit Radar	3	Unit	4.600.000
Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT)			5.794.493.000
032.03.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			5.794.493.000
2337.PCA.001.Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	500	Produk	500.000
2337.PCA.002.Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	10	Produk	500.000
2337.PDI.001.Awak kapal perikanan yang disertifikasi	500	Orang	500.000
2337.PDI.002.Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	12	Orang	500.000
2337.QDC.001.Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	1.000	Orang	500.000
2337.QEO.002.Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	45.000	Unit	60.085.750
2337.QEO.003.Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	7.500	Unit	461.414.250

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2338.PDI.001.Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	50	Orang	500.000
2338.PDI.002.Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	30	Orang	460.000
2338.QGA.001.Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	1	Lembaga	100.000
2338.QGA.002.Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	50	Lembaga	20.000.000
2338.RAL.001.Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	9	Unit	200.000
2338.RBQ.001.Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	Unit	500.000
2338.RBQ.003.Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	2	Unit	60.000.000
2338.RBQ.004.Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>	4	Unit	76.000.000
2338.RBQ.005.Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	Unit	200.000
2338.SCC.001.Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	50	Orang	33.000
2339.PBR.001.Rekomendasi Kebijakan usaha penangkapan ikan	6	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000
2339.PBR.002.Rekomendasi kebijakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan yang dilaksanakan	6	Rekomendasi Kebijakan	500.000
2339.PCA.001.Perizinan Berusaha (PB) perikanan tangkap yang dikelola	6.000	Produk	700.000
2339.PCA.002.Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) perikanan tangkap yang dikelola	1.600	Produk	500.000
2339.QDC.001.Nelayan kecil dan pelaku usaha pemilik kapal berukuran di bawah 30 GT yang difasilitasi perizinan berusahnya	5.000	Orang	3.000.000
2339.QKB.001.Usha Penangkapan Ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	6	Laporan	1.000.000
2339.QMA.001.Sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi	6	Data	700.000
2339.UBA.001.Pemerintah Daerah yang difasilitasi perizinan berusaha dan pungutan perikanan tangkap	37	Provinsi	1.200.000
2341.PBR.001.Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	11	Rekomendasi Kebijakan	400.000
2341.PBR.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	2	Rekomendasi Kebijakan	150.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2341.PBR.003.Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	11	Rekomendasi Kebijakan	250.000
2341.QGA.001.Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	Lembaga	350.000
2341.QGA.004.Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaanya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	3	Lembaga	1.500.000
2341.RBQ.002.Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	1	Unit	100.000
7940.QDC.001.Nelayan yang difasilitasi sertifikasi bidang tanahnya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDC.002.Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDC.003.Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDD.001.Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	250	Kelompok Masyarakat	16.500.000
7940.QDD.004.Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	1	Kelompok Masyarakat	200.000
7940.QDD.005.Koperasi nelayan yang difasilitasi tergabung dalam koperasi merah putih Kelautan dan Perikanan	250	Kelompok Masyarakat	6.250.000
7940.QEA.001.Bantuan Premi Asuransi Nelayan	275.000	Orang	61.600.000
7940.QEH.001.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya	250	Kelompok Masyarakat	5.002.000.000
7940.QEH.002.Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	1	Kelompok Masyarakat	200.000
7940.QEH.005.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	3	Kelompok Masyarakat	3.500.000
7940.QKA.001.Nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya	200	Laporan	1.000.000
7940.QKA.002.Kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya	800	Laporan	1.000.000
7940.QKA.003.Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	10.000	Laporan	200.000
7940.QKA.004.Kelompok Nelayan yang diidentifikasi kampung nelayannya untuk difasilitasi penataannya	20	Laporan	200.000
7940.QMA.001.Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan	100.000	Data	3.750.000
Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB)			759.955.974
032.04.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			759.955.974
7021.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	20	Lembaga	40.000
7022.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	380	Lembaga	760.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7022.QEL.U01.Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	204	Ekor	22.236
7022.QEL.U02.Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	19.162	Ekor	1.124.837
7022.QEL.U03.Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	7.619.248	Ekor	1.904.812
7022.QEL.U04.Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	102.973.095	Ekor	5.456.471
7022.QJC.001.Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	480	Sampel	1.200.000
7022.QJC.002.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	255	Sampel	510.000
7022.QJC.U03.Sampel Surveilance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	535	Sampel	502.856
7022.RAL.001.Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	4.042	Unit	412.328
7022.RAL.002.Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi	141.198	Unit	8.189.502
7022.RAL.003.Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	106.102	Unit	1.538.482
7022.RAL.004.Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	32.339.991	Unit	7.276.498
7022.RAL.005.Benih Udang yang Diproduksi	52.450.560	Unit	2.622.528
7022.RAL.006.Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi	3.883.078	Unit	112.609.254
7022.RBQ.003. <i>Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)</i>	7	Unit	60.000.000
7022.RBQ.005.Budi Daya Udang Terintegrasi - ISF	1	Unit	10.000.000
7022.RBQ.006.Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan	1	Unit	300.000.000
7022.RBQ.007.Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun	4	Unit	10.000.000
7023.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	200	Lembaga	400.000
7023.QEL.U03.Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	448.658	Ekor	460.772
7023.QEL.U04.Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	4.560.469	Ekor	27.932.871
7023.QJC.001.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	340	Sampel	680.000
7023.QJC.U02.Sampel <i>Surveillance</i> Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	216	Sampel	203.343
7023.RAL.001.Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	5.747	Unit	811.348
7023.RAL.002.Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	5.612	Unit	1.840.635
7023.RAL.004.Benih Kepiting yang diproduksi	341.622	Unit	341.622
7023.RAL.005.Benih Ikan Laut yang diproduksi	773.771	Unit	4.642.622
7023.RAL.006.Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	25.000	Unit	3.750.000
7023.RBQ.001.Kluster Komoditas Unggulan Air Laut berbasis kawasan	1	Unit	250.000
7024.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	380	Lembaga	760.000
7024.QEL.U01.Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	57.561	Ekor	2.252.927
7024.QEL.U06.Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	69.669.753	Ekor	24.245.074
7024.QJC.001.Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	168	Sampel	417.500
7024.QJC.002.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	255	Sampel	510.000
7024.QJC.U03.Sampel Surveilance Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	956	Sampel	899.154
7024.RAL.001.Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	69.495	Unit	2.636.646

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7024.RAL.002.Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	107.122	Unit	1.724.656
7024.RAL.003.Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	3.185.430	Unit	962.000
7024.RAL.004.Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	15	Unit	1.500.000
7024.RAL.005.Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	1	Unit	12.000.000
7024.RBQ.001.Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	1	Unit	500.000
7941.QAB.001.Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	20	Lembaga	40.000
7941.QDC.001.Rekomendasi bidang lahan budi daya yang akan disertifikasi	1.000	Orang	300.000
7941.QDD.001.Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	3	Kelompok Masyarakat	750.000
7941.QEA.001.Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya	42	Orang	125.000
7941.QEA.002.Perindungan usaha budi daya skala kecil	333	Orang	1.000.000
7941.QEO.001.Sarana Budi Daya Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	12	Unit	18.000.000
7941.QEO.002.Sarana Budi Daya Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	50	Unit	12.500.000
7941.QEO.003.Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	440	Unit	105.100.000
7941.RBQ.002.Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	30	Unit	7.500.000
7941.RBQ.003.Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	1	Unit	750.000
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)			690.780.711
032.05.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			690.780.711
2350.QHD.001.Operasi Kapal Pengawas	75	Operasi	421.798.900
2350.QHD.002.Operasi Pesawat Patroli	120	Operasi	117.195.862
2350.QHD.003.Operasi Speedboat Pengawas	20	Operasi	11.200.000
2350.RAL.003.Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	10	Unit	10.000.000
2350.RBQ.001.Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	3	Unit	6.800.000
2350.RCG.001.Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	121	Unit	100.000.000
2352.QIC.001.Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	1.409	Lembaga	7.750.068
2352.QIC.002.Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	1.622	Lembaga	9.107.550
2352.RDS.001.Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1	Unit	3.928.331
2353.QDD.001. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	60	Kelompok Masyarakat	3.000.000
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)			103.500.000
032.06.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			103.500.000
2357.PBR.001.Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	5	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2357.PBR.003.Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	5	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
2357.PEE.001.Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	20	Kesepakatan	500.000
2357.PEH.003.Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	1	Promosi	900.000
2357.PEH.004.Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	2	Promosi	1.300.000
2357.PEH.005.Promosi Produk Rumput Laut Skala Internasional	1	Promosi	650.000
2357.PEH.006.Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan	1	Promosi	700.000
2357.QDI.001.Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	8	Industri	800.000
2357.QMA.001.Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	11	Data	1.650.000
2357.QMA.002.Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	11	Data	1.650.000
2358.QDG.001.Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah	3.020	Ukm	7.550.000
2358.QDG.002.Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	375	Ukm	750.000
2358.QDI.001.Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	650	Industri	1.300.000
5279.QDG.001.UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	100	Ukm	5.000.000
7025.QDH.001.Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	60	Badan Usaha	900.000
7025.RAL.001.Sarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	5.020	Unit	37.490.000
7025.RAL.002.Sarana Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Pemasaran	550	Unit	11.000.000
7025.RAL.004.Sarana Distribusi Logistik Produk KP	16	Unit	16.999.400
7026.QDB.001. Lembaga Usaha Kelautan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan Usaha	120	Lembaga	2.310.600
7026.QDG.002.Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina	3.650	Ukm	7.300.000
7026.QDG.003.UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan	750	UMKM	1.500.000
Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK)			1.249.910.000
032.07.FD.Program Kualitas Lingkungan Hidup			43.750.000
2362.PBW.001.Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	3	Rekomendasi Kebijakan	550.000
2362.PBW.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan Biota Perairan dan Genetik	4	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000
2362.PBW.003.Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	2	Rekomendasi Kebijakan	200.000
2362.PBW.004.Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	2	Rekomendasi Kebijakan	100.000
2362.PBW.005.Rekomendasi Pengelolaan Karbon Biru Berbasis Kinerja	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2362.PCA.001.Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	2	Produk	450.000
2362.PCA.002.Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	5	Produk	2.625.000
2362.PEE.001.Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	2	Kesepakatan	225.000
2362.PFA.001.Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem	1	NSPK	100.000
2362.PFA.002.Dokumen NSPK Konservasi Biota Perairan	1	NSPK	400.000
2362.RAL.001.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	1	Unit	100.000
2362.RAL.002.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	2	Unit	400.000
2362.REA.002.Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	19.100.000	Hektar	2.875.000
2362.REA.004.Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	10.000.000	Hektar	30.000.000
2362.REA.005.Terumbu Karang yang direhabilitasi	1	Hektar	100.000
2362.REB.001.Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	25	Spesies	725.000
2362.REB.002.Penanganan Biota Perairan Dilindungi dan atau Terancam punah	12	Spesies	800.000
2362.REB.003.Penanganan Biota Perairan Jenis Asing Invasif	2	Spesies	200.000
2362.REB.004.Penanganan Konflik Biota Perairan	4	Spesies	900.000
2362.SCC.002.Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	25	Orang	200.000
2362.SCC.003.Aparatur Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang ditingkatkan kompetensinya	20	Orang	200.000
2362.SCC.004.Masyarakat Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Orang	300.000
4346.PBW.002.Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
4346.SCC.001.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	100	Orang	400.000
032.07.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.206.160.000
2363.PBW.002.Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000
2363.PBW.003.Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	10	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
2363.PBW.004.Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.007.Rekomendasi pengelolaan BMKT	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.008.Rekomendasi Kebijakan Berusaha Sumber Daya Kelautan	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2363.PBW.009.Rekomendasi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan	1	Rekomendasi Kebijakan	50.000
2363.PEE.002.Jejaring, Kemitraan, Kerjasama Pergaraman	1	Kesepakatan	1.000.000
2363.PFA.002.Dokumen NSPK Sumberdaya Kelautan	3	NSPK	750.000
2363.QDD.001.Korporasi Petambak Garam	3	Kelompok Masyarakat	3.000.000
2363.RBO.002.Revitalisasi Lahan Garam	1.500	Hektar	883.000.000
2363.RBQ.001.Prasarana Usaha Garam	20	Unit	300.000.000
2363.SCC.002.Masyarakat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	20	Orang	50.000
2363.SCC.003.Masyarakat dan Pengelola BMKT yang Ditingkatkan Kompetensinya	20	Orang	50.000
2363.SCC.004.Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya	100	Orang	2.500.000
2365.PBW.001.Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	5	Rekomendasi Kebijakan	400.000
2365.PBW.002.Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1	Rekomendasi Kebijakan	880.000
2365.PFA.002.Dokumen NSPK Pemanfaatan dan Pengendalian Pulau-Pulau Kecil	1	NSPK	380.000
7942.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.002.Rekomendasi pengelolaan wisata bahari	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.003.Rekomendasi Pengelolaan bangunan dan instalasi di laut	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.004.Rekomendasi perdagangan karbon sektor kelautan	5	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.005.Rekomendasi Berusaha Jasa Bahari	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PFA.001.Dokumen NSPK Jasa Bahari	1	NSPK	500.000
Ditjen Pentaan Ruang Laut (DJPRL)			103.610.342
032.08.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			103.610.342
7943.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	2	Rekomendasi Kebijakan	2.462.500
7943.PBW.002.Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	4	Rekomendasi Kebijakan	4.925.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7943.PBW.004.Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	2	Rekomendasi Kebijakan	2.462.500
7943.PBW.007.Rekomendasi Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	1	Rekomendasi Kebijakan	1.900.000
7943.PBW.010.Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
7943.PEE.002.Insiasi Kerja Sama Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1	Kesepakatan	500.000
7943.PFA.001.Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Perairan	3	NSPK	1.000.000
7943.PFA.002.Dokumen NSPK Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil	1	NSPK	500.000
7943.QMA.001.Data dan Informasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional	1	Dokumen	800.000
7943.QMA.002.Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1	Dokumen	300.000
7943.RAL.001.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Nasional	2	Unit	355.224
7943.RAL.002.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Unit	400.000
7943.SCC.002.Peningkatan Kapasitas SDM Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50	Orang	300.000
7943.UBA.001.Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	7	Provinsi	2.086.876
7944.PBT.002.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Berusaha	550	Rekomendasi Kebijakan	3.750.000
7944.PBT.003.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Non Berusaha	55	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
7944.PBT.004.Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Daerah	37	Rekomendasi Kebijakan	15.200.000
7944.PBT.005.Rekomendasi Kebijakan Layanan Prapendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	150	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000
7944.PBT.006.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Data Lapangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	50	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
7944.PBT.010.Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	250	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000
7944.PBT.011.Rekomendasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	50	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000
7944.PFA.001.Dokumen NSPK Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	3	NSPK	1.500.000
7944.RAN.001.Sistem Tata Kelola Pelayanan Perizinan	1	Unit	5.000.000
7944.SCC.001.Aparatur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	Orang	1.500.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7945.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KAW	2	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.002.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KSN	4	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.003.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Perairan Pesisir	5	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.004.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut Nasional	1	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.005.Rekomendasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Perencanaan Ruang Laut	1	Rekomendasi Kebijakan	750.000
7945.PFA.001.Dokumen NSPK Standarisasi Penataan Ruang Laut	2	NSPK	659.645
7945.QMA.001.Data dan Informasi Publik terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	4	Dokumen	1.200.000
7945.RAL.002.Ocean Monitoring System - LAUTRA	1	Unit	20.000.000
7945.RAN.001.Sistem Monitoring Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	2	Unit	1.000.000
7945.SCC.001.ASN Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	150	Orang	1.800.000
7945.SCC.002.Stakeholder Kelautan Perikanan (Non ASN) Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	Orang	500.000
7945.SCC.003.Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi dalam Pengelolaan Ruang Laut	60	Orang	1.000.000
7946.PBT.001.Rekomendasi Pengendalian KKPRL	1.100	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
7946.PBT.002.Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut	20	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
7946.PBT.005.Rekomendasi Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi	12	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
7946.PBT.006.Rekomendasi Tata Kelola Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Tidak Berizin	17	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
7946.PBT.007.Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	8	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7946.PFA.001.Dokumen NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	2	NSPK	508.597
7946.RAL.001.Sarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	20	Unit	500.000
7946.RAN.001.Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	3	Unit	600.000
7946.SCC.001.Aparatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	150	Orang	600.000
7946.UBA.001.Pemerintah Daerah yang Difasilitasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)			263.668.436
032.12.DL.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			263.668.436
2375.RAL.711.Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	3	Paket	19.679.145
2375.RBQ.721.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	4.551.121
2375.SCC.831. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	23.465	Orang	33.373.103
2376.PDE.541.Akreditasi Lembaga dan/atau Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	19	Lembaga	235.000
2376.PDI.545.Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	52	Orang	235.000
2376.QGC.671.Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	16	Lembaga	3.000.000
2376.RAA.711.Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3	Paket	28.446.275
2376.RAN.715.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Paket	50.000
2376.RBI.721.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	50.000
2376.RBJ.725.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Unit	5.140.032
2376.SAC.811.Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	5.837	Orang	134.765.500
2376.SDC.843.IlmU Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang Diterapkan kepada Masyarakat	20	Model	400.000
7020.QDB.646.Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan	1	Lembaga	150.000
7020.QDD.646.Kelompok Pelaku Usaha/Utama yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	40.100	Kelompok Masyarakat	21.043.260
7020.QKA.696.Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	1	Laporan	100.000
7020.RAL.716.Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Paket	50.000
7020.RBQ.726.Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	50.000
7020.SDC.846.Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang Diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan	4	Model	750.000
7948.PAH.512.Standard Kompetensi Profesi yang Disusun Bidang Kelautan dan Perikanan	2	Peraturan	200.000
7948.PDI.542.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	7.500	Orang	10.800.000
7948.RAL.712.Peralatan dan Mesin Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Paket	400.000
7948.RBQ.722.Gedung, Bangunan dan Prasarana Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	200.000
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)			225.900.000
032.13.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			225.900.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
3989.PDC.001.Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	5.000	Produk	1.750.000
3989.PDC.002.Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	5.000	Produk	7.550.000
3989.PDC.003.Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	95	Produk	200.000
3989.PDF.001.Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	1.500	Lembaga	1.750.000
3989.PDF.002.Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	1.500	Lembaga	4.500.000
3989.QIA.001.Hasil Perikanan di wilayah RI sektor produksi pasca panen yang diawasi mutunya	21	Produk	340.000
3989.QIA.002.Hasil Perikanan di wilayah RI sektor produksi primer yang diawasi mutunya	10	Produk	500.000
3989.QIA.003.hasil perikanan impor yang diawasi mutunya	5	Produk	160.000
3989.QIC.002.Unit usaha produksi pasca panen yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	1.080	Lembaga	550.000
3989.QIC.003.unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	200	Lembaga	200.000
3989.RAL.001.Sarana Pengujian Mutu	46	Unit	147.500.000
3989.RBQ.001.Prasarana Pengujian Mutu	13	Unit	39.700.000
7010.PBR.001.Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	39	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000
7010.PBR.002.Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	15	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000
7010.PDD.001.Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1	Lembaga	100.000
7010.PDD.002.Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	40	Lembaga	1.600.000
7010.PDD.003.Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	27	Lembaga	400.000
7010.QDC.001.Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	1.000	Orang	15.000.000
7010.QIA.001.Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	10	Produk	300.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.			37.000.000
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)			37.000.000
032.06.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			37.000.000
2357.PEH.001.Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)	200	Promosi	37.000.000
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.			29.950.000
Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB)			29.500.000
032.04.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			29.500.000
7021.QED.001.Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	62.231	Unit	4.500.000
7021.QEG.001.Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	200	Unit	10.000.000
7021.QEG.002.Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	1	Unit	5.000.000
7021.RBQ.002.Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun	1	Unit	10.000.000
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)			450.000
032.06.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			450.000
2357.PEE.002.Kerjasama Pemasaran Rumput Laut	10	Kesepakatan	250.000
2357.QDI.002.Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	2	Industri	200.000
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			1.090.000
Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK)			1.090.000
032.07.FD.Program Kualitas Lingkungan Hidup			790.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
4346.PBW.001.Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
4346.PBW.003.Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000
4346.PEE.002.Jejaring, Kemitraan dan Kerjasama Restorasi Kawasan Pesisir	1	Kesepakatan	240.000
4346.QDD.002.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	1	Kelompok Masyarakat	125.000
4346.QDD.003.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	1	Kelompok Masyarakat	125.000
032.07.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			300.000
2365.QDD.001.Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	1	Kelompok Masyarakat	150.000
2365.QDD.003.Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1	Kelompok Masyarakat	150.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ini, sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor prioritas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, tidak hanya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam keberlanjutan sumber daya alam dan pembangunan yang inklusif. Sektor ini memainkan peran strategis dalam mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, serta sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sesuai mandat dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, mandat Asta Cita ke-7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” dengan sasaran utama yaitu terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani serta Misi ke-4 Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, maka disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Renstra Setjen) KKP Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Setjen KKP.

Dokumen Renstra Setjen KKP 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Setjen KKP. Renstra Setjen KKP 2025-2029 kiranya dapat menjadi acuan bagi setiap unit organisasi eselon II di lingkup Setjen KKP dalam melaksanakan rencana kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

1.1 Kondisi Umum

Sebagai langkah awal dalam merancang strategi Renstra Setjen KKP 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan evaluasi terhadap kondisi umum yang menggambarkan kinerja organisasi. Evaluasi tersebut difokuskan pada pencapaian Renstra Setjen KKP periode sebelumnya guna menilai tingkat keberhasilan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

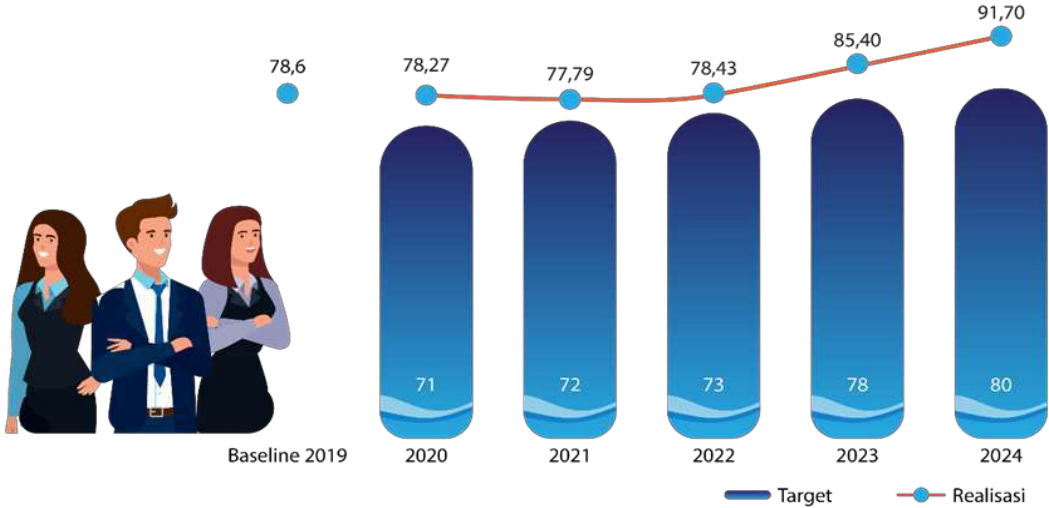
1.1.1. Capaian Kinerja Setjen KKP

Secara rinci capaian kinerja Setjen KKP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Indeks Reformasi Birokrasi KKP

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan ukuran perkembangan implementasi RB di KKP. Komponen RB terbagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi RB general dan RB tematik. Dimensi RB General (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: 1) komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas subkomponen kualitas rencana aksi dan subkomponen implementasi rencana aksi; 2) komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 (delapan belas) indikator; serta 3) capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 7 (tujuh) indikator. Sedangkan dimensi RB tematik (bobot 10) diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu penggunaan produk dalam negeri, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting.

Selama periode 2020-2024, realisasi nilai kinerja RB menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara konsisten berada di atas target yang ditetapkan dalam Renstra KKP 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan capaian nilai RB selama periode tersebut mencapai 4,04% per tahun, tetap positif dan melampaui target. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 91,70, atau setara dengan 114,63% dari target tahun 2024 sebesar 80.



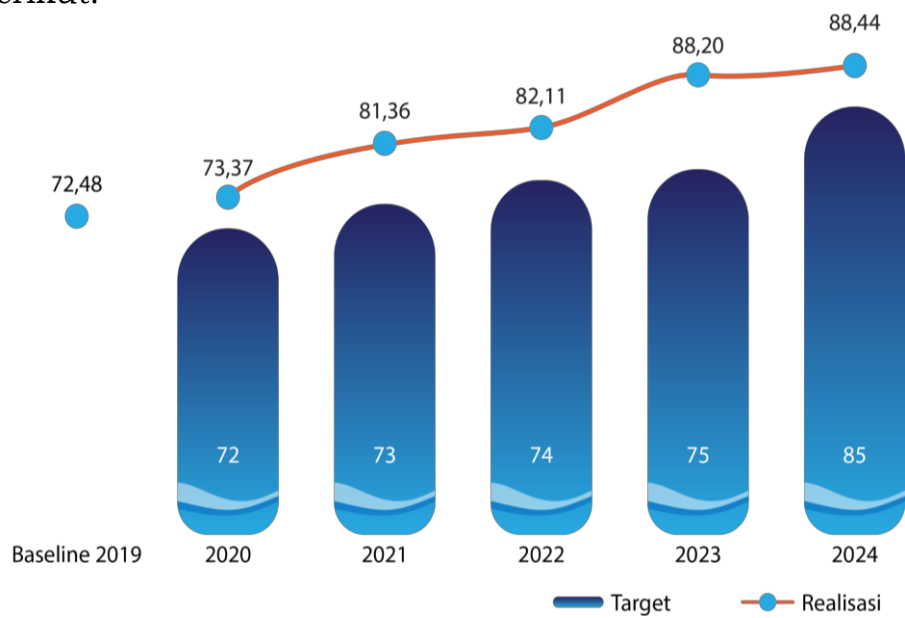
Gambar 1. Capaian Indeks RB KKP Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), 2024

Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Indeks RB: (a) berkoordinasi dengan unit organisasi yang menjadi koordinator indikator utama RB General dan RB Tematik untuk mengidentifikasi penyesuaian, (b) penyusunan dan pengesahan rencana aksi RB General dan RB Tematik yang selaras dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, (c) optimalisasi pelaksanaan rencana aksi yang belum terlaksana untuk dilanjutkan pada periode selanjutnya, dan (d) mendorong pelaksanaan pemenuhan rencana aksi RB general dan RB tematik.

b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara lingkup KKP

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) lingkup KKP adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, yang diukur setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN KKP dilakukan pengukuran secara semesteran dengan target Tahun 2024 sebesar 85 (kategori tinggi). Berdasarkan hasil penilaian tahun 2024, IP ASN KKP Tahun 2024 mencapai 88,44 (kategori tinggi) yang terdiri dari dimensi kualifikasi mencapai 21,23, dimensi kompetensi mencapai 36,53, dimensi kinerja mencapai 25,70, dan dimensi disiplin mencapai 4,94. Adapun capaian IP ASN KKP tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Capaian IP ASN Lingkup KKP Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Selama periode 2020-2024, realisasi IP ASN lingkup KKP menunjukkan tren positif berada di atas target yang ditetapkan dalam Renstra KKP 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan realisasi IP ASN KKP selama periode tersebut mencapai 4% per tahun, tetap positif dan melampaui target. Capaian tertinggi

terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 88,44, atau setara dengan 104,05% dari target tahun 2024 yang sebesar 85.

Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IP ASN KKP antara lain: (1) sosialisasi target IP ASN, (2) *monitoring* capaian IP ASN secara berkala, (3) monitoring dan evaluasi melalui *dashboard* pengukuran IP ASN secara *real time*, (4) peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin di masing-masing unit organisasi, (5) peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan, (6) penyampaian informasi secara intensif mengenai pemenuhan nilai per dimensi di setiap Unit Organisasi Eselon I, (7) koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait informasi terbaru pengukuran IP ASN, dan (8) koordinasi intensif dengan pengelola IP ASN terkait informasi pengukuran IP ASN di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

c. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan aktivitas manajemen informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan reputasi pemerintah dan mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan dan program pemerintah. Pengukuran Indeks PIKP yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (saat ini Kementerian Digitalisasi dan Komunikasi) mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi publik baik satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah. Indeks ini tidak saja melibatkan responden unit pelayanan informasi dan komunikasi publik pada instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, tetapi juga masyarakat. Indeks PIKP disusun berdasarkan konsep manajemen komunikasi kehumasan serta pengaturan agenda. Setidaknya ada 4 (empat) dimensi yang diukur dalam rangka menentukan Indeks PIKP yaitu dimensi input, proses, *output*, dan *outcome*.

Indeks PIKP KKP menjadi indikator kinerja utama Setjen KKP sejak tahun 2023. Dari tahun 2023 sampai dengan 2024, realisasi Indeks PIKP KKP mengalami kenaikan sebesar 11% dengan capaian di 2024 sebesar 97,14 atau setara dengan 102,25% dari target tahun 2024 yang sebesar 95. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, yaitu: (1) pemantauan media sosial (*twitter/X*, *instagram*, *facebook*, *tiktok*, dan *youtube*), (2) pemantauan media massa (pemberitaan di media *online*, media cetak, dan media TV), (3) konferensi pers dan siaran pers, (4) Bincang Bahari, (5) produksi *podcast* “Segara”, produksi KKP News, produksi Majalah Si Mila, produksi Majalah Segara, produksi video pendek, publikasi konten di media sosial KKP, (6) penyusunan bahan investigasi isu, dan (7) survei persepsi masyarakat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan konsultan komunikasi serta produksi video dokumenter.

d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan nilai yang diukur atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai dan menghasilkan rekomendasi peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Penilaian dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh

Kementerian Keuangan atas perencanaan anggaran melalui laman <https://monev.kemenkeu.go.id>. NKPA dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Capaian NKPA KKP Tahun 2024 adalah 87,18 dari target 82,00, dengan persentase pada efektivitasnya memperoleh 88,86 pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), sebesar 94,99 pada Indikator Kinerja Program (IKP), dan Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 97,04. Perolehan pada komponen efisiensi penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) mencapai sebesar 90,17 dan efisiensi SBK mencapai sebesar 52,25. NKPA adalah indikator baru pada tahun 2024 sebagai penyesuaian dari indikator kinerja sebelumnya, yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP. NKPA belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena baru diimplementasikan pada tahun 2024 dengan metode perhitungan yang berbeda.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja antara lain: koordinasi dengan unit organisasi eselon I untuk dapat mengoptimalkan kinerja sehingga dapat mendorong NKPA KKP, pendampingan pelaporan target dan realisasi data capaian *output* pada aplikasi SAKTI dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan NKA di lingkungan KKP. Upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain optimalisasi sarana koordinasi dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi *zoom meeting*. Langkah optimalisasi sarana komunikasi digital ini diyakini dapat menghemat anggaran secara efisien.

e. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

Sejak tahun 2023, indikator nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP mulai dilakukan penilaian oleh Pusat Data dan Informasi selaku tim penilai internal KKP. Penilaian dilakukan terhadap usulan proposal inovasi pelayanan publik yang diterima dari seluruh unit organisasi di KKP.

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/51/S.PP.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pengumuman KIPP 2024, bahwa Kementerian PAN dan RB meniadakan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024, dan akan menyelenggarakan pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi. Namun demikian, penyelenggaraan KIPP di lingkup KKP akan tetap dilaksanakan. Mekanisme penyelenggaraan KIPP di lingkup KKP merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

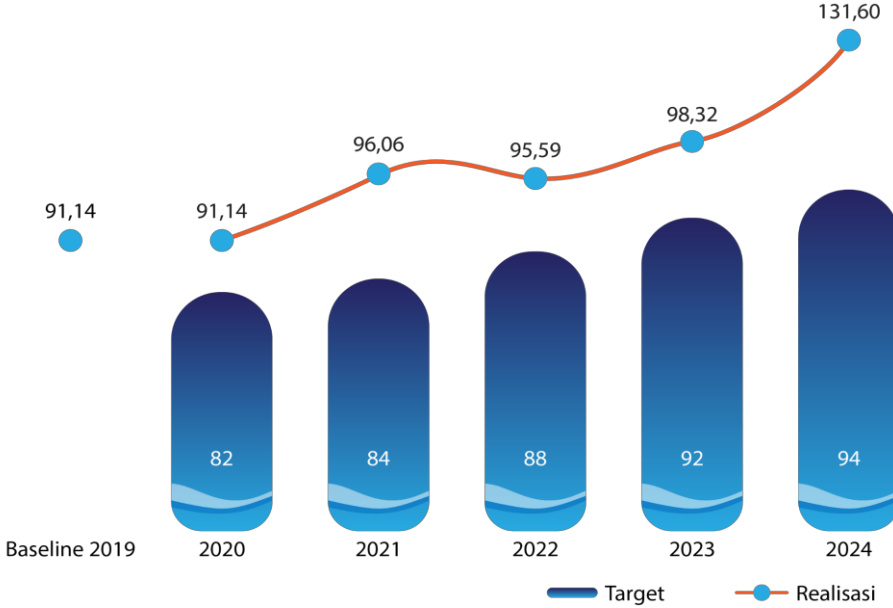
Realisasi nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP tahun 2024 adalah senilai 80,78 dari target sebesar 76 atau telah mencapai 106,3%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 82,93%, realisasi di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,59%. Namun apabila dilihat dari jumlah proposal inovasi yang diajukan oleh unit organisasi eselon I mengalami kenaikan yaitu di tahun 2023 sebesar 28 proposal menjadi 61 proposal di tahun 2024. Peningkatan jumlah proposal yang dinilai pada tahun 2024 ini dikarenakan terdapat target untuk menghasilkan ide yang lebih banyak dari berbagai unit layanan publik,

dengan lebih banyaknya proposal diharapkan dapat meningkatkan ditemukan ide yang lebih bervariasi untuk di jadikan inovasi unggulan KKP di kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025. Meskipun hal ini mengakibatkan penurunan nilai, namun diharapkan para calon inovator dapat belajar sebelum mengikuti kompetisi yang lebih luas.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja antara lain: (1) penetapan tim penilai internal pelayanan publik lingkup KKP Tahun 2024, (2) sosialisasi inovasi pelayanan publik kepada seluruh unit organisasi, (3) penyampaian sertifikat hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik kepada 3 (tiga) inovasi terbaik melalui kegiatan silaturahmi nelayan nasional, (4) evaluasi kegiatan penilaian proposal inovasi pada tahun 2024, dan (5) koordinasi dengan unit organisasi eselon I lain terkait penyusunan proposal inovasi pelayanan publik.

f. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang mengukur pemanfaatan teknologi informasi dengan penilaian aspek keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *collaboration office*. Capaian indikator persentase unit organisasi yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup KKP tahun 2024 mencapai 131,60%, atau 140% dari target 2024 sebesar 94.



Gambar 3. Capaian Persentase Unit kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Selama periode 2020-2024, realisasi persentase unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup KKP

menunjukkan tren positif berada di atas target yang ditetapkan dalam Renstra KKP 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan realisasi persentase unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup KKP selama periode tersebut mencapai 8% per tahun. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 131.6, atau setara dengan 140% dari target tahun 2024 yang sebesar 94.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja ini antara lain: (1) komitmen pimpinan untuk melakukan berbagi pengetahuan melalui *collaboration office*, sehingga dapat berbagi pengetahuan dengan seluruh pegawai di lingkungan KKP, (2) melakukan pemantauan dan evaluasi capaian yang dilakukan secara berkala sehingga sebelum periode pengukuran capaian, (3) sosialisasi tentang penggunaan *collaboration office* yang dilakukan sehingga mempermudah pengguna aplikasi untuk berbagi informasi, dan (4) penyediaan layanan *help desk* di aplikasi *collaboration office* sehingga apabila ada kendala dan hambatan di aplikasi dapat langsung ditanyakan.

g. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Setjen KKP

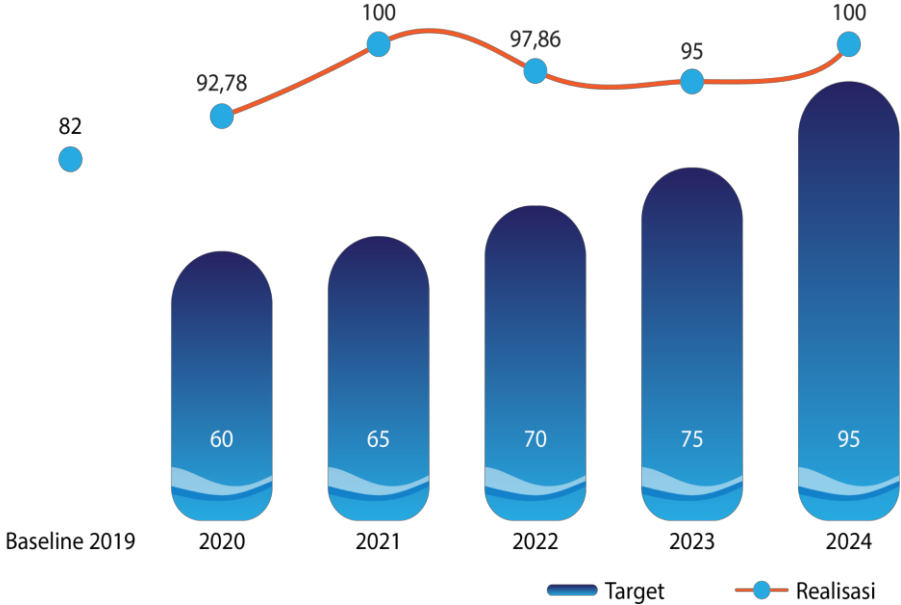
Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Setjen KKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas LK Tahun Anggaran (TA.) 2023 (*audited*) dengan target $\leq 0,5$, dengan realisasi sebesar 0,09 atau telah mencapai 182%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019-2023, batas tertinggi jumlah nilai temuan atas LK TA. 2023 semakin menurun dan hal ini merupakan hal positif mengingat capaian indikator ini bersifat *minimize* dimana semakin kecil semakin baik, meskipun apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 0,01 realisasi ini mengalami penurunan sebesar 0,08 poin.

Selama periode 2020-2024, persentase nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Setjen KKP masih terjaga di bawah batas tertinggi. Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan pengendalian temuan yang efektif dan konsisten dalam memenuhi target. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung melalui kegiatan antara lain: (1) melakukan pembahasan koreksi internal LK TA. 2023 (*audited*) di lingkungan KKP, (2) melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pemantauan penyampaian konsep temuan pemeriksaan dari tim BPK atas LK KKP TA. 2023, (3) melakukan pembahasan tindak lanjut konsep temuan pemeriksaan BPK TA 2023 di lingkungan KKP dan menyelenggarakan pembahasan tindak lanjut konsep temuan pemeriksaan, (4) melakukan pembahasan koreksi LK TA. 2023 (*audited*) lingkup KKP dengan Tim BPK, dan (5) melakukan koordinasi atas LHP LK TA. 2023.

h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen KKP

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Setjen KKP berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh unit organisasi eselon II di lingkup Setjen KKP. Objek capaian indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP adalah rekomendasi yang terbit pada LHP audit, reviu, dan evaluasi Inspektorat Jenderal. Penilaian capaian ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit organisasi eselon II di lingkup Setjen KKP secara tuntas dengan target capaian sebesar minimal 95% selama periode pengukuran.



Gambar 4. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen KKP Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Selama periode 2020-2024, rata-rata pertumbuhan capaian indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP sebesar 4,2%. Pola pertumbuhan fluktuatif ditunjukkan dengan peningkatan tajam di awal periode tahun 2020-2021, sedikit perlambatan pada tahun 2022-2023 namun kembali meningkat pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 mencapai 100% dari target sebesar 95% menunjukkan efektivitas pencapaian target yang tinggi karena dapat melampaui target yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) komitmen pimpinan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan perencanaan yang matang, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan yang berjenjang dan berkala serta menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal atas hasil reviu, audit dan lain-lain,

(2) pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, (3) koordinasi dengan Inspektorat I untuk penyelesaian rekomendasi serta menyusun *timeline* penyelesaian rekomendasi, (4) penyusunan rencana aksi penyelesaian rekomendasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati, serta (5) monitoring dan evaluasi terkait kendala dan kesulitan yang dihadapi serta membahas solusi terhadap LHP.

i. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Setjen KKP

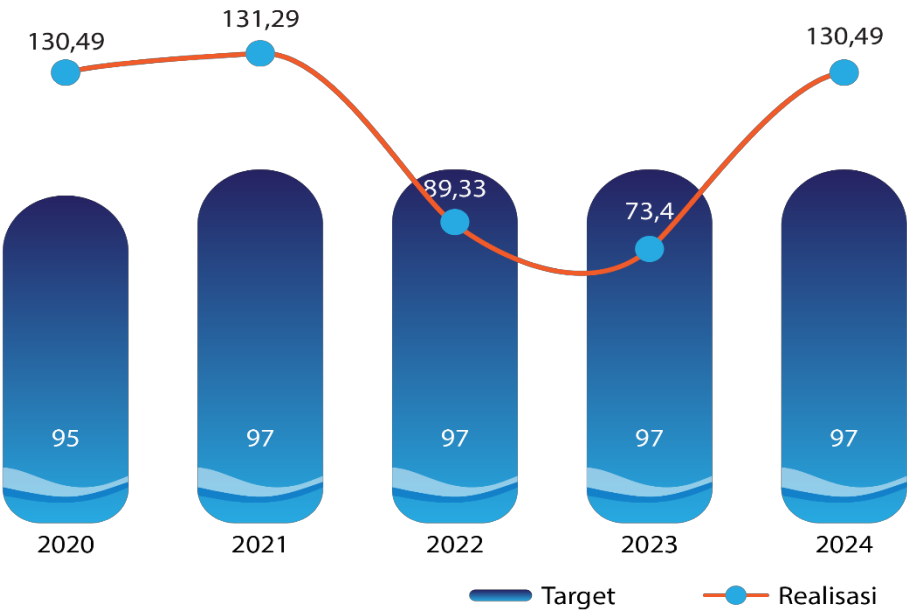
Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit organisasi yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit organisasi yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola internal unit organisasi dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit.

Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) unit organisasi yang dibangun menuju unit organisasi berpredikat menuju WBK lingkup Setjen KKP (Biro Perencanaan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Biro Humas dan KLN) dan 2 (dua) unit organisasi yang telah dinyatakan berpredikat menuju WBK di tahun sebelumnya (Pusdatin dan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa) sehingga target kumulatif pada perjanjian kinerja Setjen KKP Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) unit organisasi (kumulatif). 3 (tiga) unit organisasi yang menjadi target di Tahun 2024 tersebut, telah dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal serta telah dilakukan penilaian mandiri sebagaimana memo Kepala Biro Keuangan selaku Ketua Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM di Lingkungan Setjen KKP Nomor 118/SJ.2/TU.210/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan hasil penilaian sebagai berikut: 1) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi sebesar 83,97, 2) Biro Perencanaan sebesar 82,70, dan 3) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri sebesar 81,34. Selanjutnya penilaian tersebut dilanjutkan dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal yaitu Inspektorat V, dan ketiga unit organisasi tersebut dinyatakan lulus sebagai unit organisasi berpredikat menuju WBK Tahun 2024. Sampai dengan Tahun 2024, terdapat 5 (lima) unit organisasi berpredikat menuju WBK yaitu Biro Perencanaan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Biro Humas dan KLN, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dan Pusdatin.

Keberhasilan pencapaian indikator unit organisasi berpredikat menuju WBK lingkup Setjen KKP didorong oleh beberapa faktor diantaranya: komitmen pimpinan, internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK kepada seluruh pegawai yang dilakukan secara intensif, dan komitmen bersama seluruh pegawai.

j. Persentase Pencapaian Target Pendapatan Negara Bukan Pajak Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Persentase pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan pendapatan yang dikelola oleh BLU LPMUKP, yang berasal dari pendapatan layanan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan, dan pendapatan nonlayanan yang diperoleh dari hasil optimalisasi/pemanfaatan surplus kas dan/atau dana kelolaan dalam investasi jangka pendek berisiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam mendukung penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, BLU dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan yang dimasukkan sebagai pendapatan BLU.



Gambar 5. Capaian Persentase Target PNBPNBLU Layanan BLU LPMUKP Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Selama periode 2020–2024, capaian indikator persentase target PNB BP BLU LPMUKP menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, kinerja berada pada level sangat baik dengan capaian masing-masing 130,49% dan 131,29%, atau konsisten di atas 130% dari target. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan hingga 89,33%, yang kemudian berlanjut dengan penurunan lebih dalam pada tahun 2023 menjadi 73,4%. Meski demikian, kinerja kembali pulih pada tahun 2024 dengan capaian 130,49%, sehingga mengembalikan performa pada level lebih dari 130% dari target tahunan.

Perlambatan yang terjadi dalam pencapaian target PNB BP BLU LPMUKP dikarenakan beberapa hal berikut:

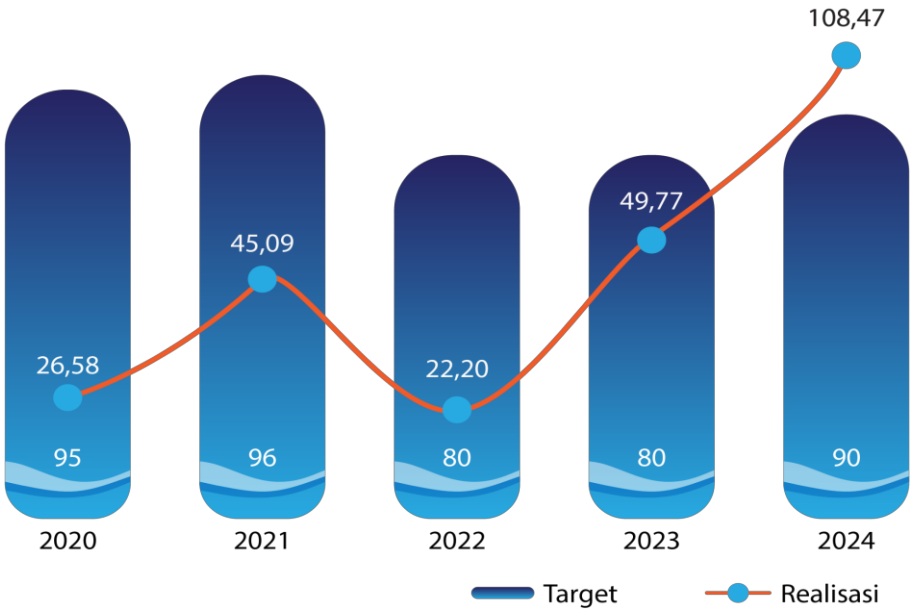
- a. terjadinya kegagalan pemenuhan kewajiban debitur akibat kegagalan usaha yang juga merupakan dampak dari pandemi covid-19 dimana terjadi kendala pada proses pemasaran hasil produksi debitur;
- b. terjadinya evaluasi pola dan skema penyaluran dana bergulir dalam rangka mensinergikan dan mendukung program prioritas KKP melalui pembiayaan dana bergulir, sehingga pada Tahun 2022 LPMUKP seiring dengan dilakukannya penyiapan skema penyaluran yang mendukung program prioritas KKP juga dilakukan moratorium penerimaan proposal baru dalam rangka menyelesaikan proses proposal yang telah diterima. Terdapat total proposal yang telah diterima sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 3.697 proposal dengan nilai usulan pembiayaan sebesar Rp1,37 Triliun. Namun setelah dilakukan analisis kelengkapan dan kelayakan proposal usulan pembiayaan dana bergulir tersebut, hanya sebanyak 419 proposal dengan nilai usulan pembiayaan sebesar Rp168,3 Miliar yang dinilai lengkap dan layak untuk dibiayai. Hal tersebut tentunya berdampak langsung terhadap penerimaan PNB BP yang bersumber dari provisi atas pencairan dana bergulir dimana pada tahun 2022 dari nilai usulan sebesar Rp168,30 Miliar yang telah layak untuk dibiayai, hanya sebesar Rp133,22 Miliar yang dicairkan; dan
- c. pada tahun 2023, Indikator Kinerja pada level satuan kerja disesuaikan dari yang semula menargetkan realisasi PNB BP secara keseluruhan (pendapatan layanan dan nonlayanan) menjadi fokus pada pendapatan yang bersumber hanya dari layanan utama yaitu dari jasa layanan dan jasa provisi. Selain itu, tahun 2023 merupakan tahun awal diimplementasikannya skema penyaluran dana bergulir yang mendukung program prioritas KKP yaitu kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan program kampung budi daya yang memberlakukan masa tenggang supaya debitur memiliki waktu untuk menyiapkan usaha yang akan dijalankan sampai dengan produksi. Dalam masa tenggang tersebut, debitur belum dibebankan pemenuhan kewajiban kepada LPMUKP baik dari pembayaran jasa layanan maupun pembayaran pokok. Dengan demikian, nilai pendapatan jasa layanan pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan pembiayaan baru pada Tahun 2023 yang termasuk dalam program PIT, dan kampung budi daya diberikan masa tenggang dimana untuk program PIT dalam menyiapkan kapal penangkapan ikan (≥ 30 GT) memerlukan waktu

pembuatan sekitar 6-8 bulan, sedangkan untuk persiapan kolam budi daya memerlukan waktu sekitar 3-6 bulan.

Kegiatan dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja antara lain, melakukan penagihan atas jasa layanan BLU secara berkala, mengoptimalkan penyaluran dana bergulir untuk mendukung program prioritas KKP, melakukan penagihan jasa layanan yang tertunggak secara langsung, mengirimkan *SMS blast* kepada para debitur LPMUKP.

k. Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP

Penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP merupakan program pembiayaan kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang difokuskan untuk mendukung program prioritas KKP. Proses pengajuan pinjaman dana bergulir dilakukan melalui beberapa proses tahapan seperti verifikasi kelayakan usulan pinjaman, komite pinjaman, persetujuan, akad, dan pencairan. Pelaksanaan pencairan dana bergulir pada program prioritas dilakukan secara bertahap dengan melihat kesiapan kondisi debitur untuk mengelola dana bergulir yang akan diberikan. Capaian persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%) Tahun 2020-2024 ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 6. Capaian Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Adapun rincian realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP Tahun 2020-2024

Tahun	Target Penyaluran (Rp)	Realisasi Penyaluran (Rp)	Jumlah Debitur	Jumlah Pemanfaat (orang)	Jumlah Kab/kota
2020	725.000.000.000	192.674.433.490	389	4.288	120
2021	600.000.000.000	270.553.725.000	1.074	7.089	244

Tahun	Target Penyaluran (Rp)	Realisasi Penyaluran (Rp)	Jumlah Debitur	Jumlah Pemanfaat (orang)	Jumlah Kab/kota
2022	600.000.000.000	133.229.750.000	626	1.879	191
2023	660.000.000.000	328.512.900.000	243	4.982	117
2024	470.000.000.000	509.830.181.125	146	5.697	95

Selama periode 2020-2024, rata-rata pertumbuhan capaian indikator persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP sebesar 65,3%. Pola pertumbuhan fluktuasi yang dinamis ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020-2021, namun realisasi sempat mengalami pelambatan di tahun 2022 dan realisasi kembali pulih dan terus meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 hingga mencapai 108,47% di tahun 2024 atau 120,52% dari target tahun 2024.

Perlambatan yang terjadi dalam pencapaian target persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP saling berkaitan dengan perlambatan yang terjadi dalam pencapaian target persentase realisasi PNPB BLU, dimana penyebab dari perlambatan persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP adalah sebagai berikut:

- terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang berdampak pada pembatasan aktivitas sosial termasuk kunjungan langsung ke lapangan dalam rangka verifikasi kelayakan usulan pembiayaan debitur, sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi LPMUKP dalam melakukan proses verifikasi dalam menilai usulan yang layak untuk dibiayai;
- evaluasi pola dan skema penyaluran dana bergulir dalam rangka mensinergikan dan mendukung program prioritas KKP melalui pembiayaan pada program PIT dan program kampung budi daya. Akibat dari adanya evaluasi tersebut, LPMUKP juga memberlakukan moratorium penerimaan proposal pada Tahun 2022 dalam rangka menyelesaikan proposal usulan pembiayaan yang telah diterima hingga Tahun 2022 dimana terdapat total 3.697 proposal senilai Rp1,37 Triliun. Setelah dilakukan analisis terhadap kelayakan dan kelengkapan proposal usulan pembiayaan, hanya terdapat 419 proposal dengan nilai total sebesar Rp168,30 Miliar yang dapat diproses sampai dengan pencairan. Hal tersebut mempengaruhi realisasi kinerja penyaluran dana bergulir pada tahun 2022; dan
- implementasi penyaluran dana bergulir yang mendukung program prioritas KKP pada kebijakan PIT dan program kampung budi daya dilakukan pada tahun 2023. Namun demikian, para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan sasaran penerima program penyaluran dana bergulir LPMUKP belum bisa menerima dan memahami terkait dengan program yang ditawarkan sehingga memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman terhadap program dimaksud. Hal ini berdampak pada perlambatan realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun 2023 yang mencapai 49,77%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan antara lain: melalui identifikasi dan pendampingan serta penilaian kelayakan usulan pinjaman, selalu berkoordinasi dengan calon

debitur, melaksanakan temu teknis untuk menumbuhkan pemahaman *stakeholder*. Selain itu, LPMUKP melakukan evaluasi pola penyaluran dana bergulir dan melakukan sinergi penyaluran dana bergulir yang mendukung program prioritas KKP.

1.1.2. Penghargaan dan Prestasi Setjen KKP

Selama tahun 2020-2024, Setjen KKP telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi Menteri atau Kepala Lembaga dalam melaksanakan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di tingkat K/L. Sebanyak lima kementerian dan lembaga terpilih menjadi lima instansi terbaik dalam pembudayaan Germas, yaitu KKP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BPOM, Kementerian Perhubungan, dan Bakamla. Penghargaan dari Presiden tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 14 November 2023.

b. Kategori Mentor Pada Penganugerahan Anugerah Parahita Ekapraya

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan K/L dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penganugerahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah disampaikan oleh K/L, Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot). Pada tahun 2023, dari 360 instansi (16 K/L, 28 Pemprov, dan 316 Pemkab/Pemkot) dalam evaluasi PUG, KKP memperoleh Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2023 dengan kategori Mentor yang merupakan kategori tertinggi.

c. Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Setiap tahun kinerja pengelolaan JDIH dinilai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum berdasarkan laporan tahunan yang disampaikan melalui aplikasi *e-report*.

Pada tahun 2022 JDIH KKP memperoleh penghargaan JDIH *Marves Awards* sebagai Pengelolaan Organisasi JDIH Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pada tahun 2023 JDIH KKP memperoleh penghargaan JDIH Awards sebagai Anggota JDIHN Terbaik V Kategori Kementerian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2024 JDIH KKP kembali memperoleh penghargaan JDIHN Awards sebagai

Anggota JDIHN Terbaik IV Kategori Kementerian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prestasi tersebut sebagai motivasi JDIH KKP untuk terus memberi pelayanan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat kepada seluruh pihak di sektor kelautan dan perikanan.

d. Penghargaan *Juristica Award* Tahun 2023 untuk JDIH KKP

KKP meraih penghargaan *Juristica Awards* tahun 2023 dengan kategori JDIH dengan pemanfaatan TIK terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Kepala Biro Hukum KKP pada acara Rapat Koordinasi Hukum Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

e. Badan Kepegawaian Negara Award

Badan Kepegawaian Negara (BKN) *Award* merupakan penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN. Adapun penilaian BKN Award tahun 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 1) Kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik, 2) Kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan *Computer Assisted Test* (CAT), dan 3) Kategori *special mention* yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. KKP dalam BKN Award 2023 memperoleh penghargaan Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN Pengembangan Kompetensi untuk Kementerian Tipe Besar, Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja untuk Kementerian Tipe Besar.

f. Penghargaan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan KKP

KKP berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit organisasi untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Termasuk dalam pelaksanaan program-program ekonomi biru untuk mentransformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

g. Prestasi Bidang Kearsipan dengan Nilai AA (Sangat Memuaskan)

KKP terus memperbaiki tata kelola kearsipan agar lebih mudah, cepat, diakses pengguna melalui perencanaan program dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan yang menangani bidang tersebut. Perencanaan program pengelolaan kearsipan meliputi identifikasi arsip tercipta, pemberkasan arsip, penataan arsip, penyusunan daftar arsip aktif

dan inaktif, penyusutan arsip, serta penyediaan sarana dan prasarana kearsipan. Kemudian pemenuhan SDM aparatur kearsipan sesuai dengan rekomendasi yang telah disetujui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan disampaikan ke Kementerian PAN dan RB sejumlah 621 orang dari berbagai jenjang, saat ini baru terisi 108 pejabat fungsional arsiparis. KKP juga telah melakukan pengisian dokumen instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal yang dikeluarkan oleh ANRI dalam rangka penilaian kearsipan tahun 2023, dan unit organisasi telah melengkapi data dukung sehingga nilai pengawasan kearsipan meningkat dari tahun sebelumnya. Terhitung sejak tahun 2018, sudah lima kali KKP menyerahkan arsip statis ke lembaga ANRI. Terbaru penyerahan 207 nomor arsip statis meliputi Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, dan Surat Izin Usaha Perikanan dengan kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2015. Penyerahan arsip itu untuk mendukung pengembangan literasi di bidang kelautan dan perikanan serta kemaritiman, dan memberikan informasi berharga kepada masyarakat yang membutuhkan.

h. Penghargaan Penyelamatan Arsip Statis dari Arsip Nasional Republik Indonesia

KKP kembali menerima penghargaan penyelamatan arsip statis dari ANRI. Sedikitnya ada tiga Piagam Penghargaan dalam rangka Penyelamatan Arsip tersebut. Penghargaan pertama yaitu, Arsip Statis Kemaritiman KKP berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/4964/2023, tanggal 1 November 2023, hal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diserahkan sebanyak 55 (lima puluh lima) berkas arsip. Penghargaan kedua yaitu Arsip Statis Hasil Penelitian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/4658/2023, tanggal 17 Oktober 2023, hal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis yang telah diserahkan sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) berkas arsip. Penghargaan ketiga yaitu penyerahan 13 (tiga belas) berkas Arsip Statis Eks Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/5579/2023, tanggal 29 November 2023, hal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis.

i. Predikat A atas Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2020-2024 oleh Kementerian PAN dan RB

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB nomor B/641/AA.05/2024, tanggal 19 Desember 2024, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, hasil capaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja KKP Tahun 2024 sebesar 84,01 dengan predikat A atau mengalami kenaikan 0,36 poin dibandingkan Tahun 2023 sebesar 83,64. Hal tersebut menunjukkan bahwa KKP dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

j. Penghargaan Outstanding Procurement Performance

Pada tahun 2024, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KKP melalui Kelompok Kerja Pemilihan kembali meraih 2024 *Project Implementation Award* dari *Asian Development Bank* (ADB) atas kinerja pengadaan pada kegiatan *Loan 4283-INO: Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project*. Penghargaan ini diberikan kepada KKP untuk kategori *Outstanding Procurement Performance*, sebagai bentuk pengakuan internasional atas pencapaian kinerja pengadaan yang dinilai efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar tata kelola terbaik.

k. Bhumandala Award

KKP sebagai salah satu Simpul Jaringan Informasi Geospasial Telah telah mengikuti seluruh tahapan penilaian Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial. Menurut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), simpul jaringan merupakan sebuah unit organisasi /teknis yang mengelola informasi geospasial dalam instansi atau lembaga tertentu, dan akan dievaluasi pelaksanaannya untuk memastikan tujuan jaringan ini tercapai dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Melalui *Bhumandala Award*, K/L yang menjadi simpul jaringan akan dievaluasi kinerjanya oleh Badan Informasi Geospasial sebagai pembina data geospasial nasional dan juga sebagai penghubung simpul jaringan nasional. Pada tahun 2024, KKP mendapatkan 3 (tiga) kategori *Bhumandala Award* yaitu: 1) Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan: Kanaka (Medali Emas), 2) Bhumandala penyelenggaraan informasi geospasial tematik: Ariti (Medali Perunggu); dan 3) Bhumandala Penyelenggaraan Nama Rupabumi: Ariti (Medali Perunggu).

l. Kategori Sangat Baik pada Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*). Hasil pengukuran IKK Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada penilaian yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali yaitu pada tahun 2021, nilai IKK tercatat sebesar 33,34 dengan kategori Kurang, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 83,94 dengan kategori Sangat Baik. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan substansial dalam aspek perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Hasil ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat KKP dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas kebijakan publik di sektor kelautan dan perikanan.

m. Penghargaan Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian reformasi hukum pada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. IRH menilai berbagai aspek, antara lain perumusan regulasi, kepatuhan terhadap prinsip hukum

yang baik, efektivitas implementasi, serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Penilaian ini menjadi acuan penting dalam mendorong kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan reformasi hukum. KKP berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam Penilaian IRH. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-12.OT.03.01 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024, KKP menempati peringkat Terbaik II tingkat Kementerian dengan nilai 100 kategori AA (Istimewa). Prestasi ini menunjukkan konsistensi KKP dalam menerapkan reformasi hukum secara efektif dan komitmen kuat KKP dalam membangun tata kelola hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

n. Penyelamatan Keuangan Negara dalam Gugatan Perkara Persidangan

Penyelamatan keuangan negara dalam 7 (tujuh) gugatan perkara persidangan yang telah *inkracht*/memiliki kekuatan hukum tetap mencapai lebih dari Rp4,3 Triliun untuk Tahun 2023, dan 7 (tujuh) gugatan *inkracht* yang mencapai Rp1,7 Triliun untuk Tahun 2024. Dengan demikian potensi pengeluaran negara yang berhasil dicegah sebesar Rp6 Triliun

o. Predikat Sangat Baik pada Anugerah Meritokrasi

KKP telah dua kali mendapatkan anugerah meritokrasi dengan predikat sangat baik. Pada tahun 2019 pertama kali anugerah diselenggarakan KKP mendapatkan nilai 361, indeks 0,8 melalui Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 04 Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2021, KKP juga mendapatkan anugerah meritokrasi dengan sangat baik dengan nilai 390,5 dan Indeks 0,95 melalui Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 99 Tahun 2021 dan pada tahun 2023 KKP juga mendapatkan anugerah Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 393 dan Indeks 0,96 melalui Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 162 Tahun 2023. Peningkatan rerata nilai sistem merit menunjukkan komitmen KKP secara berkelanjutan menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN.

p. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 dari Kementerian Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, KKP berhasil meraih peringkat Juara Kedua dalam Anugerah Reksa Bandha 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, pada Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan yang diserahkan atas dasar perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK pada LK tahun 2023 serta kemampuan KKP dalam melaksanakan pemanfaatan terhadap BMN yang berada pada lingkup KKP sehingga dapat menghasilkan PNPB yang optimal.

q. Peringkat ke-1 pada Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024

KKP menempati Peringkat 1 dari total 67 (enam puluh tujuh) K/L untuk Indeks PIKP Tahun 2024, dengan nilai Dimensi Input 99,91 (Sangat Baik) dan

Dimensi Proses 94,36 (Sangat Baik). Pengukuran indeks PIKP ini dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yang dilaksanakan oleh K/L.

r. Predikat Sangat Baik pada Penilaian Indeks SPBE KKP

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, Indeks SPBE KKP Tahun 2024 sebesar 3,99 dengan predikat Sangat Baik mengalami peningkatan sebesar 11,45% dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 3,58. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh KKP adalah pada penerapan aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, aspek Perencanaan Strategis SPBE, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, aspek Penyelenggara SPBE, aspek Penerapan Manajemen SPBE, aspek Pelaksanaan Audit TIK, aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

s. Level Proaktif pada Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) unit organisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian ITKP mencakup pemanfaatan sistem pengadaan (30%), kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur PBJ (30%), dan tingkat kematangan UKPBJ (40%). Capaian ITKP KKP Tahun 2024 sebesar 85,10 atau level proaktif, capaian ini lebih besar dari rata-rata capaian K/L/P/D sebesar 65,82.

t. Predikat Baik pada Penilaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

Pencapaian sasaran RB Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi instansi pusat, pemerintahan daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Penilaian Indeks Statistik Sektoral mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Nilai Statistik Sektoral KKP Tahun 2024 adalah 2,73 dengan predikat 'Baik'. Kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan dan pendataan produksi kelautan dan perikanan.

u. Kategori A (Kualitas Tertinggi) pada Penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP oleh Ombudsman

Penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP oleh Ombudsman dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi

penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Maksud dari penilaian ini yaitu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, prasarana sarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengaduan. Berdasarkan Surat Ketua Ombudsman Nomor R/3667/PC.02/XI/2024, tanggal 6 November 2024, hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik KKP Tahun 2024 yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan KKP memperoleh nilai 90,15 (zona hijau) dengan kategori A (kualitas tertinggi).

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan yang memengaruhi tugas serta fungsi Setjen KKP sangat penting untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi organisasi dalam Renstra Setjen KKP Tahun 2025–2029. Potensi mencerminkan kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan dukungan manajemen. Sementara itu, permasalahan menggambarkan isu-isu strategis yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Setjen KKP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

1.2.1 Potensi

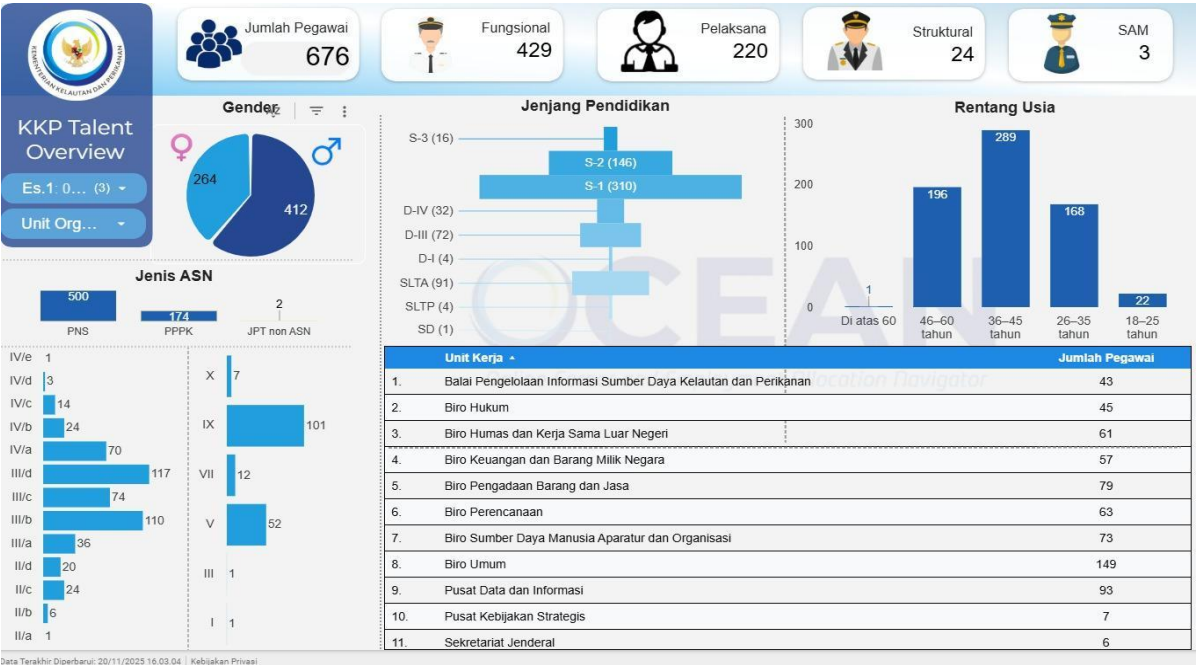
Potensi yang dimiliki Setjen KKP merupakan fondasi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi KKP pada periode 2025–2029. Kapasitas SDM aparatur yang kompeten, kemajuan transformasi digital, semakin terbangunnya integrasi perencanaan dan penganggaran, penataan kelembagaan serta kemampuan dalam mengoordinasikan sinergi lintas sektor menjadi modal utama untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan strategis KKP. Selain itu, peran Setjen KKP sebagai pusat koordinasi, pengendali kebijakan, dan penggerak reformasi birokrasi memberikan nilai tambah yang signifikan dalam memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan KKP. Seluruh potensi ini menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Adapun potensi yang dimiliki Setjen KKP adalah sebagai berikut:

a. Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur yang Unggul dan Profesional

Setjen KKP memiliki SDM aparatur yang kompeten dan berpengalaman di berbagai bidang strategis, seperti perencanaan, keuangan, hukum, dan kebijakan publik. Keberadaan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, analis kebijakan, serta analis hukum yang profesional menjadi keunggulan tersendiri dalam mendukung proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Kompetensi aparatur juga diperkuat oleh penerapan sistem tata kelola SDM aparatur terintegrasi melalui portal kepegawaian yang terhubung dengan Sistem

Informasi ASN, sehingga pengelolaan data dan kinerja pegawai dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan *real-time*.

Berdasarkan data profil SDM aparatur Setjen KKP, komposisi pegawai menunjukkan potensi yang kuat dan seimbang untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Dari total 676 (enam ratus tujuh puluh enam) pegawai, yang terdiri atas pegawai berstatus PNS sebanyak 500 (lima ratus) orang (73,96%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) orang (25,74%), dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) nonASN sebanyak 2 (dua) orang (0,3%). Kemudian, pejabat fungsional sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) orang (63,46%), pejabat pelaksana sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) orang (32,54%), pejabat struktural sebanyak 24 (dua puluh empat) orang (3,55%), dan Staf Ahli Menteri sebanyak 3 (tiga) orang (0,44%). Tingkat pendidikan juga menunjukkan kapasitas kompetensi yang solid, dengan pegawai berpendidikan S-1 sejumlah 310 (tiga ratus sepuluh) orang (45,86%), pegawai berpendidikan S-2 sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) orang (21,60%), pegawai berpendidikan S-3 sebanyak 16 (enam belas) orang (2,37%) dan untuk pegawai berpendidikan D-IV, D-III, D-I, SLTA, dan lainnya sejumlah 204 (dua ratus empat) orang (30,18%). Struktur usia didominasi oleh kelompok produktif, yaitu usia 36–45 tahun sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang (42,75%) dan usia 46–60 tahun sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang (28,99%), yang menggambarkan kombinasi pengalaman dan stabilitas kelembagaan. Adapun komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 412 (empat ratus dua belas) orang (60,95%) dan perempuan sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) orang (39,05%). Dengan komposisi ini, SDM aparatur Setjen KKP memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan peran strategis organisasi.



Gambar 7. Profil SDM Aparatur Setjen KKP 2025-2029
Sumber: KKP, 2025 (*data per 21 November 2025)

Ke depan, penguatan kapasitas SDM aparatur akan diarahkan pada peningkatan profesionalisme, penguasaan teknologi digital, serta kemampuan analisis strategis dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*). Setjen KKP berkomitmen untuk terus membangun budaya kerja adaptif dan kolaboratif yang mampu menjawab tantangan dinamika organisasi dan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan yang semakin kompleks. Dengan SDM aparatur yang unggul dan sistem yang terintegrasi, Setjen KKP akan menjadi motor penggerak birokrasi yang efektif dan efisien.

b. Transformasi Digital Pelayanan Publik

Transformasi digital di lingkungan Setjen KKP telah berjalan signifikan melalui penerapan berbagai sistem aplikasi pemerintahan seperti KRISNA, SAKTI, *e-Monev*, *e-Office*, serta sistem akuntansi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berbasis digital *real time*. Inovasi tersebut mendukung efisiensi kerja birokrasi, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara. Selain itu, penerapan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) dan sistem pemantauan pengadaan (monevpbj.kkp.go.id) turut memperkuat prinsip *good governance* dalam setiap proses PBJ pemerintah.

Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dalam rangka peningkatan reformasi di KKP. Ke depan, upaya akan difokuskan pada pengembangan interoperabilitas antarsistem, peningkatan keamanan data, serta penguatan literasi digital aparatur. Transformasi digital bukan hanya alat bantu administrasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari perubahan budaya kerja menuju birokrasi yang responsif, inovatif, dan berorientasi hasil.

c. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Sudah Terintegrasi

Sebagai koordinator utama proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan KKP, Setjen KKP memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan antara arah kebijakan, program, dan alokasi sumber daya. Didukung oleh SDM aparatur perencana dan pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kompeten serta pemanfaatan sistem informasi seperti KRISNA dan SAKTI, mekanisme integrasi perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penerapan inisiatif PUG dalam kebijakan perencanaan juga menunjukkan komitmen Setjen KKP dalam memastikan pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KKP, Biro Perencanaan telah mengembangkan aplikasi Kinerjaku sebagai *dashboard* untuk memantau kinerja organisasi dari level terendah sampai level tertinggi yang dapat dipantau secara langsung oleh pimpinan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. Aplikasi ini diperkuat dengan program prioritas (insight.kkp.go.id) yang berfungsi untuk memantau perkembangan pelaksanaan program prioritas KKP yang menjadi arahan Presiden.

Sinkronisasi antara perencanaan strategis dan penganggaran berbasis kinerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi instrumen

penting untuk memastikan setiap program memberikan hasil nyata dan terukur. Setjen KKP akan berperan sebagai pengendali kebijakan yang memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran sejalan dengan visi pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

d. Sinergi, Kemitraan, dan Inovasi Sumber Pendanaan

Setjen KKP memiliki peran sentral sebagai pengoordinasi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategis nonAPBN. Melalui pemanfaatan instrumen lembaga keuangan, program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan lembaga filantropi. Kemampuan membangun kemitraan strategis ini menjadi peluang untuk memperluas sumber pembiayaan dan mendukung keberlanjutan program prioritas KKP. Salah satu inisiatif yang menunjukkan efektivitas kolaborasi tersebut adalah pelaksanaan program pembiayaan dana bergulir LPMUKP dengan tarif layanan yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat kelautan dan perikanan.

Dengan potensi lebih dari 3,2 juta pelaku usaha perikanan tangkap dan 2,1 juta pelaku usaha budi daya di seluruh Indonesia, peluang peningkatan skala usaha melalui pembiayaan LPMUKP sangat besar. Didukung infrastruktur teknologi informasi yang memadai, Setjen KKP berperan dalam mengawal penguatan tata kelola pembiayaan berbasis digital agar lebih transparan, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Ke depan, sinergi lintas sektor dan inovasi pembiayaan alternatif akan menjadi strategi penting dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi biru nasional.

e. Pusat Koordinasi, Regulasi, dan Kebijakan Strategis

Sebagai unsur pembina dan pengarah di lingkungan KKP, Setjen KKP memiliki posisi sentral dalam memastikan kesinambungan dan konsistensi kebijakan yang diambil oleh seluruh unit organisasi. Dengan dukungan pejabat fungsional yang berpengalaman dan sistem JDIH yang terintegrasi, proses perumusan, dan sosialisasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Fungsi ini diperkuat dengan kemampuan membangun jejaring kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Ke depan, peran Setjen KKP sebagai *think tank* akan semakin penting dalam memberikan rekomendasi strategis berbasis data dan analisis kebijakan yang komprehensif kepada pimpinan KKP. Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terus dijaga untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, Setjen KKP akan menjadi pusat kendali yang memastikan seluruh kebijakan, regulasi, dan program KKP berjalan harmonis menuju pencapaian visi pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berbagai potensi yang dimiliki Setjen KKP menunjukkan kapasitas kelembagaan yang kuat untuk menjadi penggerak utama reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan KKP. Penguatan kapasitas SDM, penerapan sistem digital yang

terintegrasi, sinergi perencanaan dan penganggaran, kolaborasi lintas sektor, serta fungsi koordinatif yang solid menjadi modal strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas KKP. Dengan mengoptimalkan seluruh potensi tersebut secara terarah dan berkelanjutan, Setjen KKP diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai pusat pengendali kebijakan dan manajemen kelembagaan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.

1.2.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Setjen KKP mencerminkan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel pada periode 2025–2029. Tantangan tersebut mencakup aspek koordinasi perencanaan–penganggaran, dukungan pendanaan, pengelolaan aset, manajemen SDM, kualitas regulasi, optimalisasi teknologi digital, hingga manajemen data dan advokasi kebijakan. Beragam isu tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan sistem, kapasitas, dan kolaborasi antarunit agar Setjen KKP dapat menjalankan peran strategisnya sebagai pengendali kebijakan dan penggerak reformasi birokrasi di lingkungan KKP secara lebih optimal. Dengan memahami permasalahan ini secara komprehensif, upaya pembenahan dapat dirancang secara lebih terarah untuk mendukung transformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Beberapa pemetaan permasalahan Setjen KKP adalah sebagai berikut:

a. Integrasi Perencanaan Penganggaran yang Belum Maksimal

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu belum optimalnya integrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran, khususnya pada fungsi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang menyebabkan disharmonisasi data dan keterlambatan proses monitoring kinerja. Keterbatasan interoperabilitas pada aplikasi seperti KRISNA, SAKTI, dan e-Monev Bappenas mengakibatkan adanya potensi ketidakakuratan data, sehingga mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah pusat. Dinamika perencanaan dan penganggaran juga dibatasi oleh fleksibilitas adaptasi sistem terhadap perubahan nomenklatur program/kegiatan dan kebutuhan pemutakhiran indikator, sehingga potensi penyesuaian strategi belum dapat didukung secara otomatis dan *real-time* oleh sistem yang ada.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kolaborasi antarunit, penyelarasan sistem data dan indikator kinerja, serta penguatan tata kelola berbasis *evidence-based planning and budgeting* untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program prioritas KKP ke depan.

b. Terbatasnya Alokasi APBN

Keterbatasan alokasi APBN menjadi salah satu tantangan utama dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Setjen KKP. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan ruang fiskal untuk mengoptimalkan penguatan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan pengembangan teknologi informasi. Ke depan, diperlukan inovasi pendanaan

serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk menginisiasi dan mengelola sumber pembiayaan inovatif dan kolaboratif. Upaya ini menjadi penting agar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Setjen KKP tidak bergantung pada APBN.

c. Sistem Layanan Internal dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Optimal

Modernisasi layanan administrasi perkantoran masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek digitalisasi pelayanan yang belum sepenuhnya terintegrasi antarunit organisasi. Kualitas sarana dan prasarana perkantoran juga belum merata di seluruh unit organisasi KKP, sehingga memengaruhi efektivitas dukungan layanan administrasi. Selain itu, pengelolaan layanan internal masih dihadapkan pada tantangan terkait efisiensi proses, ketepatan waktu pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.

Permasalahan utama pada bidang pengadaan adalah masih terdapat variasi dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip *value for money* dan integritas proses pengadaan. Implementasi sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam integrasi data antarplatform dan pengawasan pascakontrak. Kapasitas SDM aparatur pengelola PBJ di tingkat satuan kerja juga masih bervariasi, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengadaan. Selain itu, pengawasan internal terhadap potensi risiko penyimpangan pengadaan masih perlu diperkuat secara sistematis.

d. Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Negara yang Belum Optimal

Pengelolaan BMN di lingkungan KKP masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas SDM aparatur dan anggaran. Ketersediaan tenaga ahli di bidang pengelolaan aset belum merata, dan sebagian besar proses administrasi masih berfokus pada aspek kepatuhan daripada optimalisasi nilai aset. Selain itu, keterbatasan APBN yang hanya mencakup sebagian kebutuhan layanan pengelolaan BMN sehingga menghambat proses pemeliharaan dan pengembangan sistem pengelolaan aset secara menyeluruh.

Pengelolaan anggaran dan aset negara masih menghadapi kendala efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan. Integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam pemetaan nilai manfaat aset terhadap kinerja organisasi. Proses pelaporan keuangan juga masih memerlukan waktu yang panjang akibat belum tersedianya sistem otomasi data yang *real-time*. Selain itu, penatausahaan aset, validasi data BMN, dan kapasitas pengelola keuangan maupun pengelola BMN di tingkat satuan kerja masih perlu diperkuat.

e. Diplomasi Biru, Kerja Sama Internasional, dan Komunikasi Publik yang Belum Optimal

Upaya memperkuat peran diplomasi biru (*blue diplomacy*) KKP masih menghadapi tantangan di tengah dinamika isu global kelautan dan perikanan yang berpotensi memengaruhi kepentingan nasional. Koordinasi antarunit

organisasi dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri belum sepenuhnya konsisten, sehingga mengurangi efektivitas perencanaan dan sinkronisasi kegiatan. Pengelolaan kerja sama lintas lembaga dan internasional juga perlu diperkuat, khususnya dalam aspek perencanaan, pemantauan, dan evaluasi agar hasil kerja sama lebih berdampak pada kinerja kelembagaan. Selain itu, kapasitas SDM aparatur dalam bidang diplomasi dan komunikasi strategis masih terbatas, serta pemanfaatan teknologi digital belum optimal untuk mendukung komunikasi publik dan diplomasi internasional yang lebih adaptif.

f. Manajemen SDM Aparatur dan Sistem Kinerja Aparatur yang Belum Efektif

Manajemen SDM aparatur di lingkungan Setjen KKP masih menghadapi tantangan dalam penerapan sistem berbasis kinerja dan meritokrasi. Proses rotasi dan promosi jabatan belum sepenuhnya mempertimbangkan analisis potensi individu dan kebutuhan organisasi, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor administratif atau historis. Selain itu, sistem penilaian kinerja ASN melalui e-Kinerja masih menitikberatkan pada aspek proses, bukan hasil (*outcome-based*), sehingga belum mampu mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Belum terintegrasinya hasil kinerja dengan sistem penghargaan dan promosi jabatan juga menyebabkan rendahnya motivasi dan kompetisi positif antarpegawai. Diperlukan perbaikan sistem manajemen talenta, pengembangan *individual competency mapping*, serta penyempurnaan kebijakan berbasis merit agar pengelolaan SDM aparatur dapat lebih objektif, transparan, dan mendorong kinerja yang optimal.

g. Penyusunan Peraturan, Perjanjian, dan Advokasi Hukum yang Belum Optimal

Dalam aspek regulasi dan layanan hukum, Setjen KKP masih menghadapi tantangan dalam hal penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dimana adanya irisan kewenangan antarkementerian/ lembaga sehingga proses koordinasi menjadi lebih kompleks, memerlukan sinkronisasi yang intensif, dan berdampak pada kecepatan penyusunan regulasi di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam hal penyusunan perjanjian nasional dan internasional, Setjen KKP masih menghadapi permasalahan khususnya terkait kepatuhan terhadap alur penyusunan perjanjian yang telah ditetapkan serta koordinasi teknis antar unit organisasi belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Hal ini menuntut adanya pemahaman bersama mengenai tata alur penyusunan perjanjian guna meningkatkan koordinasi yang lebih efektif. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam penguasaan bahasa asing, kemampuan negosiasi dan penyusunan posisi nasional, serta pemahaman terhadap dinamika hukum internasional saat ini.

Selain itu, Setjen KKP menghadapi permasalahan dalam hal advokasi hukum yang bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga menyebabkan belum optimalnya advokasi hukum di tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

h. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Keamanan Siber yang Belum Optimal

Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam lingkungan KKP menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan komprehensif. Kendala utama bersumber dari keterbatasan infrastruktur TIK yang belum merata, alokasi anggaran yang belum proporsional, serta defisit dalam kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur. Kondisi tersebut menghambat terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien, akuntabel, dan mampu menyediakan layanan publik yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan adopsi teknologi mutakhir, keamanan yang kuat, serta program pengembangan kompetensi SDM aparatur secara berkelanjutan.

Peningkatan volume dan kompleksitas data yang dikelola secara digital turut menaikkan risiko terhadap serangan siber, termasuk *ransomware*, *credential leak*, peretasan data sensitif, dan spionase digital. Adanya serangan-serangan pada keamanan jaringan KKP, antara lain kategori serangan *malware* dan *defacement* menjadi yang paling banyak terjadi. Penyisipan file *malware* terdeteksi oleh perangkat lunak *Endpoint Detection and Response* (EDR) yang dipasang pada server. Saat ini terdapat 35 (tiga puluh lima) *server* yang telah dipasang, 172 (seratus tujuh puluh dua) perangkat lunak EDR, mengingat pentingnya peran EDR dalam mendeteksi serangan diperlukan juga pembaruan perangkat lunak EDR dan pemasangan pada *server* yang masih belum terpasang. Objek yang terdeteksi terindikasi *malware* diantaranya *Trojan.JS.Agent.eqq*, *HEUR:Exploit.Script.Generic*, *HEUR:Backdoor.PHP.WebShell.gen*, dan *Virus.Win32.Pioneer.cz*. Selain itu, berdasarkan hasil *scan* perangkat EDR pernah ditemukan file *backdoor* yang berhasil disusupi penyerang seperti *GS-Netcat*, *PwnKit*, *Cicak.php*, dan *Chankro.so*.

Kerangka kerja tata kelola keamanan siber masih belum terimplementasi secara matang, tercermin dari minimnya Standar Operasi Prosedur (SOP) tanggap insiden dan mekanisme audit keamanan berkala. Alokasi sumber daya finansial untuk pertahanan siber seringkali tidak sebanding dengan biaya pengembangan aplikasi, menciptakan celah kerentanan yang substansial. Selain itu, kurangnya kesadaran dan disiplin keamanan siber di lingkup internal pegawai juga diidentifikasi sebagai titik paling rentan yang sering dimanfaatkan oleh penyerang. Penguatan infrastruktur TI, peningkatan literasi digital pegawai, serta pembaruan sistem keamanan siber menjadi langkah prioritas dalam memastikan ketahanan digital kelembagaan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Setjen KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan yakni “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada Tahun 2025-2029 Setjen KKP menetapkan visi, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Pada Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional" untuk mewujudkan “Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

2.2 Misi

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing SDM Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Setjen KKP sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, memegang peranan penting dalam melaksanakan Misi KKP ke-4 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, Setjen KKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif menuju birokrasi KKP berkelas dunia”.

2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan Misi Setjen KKP Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas berbasis digital di lingkungan KKP” dengan indikator meningkatnya Indeks RB KKP dari 90,05 pada Tahun 2025 menjadi 90,25

pada Tahun 2029. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sasaran strategis, Setjen KKP Tahun 2025-2029 tersebut, Setjen KKP perlu menetapkan Sasaran Program (SP).

SP merupakan perwujudan dari kontribusi Setjen KKP dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas. Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Setjen KKP sebagai suatu *outcome* atau *impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Guna pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Setjen KKP Tahun 2025-2029, Setjen KKP menetapkan 2 (dua) SP yaitu:

1. SP1. “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP” dengan indikator kinerja:
 - a. nilai RB general KKP (nilai);
 - b. IP ASN Lingkup KKP (indeks);
 - c. nilai keterbukaan informasi publik KKP (nilai);
 - d. NKPA KKP (nilai);
 - e. nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (nilai);
 - f. batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setjen KKP (%);
 - g. persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP (%); dan
 - h. nilai pembangunan integritas lingkup Setjen KKP (nilai).
2. SP2. “PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan” dengan indikator kinerja:
 - a. persentase pencapaian target PNBP layanan BLU LPMUKP (%); dan
 - b. persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%).

Sasaran program Setjen KKP ini mendukung pencapaian SS 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas, telah disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan manajemen risiko KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029. Penyusunan indikasi risiko ini dilakukan melalui proses identifikasi untuk mengenali dan menentukan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran strategis, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara lebih terarah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas.

Tabel 2. Indikasi Risiko Terhadap Pencapaian SS 5

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	
SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1	Belum optimalnya kolaborasi antarbirokrasi yang mengakibatkan antarunit kerja bekerja secara terpisah-pisah dan duplikasi program/kegiatan
	2	Belum optimalnya transformasi digital yang mengakibatkan rendahnya keamanan siber dan resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital
	3	Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	
		koordinasi dan tanggung jawab
	4	Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan
	5	Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, maka arah dan kebijakan KKP tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Lima Arah Kebijakan Ekonomi Biru

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut

Kebijakan memperluas kawasan konservasi laut merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya hayati kelautan dan perikanan. Kawasan konservasi laut berfungsi sebagai ekosistem bagi sumber daya hayati yang hidup di dalamnya. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif antara lain: terlindunginya habitat, menjaga struktur ekosistem, meningkatkan kemampuan penyerapan karbon, terlindunginya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan potensi sumber daya ikan. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan luas kawasan konservasi laut menjadi 30% pada tahun 2045 atau setara dengan 97,5 juta ha kawasan konservasi laut.

2. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota

PIT merupakan sistem pengelolaan perikanan yang mengatur penangkapan ikan berdasarkan zona dan kuota untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, mencegah *overfishing*, mengoptimalkan manfaat ekonomi

dan sosial bagi nelayan/pelaku usaha perikanan, mendorong pemerataan ekonomi daerah, dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Pemerintah mendorong pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan hasil budi daya (*blue food*), mengurangi tekanan terhadap stok sumber daya ikan yang berasal dari tangkapan liar, serta menciptakan lapangan kerja di sektor perikanan. Melalui penerapan teknologi budi daya yang ramah lingkungan dan efisien diharapkan dapat dihasilkan produk perikanan budi daya yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi.

4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kebijakan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan ini memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan daya dukung lingkungan sehingga konflik kepentingan antarpemangku kepentingan dapat dikendalikan. Kebijakan ini mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir berdasarkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Untuk melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka KKP akan memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

5. Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif nelayan dalam upaya pembersihan sampah plastik di laut. Melalui program-program insentif dan peningkatan kesadaran, diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke laut. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan.

Untuk memastikan kelima arah kebijakan strategis berjalan secara efektif, Setjen KKP memiliki peran strategis dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkualitas, melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan digitalisasi administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, pelaksanaan RB di lingkungan KKP tidak hanya menjadi instrumen perubahan internal, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya birokrasi kelas dunia dalam melaksanakan transformasi ekonomi biru secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Setjen KKP juga mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan peran BLU sebagai instrumen peningkatan pelayanan publik dan kemandirian pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Melalui LPMUKP, Setjen KKP berupaya memperluas akses permodalan bagi pelaku

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kelautan dan perikanan, mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya.

Optimalisasi kinerja BLU LPMUKP diarahkan untuk meningkatkan PNPB secara berkelanjutan, melalui pengelolaan dana bergulir yang lebih produktif, efisien, dan berdampak. Dengan demikian, peningkatan PNPB BLU LPMUKP tidak hanya menjadi indikator kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan keberhasilan KKP dalam menciptakan ekosistem pembiayaan inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Setjen KKP

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, strategi arah kebijakan KKP diarahkan tidak hanya pada peningkatan kinerja sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga pada penguatan RB sebagai fondasi utama pelaksanaannya. Reformasi Birokrasi di lingkungan KKP menjadi instrumen strategis dalam memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana secara efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Melalui penguatan integritas kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, KKP berkomitmen membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Dengan tata kelola yang semakin efektif dan kolaboratif, pelaksanaan strategi kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudi daya, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional secara berkelanjutan.

Berdasarkan peran Setjen KKP yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi KKP Tahun 2025-2029 terutama yang terkait dengan Setjen KKP yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka arah kebijakan dan strategi Setjen KKP tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola RB KKP Melalui Strategi:

- a. meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi termasuk penguatan perencanaan dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor kelautan dan perikanan, mendorong keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional, serta meningkatkan kolaborasi pendanaan inovatif nonAPBN;
- b. mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan BMN secara tertib dan efisien;
- c. penguatan implementasi manajemen talenta sebagai *human capital* dalam akselerasi program KKP;

- d. penguatan organisasi, tata kerja yang efektif dan efisien, penyederhanaan sistem kerja, dan penataan jabatan;
- e. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya dan penyediaan informasi hukum yang responsif;
- f. meningkatkan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi kelautan dan perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;
- g. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan internal meliputi urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, persuratan dan kearsipan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas;
- i. meningkatkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengembangkan SPBE untuk mendukung efisiensi layanan publik dan internal serta pengembangan sistem infrastruktur ocean big data; dan
- j. meningkatkan analisis dan rumusan rekomendasi strategis berdasarkan data dan fakta yang valid (*evidence-based policy*) serta melaksanakan integrasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendiseminasikan rekomendasi kebijakan yang memberikan dampak dan manfaat di bidang kelautan dan perikanan.

2. Fasilitasi Percepatan Penyaluran Dana Kelolaan BLU LPMUKP Melalui Strategi:

- a. menyalurkan dana bergulir yang berpendampingan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang tergabung dalam koperasi, dimana koperasi tersebut menjalankan usaha dengan skala keekonomian (*economic of scale*);
- b. meningkatkan penyaluran dana bergulir melalui penambahan dana kelolaan; dan
- c. meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan penyaluran dana bergulir melalui pemantauan dan pengendalian yang didukung sistem informasi dalam rangka mewujudkan modernisasi BLU.

Selain arah kebijakan penguatan tata kelola RB KKP dan fasilitasi percepatan dana kelolaan BLU LPMUKP, juga melaksanakan dan mengintegrasikan pengarusutamaan yang merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program tidak semata berorientasi pada capaian sektoral, tetapi juga memberikan manfaat yang inklusif bagi masyarakat serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui pengarusutamaan, perencanaan dan pelaksanaan program diarahkan untuk mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian ekosistem, sehingga

pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan antargenerasi dan ketahanan bangsa dalam menghadapi dinamika dan tantangan global.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Renstra KKP Tahun 2025–2029 mengintegrasikan lima pengarusutamaan pembangunan sebagai kerangka lintas kebijakan dan program. Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025–2029 meliputi pendekatan lintas kebijakan dan lintas fungsi untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Setjen selaras dengan arah pembangunan KKP. Melalui pengarusutamaan ini, Sekretariat Jenderal berperan memastikan bahwa seluruh dukungan manajemen dan tata kelola pembangunan secara konsisten mendukung pencapaian sasaran strategis KKP yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang terkait dengan Setjen meliputi:

1. Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dimana PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG, agar setiap unit organisasi dapat menyusun perencanaan yang responsif gender melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup :

- a. memperkuat 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. menyiapkan *roadmap* PUG;
- d. mengembangkan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit organisasi eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. membuat profil gender;
- f. keberpihakan pemenuhan hak anak dan kaum rentan kelautan dan perikanan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dan dalam melaksanakan TPB diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen

pelaksanaan target TPB 14 (empat belas), yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam UNCLOS 1982.

KKP juga mendukung pencapaian target TPB, tujuan 1 "Tanpa Kemiskinan" (*No Poverty*), tujuan 2 "Tanpa Kelaparan" (*Zero Hunger*), tujuan 7 "Energi Bersih dan Terjangkau" (*Affordable and Clean Energy*), tujuan 8 "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" (*Decent Work and Economic Growth*), tujuan 9 "Industri, Inovasi, dan Infrastruktur" (*Industry Innovation and Infrastructure*), tujuan 12 "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab" (*Responsible Consumption and Production*), tujuan 13 "Penanganan Perubahan Iklim" (*Climate Action*), dan tujuan 17 "Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan" (*Partnership for the Goals*).

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis *web (on-line)*, serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan implementasi di berbagai sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan karbon biru, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dan kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini diimplementasikan melalui Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan untuk mendukung aktivitas pembangunan yang rendah emisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan nonpemerintah. Keterlibatan pihak nonpemerintah terus didorong melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menekan potensi penurunan PDB akibat dampak perubahan iklim yang bersifat jangka panjang, seperti kerusakan infrastruktur, penurunan hasil tangkapan nelayan, hilangnya mata pencaharian, dan meningkatnya penyakit sensitif iklim. Dalam sektor kelautan dan perikanan pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan. Upaya adaptasi dan mitigasi difokuskan pada penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur pesisir melalui rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang), penerapan teknologi rendah emisi, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi multipemangku kepentingan untuk membangun kawasan pesisir yang adaptif dan tangguh menghadapi bencana serta perubahan iklim, sekaligus mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan demi kesejahteraan jangka panjang.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian SP untuk periode 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu fungsi Setjen KKP yaitu melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan regulasi tersebut.

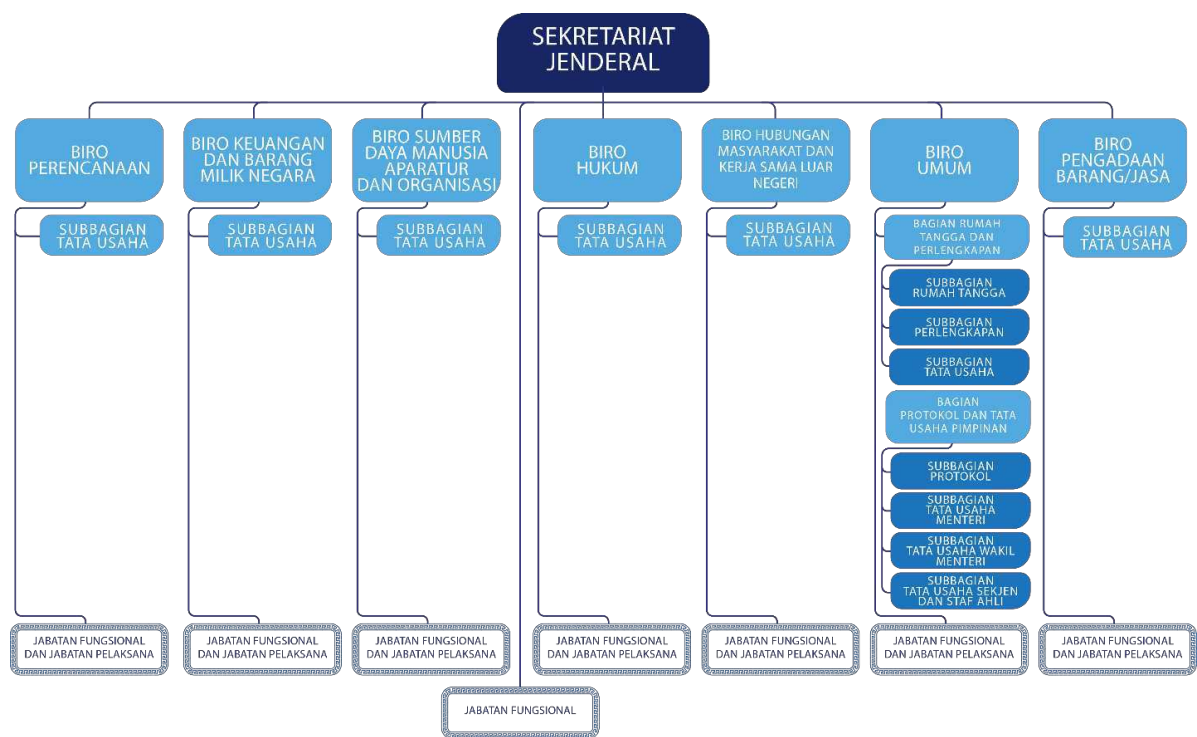
3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. tata laksana dan SDM aparatur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Setjen KKP adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Terdapat 3 (tiga) unit organisasi di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri yaitu Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis, dan Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.



Gambar 9. Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Setjen KKP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi kegiatan KKP;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran KKP;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi KKP;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ditetapkan strategi pemenuhan ASN dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pengadaan ASN melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK
 1. CPNS
 - a) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jabatan teknis strategis bidang yang mensyaratkan kompetensi dasar PNS;
 - b) mengutamakan pengisian pada jabatan fungsional; dan
 - c) pengadaan CPNS dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran dan hasil validasi formasi.

2. PPPK

- a) difokuskan pada penyelesaian penataan tenaga non-ASN; dan
- b) pengadaan PPPK dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan kemampuan anggaran dan hasil validasi formasi
- b. optimalisasi mobilitas talenta ASN dari instansi lain, yaitu memperkuat kompetensi SDM aparatur secara cepat khususnya untuk jabatan yang memerlukan pengalaman, kompetensi, maupun keahlian spesifik/ tertentu; dan
- c. dilaksanakan secara selektif melalui mekanisme uji kompetensi jabatan dan berdasarkan kebutuhan tiap unit organisasi.

Rencana pemenuhan ASN melalui kombinasi strategi pengadaan CPNS, PPPK, dan mobilitas talenta dari instansi lain tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rencana Pemenuhan ASN tahun 2025-2029 melalui mekanisme pengangkatan pertama pengadaan ASN dan mobilitas talenta ASN dari instansi lain

Pengangkatan Pertama*)										Mobilitas talenta ASN dari instansi lain*)				
CPNS					PPPK									
2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
10	106	72	50	38	111	99	22	12	9	5	19	23	17	14

*) Tabel rencana pemenuhan ASN Tahun 2025-2029 melalui mekanisme pengangkatan pertama pengadaan ASN dan mobilitas talenta ASN dari instansi lain

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
4.1.1. Target Kinerja Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Misi KKP 2025-2029, maka Setjen KKP merumuskan tujuan yaitu, “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas berbasis digital di lingkungan KKP”. Tujuan diukur menggunakan indikator kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tujuan Setjen KKP Tahun 2025-2029

Tujuan		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Implementasi RB yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Digital di Lingkungan KKP	1	Indeks RB KKP	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25

4.1.2. Target Kinerja Sasaran Strategis

Pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP, Setjen KKP berperan mengawal Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Peran ini diwujudkan melalui penguatan fungsi koordinasi, pembinaan, serta dukungan administrasi di seluruh unit organisasi KKP agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara terintegrasi dan berorientasi hasil. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator kinerja utama beserta target capaian yang akan menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian kinerja pada periode tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Strategis Setjen KKP Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS.5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1	Indeks RB KKP	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25

4.1.3. Target Kinerja Sasaran Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian

kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Setjen KKP. Adapun sasaran program dan target sasaran program Setjen KKP Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Program Setjen KKP Tahun 2025-2029

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	1	Nilai RB general KKP (Nilai)	84,8	84,85	84,9	84,95	85
		2	IP ASN lingkup KKP (Indeks)	82	82,5	83	83,5	84
		3	Nilai keterbukaan informasi publik KKP (Nilai)	97	97,25	97,5	97,75	98
		4	NKPA KKP (Nilai)	82,5	82,75	83	83,25	83,5
		5	Nilai Hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (Nilai)	77	78	79	80	81
		6	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Setjen KKP (%)	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP (%)	85	86	87	88	89
		8	Nilai pembangunan integritas lingkup Setjen KKP (Nilai)	76	77	78	79	80
2	PNBP BLU Sektor KP Meningkat	9	Persentase pencapaian target PNBP BLU LPMUKP (%)	97	97,2	97,5	97,8	98
		10	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%)	90	91	92	93	94

4.1.4. Target Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN, APBD, dan DAK), swasta, perbankan dan nonperbankan, masyarakat, dunia usaha, serta sumber pendanaan lain yang sah. Adapun penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD terus diintensifkan. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi BLU LPMUKP serta kredit yang disalurkan melalui perbankan atau lembaga pengelola dana bergulir lainnya. Selain itu juga dilakukan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan kreatif dan pendanaan inovatif antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance*, *Blue Finance* transfer/hibah ke daerah, *Grant Budget Support Aids*, Kreditor Swasta Asing (KSA), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan lain-lain. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKP juga melakukan sinergi melalui penerimaan hibah barang/jasa yang diperoleh melalui kerjasama antarlembaga baik nasional maupun internasional. Kerangka indikasi pendanaan Setjen KKP Tahun 2025-2029 secara terinci disusun dalam lampiran matrik kinerja dan pendanaan.

BAB V

PENUTUP

Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Setjen KKP Tahun 2025-2029 disusun sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Setjen KKP ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dan kebijakan lingkup KKP ke dalam dokumen perencanaan lima tahunan. Dokumen tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan di lingkungan Setjen KKP.

Untuk memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal KKP akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Renstra Setjen KKP tahun 2025-2029. Evaluasi pelaksanaan Renstra Setjen KKP Tahun 2025-2029 dilakukan untuk:

- a. menilai kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan;
- b. mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan;
- c. menelaah penerapan manajemen risiko pembangunan nasional; dan
- d. menilai penerapan pembiayaan inovatif pemerintah dan pembiayaan nonpemerintah.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Setjen KKP Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya mengarahkan kebijakan dan program, tetapi juga memastikan bahwa capaian kinerja Setjen KKP dalam 5 (lima) tahun ke depan terukur, akuntabel dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

LAMPIRAN MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SETJEN KKP TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kementerian Kelautan dan Perikanan														
	Sasaran Strategis 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Juta Ha	30	30,7	31,3	31,9	32,5						DJPK
		Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut	%	1	40	50	60	70						DJPK
	Sasaran Strategis 2. Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PDB perikanan	Triliun Rupiah	595,06	626,04	657,02	688	718,98						DJPT, DJPB
		Volume produksi perikanan	Juta Ton	24,58	25,84	27,25	28,73	30,16						DJPT, DJPB
		Volume produksi garam	Juta Ton	2,25	2,5	2,75	2,85	3						DJPK
		Indeks pembangunan pulau-pulau kecil	Indeks	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61						DJPK
		Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	Persen	13,6	34,69	55,78	77,55	100						DJPRL
		Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Indeks	82	83	84	85	86						DJPSDKP
		Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang terfasilitasi	Lembaga	4	23	27	45	53						DJPT, DJPB, DJPK
	Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	Nilai ekspor hasil perikanan	USD Miliar	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5						DJPDS
		Konsumsi ikan masyarakat	kg/kapita/tahun	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63						DJPDS

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Persen	70	72	74	76	80						BPPMHKP
	Sasaran Strategis 4. Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	Indeks kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan	Indeks	70	72	74	76	78						BPPSDM
	Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	Indeks RB KKP	Indeks	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25						SETJEN, ITJEN
WA-Program Dukungan Manajemen														
		01-Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP												
		01-Nilai RB general KKP	Nilai	84,8	84,85	84,9	84,95	85						
		02- IP ASN lingkup KKP	Indeks	82	82,5	83	83,5	84						
		03-Nilai keterbukaan informasi publik KKP	Nilai	97	97,25	97,5	97,75	98						
		04-NKPA KKP	Nilai	82,5	82,75	83	83,25	83,5						
		05-Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	Nilai	77	78	79	80	81						
		06-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setjen	%	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen	%	85	86	87	88	89						
		08-Nilai pembangunan integritas lingkup Setjen	Nilai	76	77	78	79	80						
		02-PNBP BLU sektor kelautan dan perikanan meningkat												
		01-Persentase pencapaian target PNBP layanan BLU LPMUKP	%	97	97,2	97,5	97,8	98						
		02-Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP	%	90	91	92	93	94						
2322-Legislati, Litigasi dan Kerjasama									16,252	18,633	20,181	22,099	24,209	Biro Hukum,Biro Perencanaan dan BHKLN
		01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang penyiapan produk hukum KKP												
		01-Indeks reformasi hukum KKP	Indeks	85	87	89	90	91						
		02-Indeks kualitas kebijakan KKP	Indeks	85	85	87	87	89						
		03-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP	%	100	100	100	100	100						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				01-Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	%	95	95	96	96	97					
				02-Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	%	88	89	90	91	92					
				03-Persentase posisi/rekomendasi/ prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	%	93	94	95	95,5	96					
				04-Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100					
			AEC-Kerja sama												
				002- Kesepakatan kerja sama antar lembaga	01-Terselenggaranya kesepakatan kerja sama antarlembaga	Kesepakatan	1	1	1	1	1				
			EBA-Layanan dukungan manajemen internal												
				957-Layanan hukum	01-Tersusunnya peraturan undang- undangan di bidang kelautan dan perikanan dan tersedianya advokasi hukum di bidang kelautan dan perikanan	Layanan	6	6	6	6	6				

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
				969-Layanan bantuan hukum	01-Tersedianya layanan pendampingan dan tindakan hukum lain pada pegawai internal kementerian	Layanan	1	1	1	1	1								
			PEC-Kerja sama																
				001-Kerjasama internasional bidang kelautan dan perikanan	01-Tersedianya layanan kerjasama internasional	Dokumen	2	2	2	2	2								
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM												12,634	13,796	13,403	13,805	14,219	Biro SDMAO		
		01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan SDM aparatur dan organisasi																	
					01-Nilai implementasi RB Setjen	Nilai	86	86,5	87	87,5	88								
					02-Indeks sistem merit KKP	Nilai	394	395	396	397	398								
					03-IP ASN Setjen	Indeks	82	82,5	83	83,5	84								
					04-Indeks implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	85	86	87	88	89								
					05-Indeks pembinaan jabatan fungsional KKP	Indeks	72	73	74	75	76								
					06-Nilai kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi KKP	Nilai	80	81	82	83	84								
					07-Persentase penyederhanaan struktur organisasi KKP	%	100	100	100	100	100								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			08-Penetapan penghargaan ASN bidang kelautan dan perikanan tingkat nasional	Nilai	5	5	5	5	5						
			09-Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi KKP	Nilai	5	5	5	5	5						
			10-Indeks BerAKHLAK KKP	%	70	75	80	85	90						
			11-Persentase rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional daerah	%	82	83	86	89	92						
			12-Indeks kepuasan pelayanan SDM aparatur dan organisasi	Indeks	3	3	4	4	4						
			13-Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan level 3 serta standar operasional prosedur lingkup Setjen	%	65	85	85	85	85						
		EBA-Layanan dukungan manajemen internal													
			960-Layanan organisasi dan tata kelola internal	01-Tersedianya layanan organisasi dan tata kelola internal	Layanan	1	-	-	-	-					
			Z08-Layanan organisasi dan tata kelola internal	01-Tersedianya layanan organisasi dan tata kelola internal	Layanan	-	1	1	1	1					
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
			954-Layanan Manajemen SDM	01-Tersedianya layanan manajemen SDM	layanan	5	-	-	-	-					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Z13-Layanan Manajemen SDM	01-Tersedianya layanan manajemen SDM	orang	-	15.490	15.490	15.490	15.490						
2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN										33,262	35,727	37,026	41,329	45,912	Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan BMN
		01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi													
			01-Nilai SAKIP KKP	Nilai	85	85,05	85,1	85,15	85,2						
			02-Persentase proyek PHLN yang berstatus <i>at risk</i>	%	<59	<58	<57	<56	<55						
			03-Persentase dokumen pendanaan luar negeri KKP yang tereregister	%	95	95,5	96	96,5	97						
			04-Capaian IKU KKP	Nilai	75	76	77	78	79						
			05-Capaian prioritas nasional KKP	Nilai	91	92	93	94	95						
			06-Nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas SPIP KKP	Nilai	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8						
			07-Persentase pelaksanaan kegiatan lintas sektor	%	83	84	85	86	87						
			08-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP	Indeks	92	92.3	92.6	93	93.5						
			09-Nilai penilaian mandiri SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	87	87,2	87,4	87,6	87,8						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		10-Persentase peningkatan anggaran melalui pendanaan kolaboratif dan inovatif dalam rangka mendukung ekonomi biru	%	10	12	14	16	18						
		11-Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional	%	95	-	-	-	-						
		02-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan, dan BMN												
		01-Opini BPK atas LK KKP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		02-Level Maturitas SPIP KKP	Level	3	3	3	3	3						
		03-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	92	92	92	92	92						
		04-Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indeks	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36						
		05-Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indeks	3	3,05	3,1	3,15	3,2						
		06-Persentase Pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100						
		07-Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Setjen	%	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan				Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				952-Layanan Perencanaan dan Penggangan	01-Tersedianya layanan perencanaan dan penganggaran	Dokumen	41	-	-	-	-						
				Z23 -Layanan Perencanaan dan Penggangan	01-Tersedianya layanan perencanaan dan penganggaran	Layanan	-	1	1	1	1						
				953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Persentase pemenuhan dokumen SAKIP KKP	%	100	-	-	-	-						
				Z24 -Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01- Tersedianya layanan pemantauan dan evaluasi	Rekomendasi	-	7	7	7	7						
				955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Tersedianya layanan manajemen keuangan	Dokumen	7	7	7	7	7						
2328-Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, Umum, serta Pengadaan Barang dan Jasa												431,752	475,368	518,835	559,932	588,752	Biro Umum dan Biro PBJ
				01-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik													
					01-Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	Indeks	97	97,5	98	98,5	99						
					02-Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP	Nilai	97	97,25	97,5	97,75	98						
					03-Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	%	95	95	96	96	97						
					04-Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	90	91	92	93	94						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		02-Tata kelola pemerintah yang baik di bidang pengelolaan administrasi, dan ketatausahaan pimpinan												
		01-Tingkat digitalisasi arsip KKP 02-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan 03-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat 04-Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP 05-Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP 06-Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang Diumumkan Pada SiRUP	01-Tingkat digitalisasi arsip KKP	Nilai	85	87	89	90	91					
			02-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan	Nilai	85	85,5	86	86,5	87					
			03-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat	Nilai	85	85,5	86	86,5	87					
			04-Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	Nilai	80	81	82	83	84					
			05-Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP	%	75	76	77	78	79					
			06-Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang Diumumkan Pada SiRUP	%	80	82	84	86	88					
		03-Tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan administrasi dan pengadaan barang/jasa												
		01-Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa KKP 02-Persentase Rencana Umum Pengadaan KKP yang Diumumkan Pada SiRUP	01-Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa KKP	Indeks	85	85,5	86	86,5	87					
			02-Persentase Rencana Umum Pengadaan KKP yang Diumumkan Pada SiRUP	%	80	82	84	86	88					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		03-Persentase Usulan Tender yang Ditindaklanjuti UKPBJ KKP	%	100	100	100	100	100						
		04-Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumukan dalam RUP	Nilai	5	5	5	5	5						
		04-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup level II Setjen												
		01-Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Nilai	75	-	-	-	-						
		02-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Biro Umum dan PBJ	Nilai	71,5	71,75	72	72,25	72,5						
		03-Nilai PM SAKIP Level II Setjen	Nilai	87	87,2	87,4	87,6	87,8						
		04-Indeks Profesionalitas ASN Level II Setjen	Indeks	82	82,5	83	83,5	84						
		05-Persentase penyelesaian temuan BPK Level II Setjen	%	100	100	100	100	100						
		06-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Level II Setjen	%	85	86	87	88	89						
		07-Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Level II Setjen	%	100	100	100	100	100						

[illegible]

Program/ Kegiatan			Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Informasi dan Komunikasi														
				001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen	01-Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi lingkup Setjen	Unit	117	117	117	117	117						
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal														
				958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Tersedianya Layanan Kehumasan	Layanan	7	7	7	7	7						
				959-Layanan Protokoler	01-Tersedianya Layanan Protokoler	Layanan	2	2	2	2	2						
				962-Layanan Umum	01-Tersedianya layanan umum	Layanan	17	17	17	17	17						
				994-Layanan Perkantoran	01-Tersedianya gaji dan tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1						
					02-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1						
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
				951-Layanan Sarana Internal	01-Tersedianya layanan sarana internal	Unit	21	21	21	21	21						
				971-Layanan Prasarana Internal	01-Tersedianya layanan prasarana internal	Unit	1	1	1	1	1						
2329-Pengelolaan Data dan Informasi												38,641	56,505	59,656	63,121	66,933	Pusat Data dan Informasi
			01-Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP														
				01-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data	%	91	92	93	94	95							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kelautan dan Perikanan												
		02-Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	Indeks	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
		03-Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	%	77	78	79	80	81						
		04-Indeks SPBE KKP	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						
		05-Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	Nilai	77	78	79	80	81						
		06-Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	90	92	94	96	98						
		07-Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100						
		08-Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	Indeks	2	2,1	2,2	2,3	2,4						
		09-Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	%	64,68	65	65,5	66	66,5						
		10-Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP	Nilai	3	3	3	4	4						
		11-Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	Nilai	2,7	2,75	2,75	2,77	2,77						
		12-Indeks Pelayanan Publik KKP	Indeks	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8						
		13-Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	Nilai	88,87	88,9	88,93	88,96	88,99						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				14-Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	Nilai	89,6	89,7	89,8	89,9	89,95					
		BMA-Data dan Informasi Publik													
			001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya tingkat kepatuhan pengolahan data KP	Layanan	3	3	3	3	3					
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
			960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Tersedianya layanan organisasi dan tata kelola internal	Layanan	1	1	1	1	1					
		FAB-Sistem Informasi Pemerintahan													
			001-Sistem Informasi Pemerintahan	01-Tersedianya Sistem Informasi Pemerintahan	Layanan	4	4	4	4	4					
		QMA-Data dan Informasi Publik													
			001-Layanan Data Kelautan dan Perikanan	01-Tersedianya pengolahan data citra satelit radar	Data	78	160	100	100	100					
		RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
			001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Tersedianya Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terintegrasi yang operasional	Unit	1	1	1	1	1					
			002-Sarana Data Citra Satelit Radar	01-Tersedianya Sarana Data Citra Satelit Radar	Unit	1	5	1	1	1					

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				951-Layanan sarana internal	01-Tersedianya layanan sarana internal	Unit	7	7	7	7	7						
			FAE-Pemantauan dan evaluasi serta Pelaporan														
				001-Laporan pengelolaan keuangan	01-Tersedianya laporan keuangan BLU	Laporan	2	2	2	2	2						
				002-Laporan pengawasan internal pengelolaan modal modal usaha	01-Tersedianya laporan hasil pengawasan internal	Laporan	1	1	1	1	1						
				003-Laporan monitoring dan evaluasi program pengelolaan dana bergulir	01-Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi program penyaluran dana bergulir	Laporan	1	1	1	1	1						
7939-Analisis Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan												-	7,500	8,500	9,750	11,000	Pusat Kebijakan Strategis
		01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang analisis kebijakan strategis kelautan dan perikanan															
				01-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90							
				02-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang produksi perikanan dan produk kelautan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor	%	-	80	85	85	90							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				kelautan dan perikanan											
				03-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang swasembada garam yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90					
				04-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang peningkatan konsumsi dan penguatan pasar yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90					
				05-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang analisis dan evaluasi kebijakan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90					
			ABW-Kebijakan bidang kemaritiman dan kelautan												
			121-Analisa dan rumusan rekomendasi strategis di bidang kelautan dan perikanan	01-Tersedianya analisa dan rumusan rekomendasi strategis di bidang kelautan dan perikanan	Rekomendasi kegiatan	-	5	5	5	5					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			AEA- Koordinasi													
				151- Diseminasi rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan	01-Diseminasi rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan	Kegiatan	-	5	5	5	5					
				155-Integrasi dan sinergi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan	01-Terselenggaranya integrasi dan sinergi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan	Kegiatan	-	5	5	5	5					

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah